

BOOK CHAPTER

PENGANTAR ILMU EKONOMI

M. Surno Kutoyo
Sri Juminawati
Bambang Libriantono
Sabil
Nur Arif Nugraha
La Ode Turi
Rahmat Joko Nugroho
Yunita Wulandari, M.H
Yoesoep Edhie Rachmad
T. Yuliana Purba
Arniati



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BOOK CHAPTER
PENGANTAR ILMU EKONOMI

Penulis : M. Surno Kutoyo, Sri Juminawati,
Bambang Libriantono, Sabil, Nur Arif
Nugraha, La Ode Turi, Rahmat Joko
Nugroho, Yunita Wulandari, Yoesoep
Edhie Rachmad, T. Yuliana Purba,
Arniati

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-5382-51-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-
5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini kami beri judul "Book Chapter: Pengantar Ilmu Ekonomi". Dimana ilmu ekonomi merupakan hal yang erat dalam kehidupan. Dimulai dari produsen sebagai penyedia barang maupun jasa hingga ketangan konsumen yang menerima. Salah satu konsep dasar seperti inilah yang menjadi pengantar dalam mempelajari ilmu ekonomi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 TEORI DAN MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI, SERTA PROSES PERTUMBUHAN EKONOMI	1
A. Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi	1
B. Pembangunan Ekonomi	3
C. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	6
D. Teori Pendekatan dan Tahapan Pertumbuhan Ekonomi.....	19
E. Tipe Pertumbuhan Ekonomi	26
Daftar Pustaka.....	32
Tentang Penulis	34
BAB 2 TEORI PRODUKSI SERTA PENENTUAN HARGA FAKTOR PRODUKSI.....	35
A. Teori Produksi.....	35
B. Penentuan Harga Faktor Produksi	41
Daftar Pustaka.....	51
Tentang Penulis.....	53
BAB 3 PENGELOLAAN DAN TUJUAN PERUSAHAAN	54
A. Tata Kelola Perusahaan.....	55
B. Perusahaan Menurut Undang-Undang RI	56

C. Unsur-unsur Perusahaan.....	58
D. Bentuk Perusahaan di Indonesia	59
E. Jenis-jenis Perusahaan Secara Umum.....	61
F. Manajemen Perusahaan (<i>Company Management</i>) ...	62
G. Tingkatan Manajemen dalam Perusahaan.....	67
H. Tugas Manajemen Perusahaan.....	72
I. Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Perusahaan	74
Daftar Pustaka.....	75
Tentang Penulis	76
BAB 4 INVESTASI, KOMSUMSI, TABUNGAN, KESEIMBANGAN	77
A. Konsep Dasar Investasi	77
B. Konsumsi.....	85
C. Fungsi Tabungan.....	89
D. Pendapatan Nasional Keseimbangan.....	94
Daftar Pustaka.....	97
Tentang Penulis	98
BAB 5 BENTUK PASAR; PERSAINGAN SEMPURNA, MONOPOLI, DUOPOLI & OLIGOPOLI.....	99
A. Industri dalam Pasar Persaingan Sempurna.....	99
B. Industri dalam Pasar Monopoli.....	101

C. Industri dalam Pasar Duopoli.....	108
D. Industri dalam Pasar Oligopoli	113
Daftar Pustaka.....	119
Tentang Penulis.....	121
BAB 6 PERHITUNGAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN	
NASIONAL.....	122
A. Pendapatan Nasional.....	122
B. Perhitungan Pendapatan Nasional	129
C. Distribusi Pendapatan Nasional	134
Daftar Pustaka.....	138
Tentang Penulis.....	140
BAB 7 KEMISKINAN, INEKUALITAS DAN MOBILITAS.....	141
A. Pendahuluan	141
B. Kemiskinan.....	143
C. Inekualitas	158
D. Mobilitas.....	167
E. Penutup.....	177
Daftar Pustaka.....	179
Tentang Penulis	181
BAB 8 PERPUTARAN MESIN EKONOMI SERTA PERAN	
PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN PASAR.....	182
A. Perputaran Mesin Ekonomi.....	182

B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian.....	200
Daftar Pustaka.....	204
Tentang Penulis	206
BAB 9 KEUANGAN DAN PENGELUARAN NEGARA, SERTA BEBAN PAJAK	207
A. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara	207
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	213
C. Pajak	223
Daftar Pustaka.....	231
Tentang Penulis	232
BAB 10 TEORI PERSAINGAN MONOPOLI.....	233
A. Pengertian Monopoli	233
B. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Pasar Persaingan Monopoli.....	241
C. Monopoli dan Kesejahteraan Masyarakat.....	244
Daftar Pustaka.....	248
Tentang Penulis	249
BAB 11 PERDAGANGAN INTERNASIONAL, KURS VALUTA, DAN LEMBAGA EKONOMI INTERNASIONAL.....	250
A. Perdagangan Internasional.....	250
B. Kurs Valuta	267
C. Lembaga Ekonomi Internasional.....	280

Daftar Pustaka.....	290
Tentang Penulis.....	291
BAB 12 TEORI KUANTITAS DAN SISTEM PERBANKAN	293
A. Teori Kuantitas.....	293
B. Sistem Perbankan.....	301
Daftar Pustaka.....	310
Tentang Penulis.....	311

BAB

1

TEORI DAN MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI, SERTA PROSES PERTUMBUHAN EKONOMI

M. Surno Kutoyo

A. Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi

1. Pengertian Ilmu Ekonomi

a. Albert L Meyers

Albert L Meyers menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi yaitu sesuatu ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan serta pemuas akan kebutuhan manusia.

b. P.A. Samuelson

P.A. Samuelson menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi yaitu suatu studi bagaimana orang orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan dimasa

mendatang, pada berbagai orang dan golongan masyarakat.

c. Sadono Sukirno

Sadono Sukirno menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi yaitu Menyatakan Ilmu Ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

2. Pengertian Sistem Ekonomi

a. George N. Halm

George N. Halm menyatakan bahwa "*Economic system differ, socialist or capitalist, planned or unplanned, ccording to' their institutions*". Pendapat ini menekankan kaitan yang erat antara sistem ekonomi dengan lembaga-lembaga yang ada padanya.

b. John F. Due

Pendapat lain yang sejalan dengan pendapat di atas dikemukakan oleh John F. Due bahwa sebuah sistem ekonomi adalah "*... as the group of economic institutions or, regarded as a unit the economic system, the organization through the operation of which the various resources scarce, relative to the need for them are utilized to satisfy the wants of man*".

3. Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi

Berbagai unsur pendukung yang dapat memberi warna pada sistem ekonomi sebagaimana dikemukakan juga oleh Van der Valk, seperti dikutip oleh Winardi, bahwa beberapa hal yang dihadapi manusia dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Kebutuhan manusia.
- b. Jumlah, sifat, serta susunan penduduk.
- c. Konstelasi alamiah negara yang bersangkutan.
- d. Jumlah barang-barang modal yang tersedia.
- e. Pengetahuan teknik.
- f. Organisasi yuridis dan sosial masyarakat.

B. Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Timbulnya kesadaran tentang perlunya menganalisa masalah pembangunan dari berbagai aspek, dan selanjutnya merumuskan kebijaksanaan yang komprehensif, telah menimbulkan dorongan kepada para ilmuwan dan praktisi pembangunan untuk memecahkan masalah-masalahnya dengan cara pendekatan yang bersifat multi disiplinier.

Pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk

sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Jelas dapat dilihat dari definisi ini bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat utama. Pembangunan ekonomi merupakan : (i) suatu proses perubahan yang terus menerus, (ii) usaha menaikkan tingkat pendapatan per kapita, serta (iii) terus berlangsung dalam jangka panjang.

Beberapa ahli ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi (*economic developmen*) dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Ahli-ahli ekonomi yang membedakan kedua-dua pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai (i) peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan penduduk, atau (ii) perkembangan *GDP* yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam *GDP*, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertambahan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak (Sukirno S; 1985; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

2. Perkembangan Perhatian Terhadap Pembangunan Ekonomi

Dewasa ini para ilmiawan dari berbagai jurusan ilmu pengetahuan, pejabat dan badan pemerintah dari berbagai tingkatan, pemerintah negara-negara maju dan beberapa badan internasional, memberikan perhatian yang sangat besar kepada berbagai aspek mengenai pembangunan ekonomi.

Ada beberapa faktor yang dapat dipandang sebagai penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Yang terpenting, hal tersebut merupakan akibat dari berkembangnya cita-cita negara yang baru mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara maju. Beberapa negara yang baru muncul setelah Perang Dunia kedua berakhir adalah India, Pakistan, Birma, Philipina, Korea dan Indonesia, bukan saja merupakan negara yang relatif miskin, tetapi juga merupakan bagian dunia di mana masalah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Kepadatan penduduk di wilayah tersebut sangat tinggi dan perkembangan penduduk mereka sangat cepat.

Berkembangnya perhatian dunia luar terhadap usaha pembangunan di negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan. Salah satu yang terpenting adalah alasan kemanusiaan, yaitu

keinginan untuk membantu negara berkembang mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketinggalan mereka dari negara maju. Pertimbangan penting lainnya adalah sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dalam perang ideologi, misalnya antara Amerika Serikat dengan Uni Sovyet, serta sebagai alat untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi di antara negara-negara maju dan negara berkembang tertentu (Sukirno S; 1985; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya teori pembangunan ekonmi dapat digolongkan menjadi lima golongan besar yaitu aliran Klasik, Neo Klasik, Post Keynesian, Karl Marx, Schumpeter,

1. Aliran Klasik

Analisis dari aliran teori tersebut pada dasarnya menelaah hal-hal berikut :

- a. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, dan
- b. Proses pertumbuhan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ditentukan oleh :

- 1) Jumlah persediaan kapital,
- 2) Luas tanah,

- 3) Tingkat teknologi yang dipakai, serta
- 4) Perkembangan jumlah penduduk.

Empat faktor tersebut, masing-masing menurut teori klasik memiliki peranan yang menentukan mengingat keadaan serta jumlahnya yang konstan, sedangkan peranan penduduk dianggap memberikan sumbangan yang positif bagi pembangunan dilihat dari segi :

- a) Sebagai unsur *demand* atau potensi pasar, dan
- b) Sebagai sumber tenaga terampil maupun menyediakan golongan wiraswasta.
- c) Dua faktor lainnya yaitu, modal dan teknologi, khususnya modal dipandang oleh teori ini sebagai unsur yang terpenting bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Analisis mengenai proses pertumbuhan ekonomi, menganalisis tentang peramalan akhir dari proses pertumbuhan ekonomi. Aliran klasik melihat bahwa kelebihan penduduk menyebabkan suatu masyarakat akan mengalami kemunduran kembali dalam pembangunannya. Ahli-ahli ekonomi klasik antaranya Karl Marx menganggap bahwa proses pertumbuhan ekonomi melalui tahap-tahap tertentu dan akibat adanya proses persaingan maka

masyarakat akan menuju kepada tingkat atau tahap yang lebih baik (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi; 1986). Beberapa penganut aliran Klasik itu, di antaranya Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus.

a. Adam Smith

Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.

b. David Ricardo

Menurut David Ricardo, di alam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatnya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung pada golongan

kapitalis dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakannya.

c. Thomas Robert Malthus

Menurut Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara saja sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

2. Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik merupakan analisa yang didasarkan kepada teori Klasik. Menurut Neo-Klasik permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Aliran Neo-Klasik memberikan ramalan yang sangat pesimistis, yaitu adanya kelebihan penduduk yang mengakibatkan adanya kemunduran kembali dalam pembangunan ekonomi sebagai akibat kekurangan kapital.

Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi.
- Perkembangan itu merupakan proses yang gradual
- Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- Aliran Neo-Klasik merasa optimis terhadap perkembangan
- Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

3. Aliran/Analisis Post-Keynesian

Aliran atau kajian/analisa Post-Keynesian berpandangan lebih moderat atau tidak terlalu pesimis dalam hal perkembangan ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa adanya kekurangan modal hanya akan berakibat adanya kelambanan dan adanya resesi ekonomi (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi; 1986). Teori Keynes terbatas pada analisa jangka pendek. Untuk analisisnya Keynes menggunakan anggapan berdasar atas keadaan waktu sekarang. Teori Harrod-Domar atau juga disebut sebagai Post-Keynesian merupakan pengembangan dari analisa Keynes, maka tidak mengherankan kalau terdapat perbedaan pandangan antara keduanya. Penanaman modal menurut Harrod-Domar mempunyai fungsi ganda yaitu, sebagai penambahan kapasitas alat-alat modal dan mempertinggi keseluruhan pengeluaran masyarakat; hal terakhir itulah yang dipandang paling penting.

a. Analisis Harrod dan Domar: Mengenai Pertumbuhan yang Mantap (*Steady Growth*)

Analisisnya berpusat pada penentuan keadaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pendapatan riil yang terus menerus tanpa ada gangguan apa-apa.

Karena investasi adalah pembentukan modal dan dapat menaikkan kapasitas produksi, maka

pembentukan alat-alat kapital baru akan mempunyai beberapa pengaruh :

- 1) Kapital yang baru akan tetap belum dapat digunakan, sebab bila digunakan hasilnya tidak dapat terjadi, karena pendapatan tetap.
- 2) Kapital baru itu akan digunakan dengan biaya dari alat kapital yang telah ada sebelumnya
- 3) Kapital yang baru akan menggantikan tenaga kerja

b. Analisis Evsey D. Domar

Anggapan yang dipakai untuk teorinya adalah :

- 1) Bahwa perekonomian sudah ada dalam tingkat pengerjaan penuh (*full employment income*)
- 2) Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri.
- 3) Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*) atau dengan kata lain ada penyesuaian yang cepat.
- 4) Hasrat menabung marjinal (*marginal propensity to save*) dan hasrat menabung rata-rata (*average propensity to save*) sama .

Aliran Neo-Klasik dan Aliran/Analisis Post-Keynesian berkembang setelah adanya resesi

ekonomi dunia tahun 1930, yang nampaknya merupakan bukti kelemahan penting dari teori Klasik, sehingga diharapkan keduanya merupakan sumbangan penting bagi penanganan masalah pembangunan ekonomi periode tersebut dapat dirumuskan peranannya dalam menunjukkan :

- a) Faktor-faktor yang menentukan pembangunan ekonomi; dan
- b) Sampai dimana pentingnya masing-masing faktor tersebut dalam menentukan pembangunan ekonomi.

4. Teori Pertumbuhan & Kehancuran dari Karl Marx

a. Sejarah perkembangan masyarakat

Karl Marx mengemukakan teorinya berdasar atas sejarah perkembangan masyarakat dimana perkembangan itu melalui 5 tahap :

- 1) masyarakat komunal primitif
- 2) masyarakat perbudakan
- 3) masyarakat feodal
- 4) masyarakat sosialis

1) Masyarakat Komunal Primitis (*primitive communal*)

Dalam tahap ini masyarakat menggunakan alat untuk bekerja yang sifatnya masih sangat sederhana seperti alat-alat dari batu dan sebagainya. Alat yang masih sederhana itu bukan milik perseorangan tetapi milik komunal. Dalam masyarakat ini tidak ada surplus produksi di atas konsumsi karena orang membuat sendiri barang-barang untuk kebutuhannya sendiri.

2) Masyarakat Perbudakan (*Slavery*)

Hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dengan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka merupakan dasar terbentuknya masyarakat perbudakan. Dengan cara kerja seperti ini keuntungan para pemilik alat produksi semakin besar karena budak-budak hanya diberi sekedar naskah supaya dapat bekerja dan tidak mati.

3) Masyarakat Feodal

Karena adanya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat maka berakhirlah sistem perbudakan dan terbentuklah suatu masyarakat baru yaitu masyarakat feodal, dimana kaum bangsawan memiliki alat-alat produksi yang paling utama

yaitu tanah. Para petani kebanyakan terdiri dari bekas budak yang dibebaskan. Mereka mengerjakan tanah miliknya sendiri dapat dikerjakan.

4) Masyarakat Kapitalis

Seperti diketahui masyarakat menghendaki kebebasan ekonomi. Hubungan produksi dalam sistem kapitalis didasarkan pada pemilikan individu (*private ownership*) masing-masing kapitalis terhadap alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan kelas buruh yang mau tidak mau menjual tenaganya karena mereka tidak memiliki alat produksi.

5) Masyarakat Sosialis

Dalam sistem sosialis, pemilikan alat-alat produksi didasarkan atas hak milik sosial (*social ownership*) hubungan produksi merupakan hubungan kerja sama dan saling membantu diantara buruh yang bebas dari unsur eksploitasi.

b. Runtuhnya sistem kapitalis

Setiap tingkat (fase) keadaan ekonomi dan sosial masyarakat dengan teknologi dan semangatnya yang khusus, menimbulkan jenis-jenis pertentangan kelas yang berakhir dengan runtuhnya fase tersebut dan timbulnya fase berikut

yang sifatnya lebih tinggi daripada fase sebelumnya. Mengenai perkembangan sistem kapitalis, Karl Marx bersifat pesimis, karena kapitalisme tidak saja akan mengalami stagnasi tetapi juga akan mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh perkembangan kapitalisme itu sendiri. Fase-fase keruntuhan Sistem Kapitalis, adalah sebagai berikut:

1) Konsentrasi

Perusahaan yang satu menggabung dengan perusahaan lain supaya tidak bangkrut karena persaingan. Dengan demikian terjadilah pemusatan-pemusatan perusahaan menjadi perusahaan-perusahaan besar yang jelas jumlahnya makin sedikit.

2) Akumulasi

Perusahaan yang sudah menggabung akan bertambah besar jumlahnya karena sedikit banyak perusahaan yang sudah besar itu memiliki kedudukan monopoli, sehingga kekayaannya semakin menumpuk (berakumulasi). Perbedaan antara si kaya dan si miskin menjadi semakin besar.

3) Kesengsaraan

Persaingan tersebut di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang kecil menjadi bubar dan mereka menggabungkan diri pada buruh.

Buruh menjadi semakin banyak jumlahnya dan semakin kuat pula. Karena penawaran buruh semakin banyak, maka upah dapat ditekan dan mereka ini masih dapat didesak oleh kaum kapitalis. Akibatnya kemelaratan menjadi semakin meluas.

c. **Proses perkembangan ekonomi**

Kemutakiran dunia teknologi merupakan faktor yang penting sekali bagi perkembangan. Dengan teknik yang lebih baik, keuntungan akan bertambah, kemudian diinvestasikan lagi dan seterusnya. Tetapi hal itu tidak dapat berjalan terus, perkembangan ekonomi kapitalis itu tidak saja macet tetapi bahkan mengahami kehancuran (Irawan & M Suparmoko; 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

5. **Teori Inovasi dari Scumpeter**

a. **Implementasi kombinasi faktor produksi**

Kombinasi baru dilaksanakan oleh wiraswasta (*entrepreneur*). Mereka ini adalah inovator yang melaksanakan kombinasi baru faktor produksi.

Yang diartikan dengan inovasi dapat berbentuk lima hal yaitu :

- 1) Mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru
- 2) Mengenalkan suatu metode produksi yang baru
- 3) Pembukaan pasar baru bari perusahaan
- 4) Penemuan sumber-sumber ekonomi baru
- 5) menjalankan organisasi baru dalam industri

b. Runtuhnya sistem kapitalis

Dengan anggaraan seperti tersebut di atas Schumpeter berpendapat bahwa dasar-dasar ekonomi dan sosial sistem kapitalis itu akan runtuh. Ia mendasarkan pendapatnya itu atas tiga hal :

- Usangnya fungsi wiraswasta
- Runtuhnya rangka kehidupan masyarakat kapitalis
- Runtuhnya golongan politikus

D. Teori Pendekatan dan Tahapan Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Tahapan Linier

Ahli-ahli dari negara-negara maju mempunyai pengalaman dari Marshall Plan yang berkenaan dengan bantuan keuangan serta teknik dari Amerika Serikat yang memungkinkan negara-negara Eropa yang hancur karena perang, kemudian membangun kembali dan memodernisasikan perekonomian mereka hanya dalam beberapa tahun saja. Pengalaman itulah yang rupanya bisa dimanfaatkan untuk masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin (Sanusi B, 2004; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

1) Pertumbuhan ekonomi menurut W.W.Rostov

Diungkapkan Rostov dalam pembukaannya bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* melakukan generalisasi perjalanan sejarah modern. Masyarakat dalam dimensi ekonomi terletak dalam salah satu dari lima kategori yakni masyarakat tradisional prasyarat untuk tinggal landas ke arah pertumbuhan yang berkesinambungan, kematangan dan zaman konsumsi massa yang tinggi (Sanusi B, 2004; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

2) Pertumbuhan ekonomi model Roy Harrod - Evsey D.Domor

Untuk pertumbuhan dibutuhkan tersedianya investasi baru sebagai tambahan netto terhadap stok kapital. Jika diasumsikan ada kaitan ekonomi langsung antara besarnya stok kapital secara keseluruhan, kapital (K) dengan *GNP*, Y (pendapatan nasional/*output*). Berarti setiap tambahan netto terhadap stok kapital dalam bentuk investasi (I) baru maka akan menghasilkan kenaikan flow output nasional (*GNP*). Dalam ilmu ekonomi hubungan tersebut sebagai nisbah/ratio/perbandingan kapital/*output* (*capital/output ratio* atau biasa dikenal dengan sebutan *COR*(*Capital output ratio*) (Sanusi B, 2004; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

3) Teori perubahan struktur

Teori ini berupa mekanisme perekonomian suatu negara terbelakang menransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari sesuatu yang dianggap berat yakni sektor pertanian tradisional untuk memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi perekonomian yang lebih modern, lebih mengarah ke kota, serta lebih beraneka bidang industri dan jasanya. Model ini

menggunakan piranti teori Neo Klasik yang berkaitan dengan masalah harga dan alokasi sumber daya, serta ekonometrik untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi (Sanusi B, 2004; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

b. Pendekatan Ketergantungan Internasional

Ketergantungan internasional merupakan suatu model yang mendapat dukungan yang semakin banyak, terutama diantara para cendekiawan dari dunia ketiga.

1) Ketergantungan neo-kolonial

Dalam model ini terlihat hubungan yang sangat tidak seimbang antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin dalam suatu sistem kapitalis internasional. Hal ini merupakan kesengajaan negara-negara kaya dalam upaya mengeksploitasi atau ketidaksengajaan menelantarkan koeksistensi negara miskin dan kaya dalam suatu sistem internasional yang didominasi oleh hubungan kekuasaan yang sangat tidak berimbang antara pusat (negara-negara maju) dan negara-negara pinggiran (periphery, negara-negara berkembang) (Sanusi B; 2004).

2) Paradigma palsu

Model ini merupakan pendekatan yang kurang radikal serta mungkin dapat disebut sebagai model paradigma palsu. Model ini menghubungkan keterbelakangan duni ketiga dengan berbagai kesalahan dan tidak tepatan saran yang diberikan oleh para penasehat atau para pakar internasional dari lembaga-lembaga negara maju dan organisasi-organisasi donor multinasional yang memberikan bantuan yang maksudnya baik tetapi pada kenyataannya sering tidak mempunyai informasi yang cukup. Semuanya memperoleh latihan di lembaga-lembaga negara maju ternyata tanpa disadari sudah menelan dosis yang tidak sehat dari konsep-konsep asing dan model-model teoritis yang begitu bagusnya tetapi tidak dapat diterapkan.

Pelestarian pengajaran mengenai konsep-konsep dan model-model barat yang palsu atau minimal tidak relevan, terus dipertahankan untuk mengukur nisbah/rasio dari kapital/output, meningkatkan nisbah tabungan dan investasi atau memaksimalkan tingkat pertumbuhan GNP. Akibatnya reformasi kelembagaan dan struktural yang dikehendaki, ditelantarkan atau hanya diberikan perhatian seperlunya saja (Sanusi B, 2004; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

c. Dualisme dan Masyarakat Ganda

1) Dualisme internasional

Saling keterkaitan antara negara-negara kaya dan miskin dalam perekonomian internasional hanya menolong sedikit sekali dan dalam beberapa hal bahkan mutlak berbahaya bagi pembangunan negara-negara yang sedang membangun. Hal yang disebut pengaruh arus balik internasional (Internasional back wash effects) itu mengganggu pembangunan yang berkesinambungan di negara-negara dunia ketiga (Sanusi B; 2004).

2) Dualisme dalam negeri

Pengertian mengenai dualisme memberikan kejelasan mengenai struktur ekonomi di negara-negara dunia ketiga, perbandingannya antara 1-12 berbanding 1, antara golongan atas dengan golongan bawah. Sebagian besar yang pendapatannya tinggi tinggal di perkotaan dan sebagian lagi yang termasuk golongan penduduk miskin tinggal di pedesaan. Walau banyak juga ditemukan di negara-negara dunia ketiga lokasi-lokasi kemakmuran yang hidup berdampingan dengan lokasi-lokasi kumuh yang areanya luas (Sanusi B, 2004; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

d. Perkembangan Pemahaman Pembangunan

1) Ukuran perekonomian secara tradisional

Gross National Product (GNP) merupakan suatu ukuran mengenai kemajuan pembangunan suatu negara. Dengan *GNP* ini dapat diperhitungkan bagaimana kemampuan suatu negara mampu meningkatkan produksinya/output nasionalnya pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduknya. *GNP* per kapita riil ialah pertumbuhan *GNP* per kapita dikurangi tingkat inflasi (Sanusi B; 2004).

2) Pembangunan menurut ekonomi baru

Bahwa pembangunan harus di pahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional serta percepatan perubahan ekonomi, pengurangan, ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolute (Sanusi B, 2004; Sunarno SastroAtmodjo, 2012).

2. Tahapan Perkembangan Ekonomi

a. Frederich list

Dia menyusun tahapan perkembangan ekonomi yang dimulai dari fase primitif, berternak, pertanian, pertanian dan pabrik, kemudian pertanian, pabrik dan perdagangan (Irawan & M Suparmoko; 1992)

b. Bruno Hilderbrand

Dia mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu :

- Nатура atau perkonomian barter,
- Perekonomian uang,
- Perekonomian kredit.namun Hilderbrand tidak mengemukakan bagaimana fase tersebut berkembang menuju ke fase berikutnya.

c. Karl Bucher

Proses perkembangan ekonomi menurutnya dapat melalui 3 tingkat yaitu :

- Produksi untuk kebutuhan sendiri,
- Perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas,
- Perekonomian nasional, dimana peranan pedagang-pedagang tampak makin penting.

d. W.W.Rostow

Menurut Rostow dapat dikatakan bahwa sejarah perkembangan ekonomi itu melalui beberapa tingkat yaitu :

- Masyarakat tradisional
- Masyarakat prasyarat untuk lepas landas (*precondition for take-off*)
- Masyarakat lepas landas (*take-off*)
- Masyarakat menuju kematangan (*drive to maturity*)
- Masyarakat konsumsi yang berlebih (*high mass consumption*)

E. Tipe Pertumbuhan Ekonomi

a. Pembangunan secara spontan di Negara-negara Barat (*Spontaneous development*)

Pada masa *renaissance*, orang menggunakan rasionya atau nalarnya untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan teknologis. Reformasi ini sedikit demi sedikit mendobrak halangan agama untuk perkembangan ekonomi. Pinjaman bunga akhirnya dapat diterima. Ini mendorong untuk adanya akumulasi kapital. Kekayaan materiil dipandang berharga sehingga merupakan pendorong untuk berusaha, yang juga merupakan mesin bagi perkembangan

ekonomi. Kondisi ini menjadikan suatu perekonomian nasional semakin baik dan berakhirlah masalah kesulitan angkutan dari barang yang tadinya tidak dapat diangkut karena ongkos yang cukup mahal dan faktor berat dari barang tersebut. Jadi transportasi mendorong produksi industri dan pertanian untuk pasar nasional dan internasional.

Gejala-gejala yang penting adalah adanya akumulasi modal secara perlahan-lahan dan tersebarnya keterampilan wiraswasta dengan jalan perdagangan luar negeri, modernisasi pertanian menaikkan hasil produksi sehingga dapat mensuplai bahan makanan dan tenaga kerja di sektor industri. Disamping itu juga perluasan dibidang transpor yang dapat memperluas pasar baik dalam negeri maupun ke luar negeri (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

b. Pembangunan yang didorong di Jepang (*Induced Development*)

Jepang merupakan negara yang diperintah oleh kaum feodal yang telah menyesuaikan diri dibawah pimpinan pemerintah ke perekonomian kapitalis. Berhasilnya perkembangan ini juga karena faktor psikologi dimana penduduk tetap disiplin dan taat pada pemerintah. Pemerintah mengambil peranan yang sangat penting dan sektor swasta mengikutinya dan kemudian dapat mengambil alih usaha

pemerintah. Ekspor mula-mula berupa produksi primer (sutera) kemudian ekspor industri barang konsumsi (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

c. Perkembangan ekonomi Uni Sovyet “Pembangunan yang dipaksakan” (*Forced Development*)

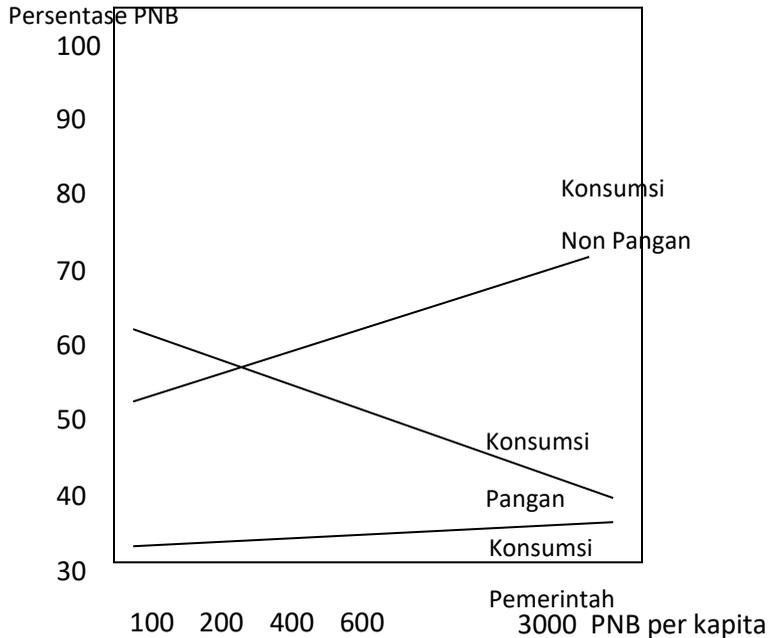
Model pembangunan yang diterapkan di Uni Sovyet, merupakan pengembangan ekonomi yang dipaksakan. Pertumbuhan ekonomi di negara tersebut cukup baik walau ada kekurangan di beberapa hal. Perkembangan di sektor pertanian masih kalah dibandingkan dengan perkembangan sektor industri.

d. Perkembangan ekonomi di Negara-negara Berkembang

Karakter utama perekonomian di negara sedang berkembang adalah “ekonomi dualistik”, yakni industri ekspor yang sudah menggunakan sistem modern, serta masih berada di tingkat subsistem (pertanian tradisional dan kerajinan). Kedua sektor kegiatan ini memproduksi barang-barang untuk pasar lokal dan terpisah dari perekonomian pasar modern (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

1. Transformasi Struktur Perekonomian

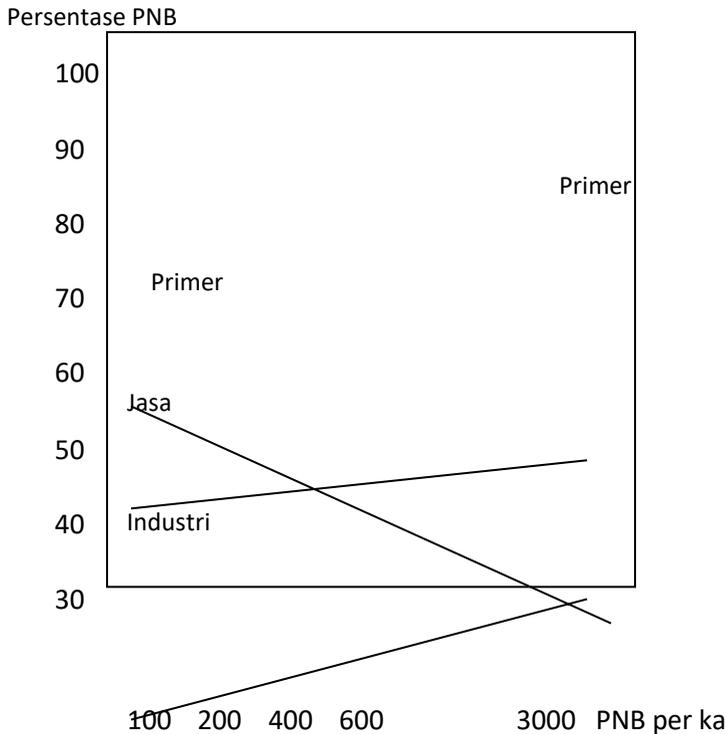
Berprosesnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya mendorong perubahan yang mendasar pada hubungan ekonomi melainkan juga perubahan kelembagaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi berbagai unsur sosial masyarakat, lembaga sosial maupun lembaga politik. Penduduk dinegara berpendapatan rendah membelanjakan pendapatannya dengan proporsi terbesar untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan naiknya pendapatan perkapita porsi pengeluaran untuk konsumsi pangannya berkurang dan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya diluar pangan meningkat. Kenaikan permintaan akibat naiknya pendapatan ini diimbangi dengan naiknya produksi. Pada gambar berikut ini tampak pengaruh kenaikan *PNB* per kapita dalam *US\$* terhadap pola konsumsi masyarakat suatu Negara (Baskara IN & NS Damajanti, 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).



Grafik : Pola Konsumsi Masyarakat

Hasil produksi negara berkembang pada umumnya didominasi oleh industri primer yang meliputi pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Pada tingkat pendapatan rendah negara berkembang sangat bergantung pada industri primer. Sektor industri dan jasa hanya memberikan sumbangan yang kecil terhadap PNB nya. Saat pendapatan per kapita naik, sumbangan sektor primer turun dengan drastis sementara sektor industri dan jasa meningkat. Pergeseran pola

ini akan terus berlanjut selama terjadi kenaikan pendapatan per kapita. Pada gambar berikut ini tampak bahwa sumbangan sektor primer semakin berkurang dengan baiknya pendapatan per kapita suatu Negara (Baskara IN & NS Damajanti, 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).



Grafik : Perubahan Produksi

Daftar Pustaka

- Hartono, D Faunah & Winarti FX (1985); Pengantar Ilmu Ekonomi, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Karseno AR, 2010; Statistika Ekonomi II; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Lipsey RG & PO Steiner (1984); *Economics*, Harper & Row Publisher Inc. Diterjemahkan oleh Anas Sidik, dengan judul: Pengantar Ilmu Ekonomi, Bina Aksara, Jakarta.
- Mansoer FW (2010); Pengantar Ekonomi Mikro, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Reksohadiprodjo S, 2007; Peramalan Usaha; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Samuelson PA, (?); Economics, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Media Sains Indonesia, Bandung.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- SastroAtmodjo S, 2021; Teori Mikroekonomi. Pustaka Learning Center, Malang.

Soelistyo & Insukindro (1995); Teori Ekonomi Makro I,
Universitas Terbuka, Jakarta.

Sudarsono, W Usman & Boediono (?); Pengantar Ekonomi
Mikro. Penerbit Karunika Jakarta Universitas Terbuka,
Jakarta.

Sudjana, 1991; Statistik: Untuk Ekonomi dan Niaga; Penerbit
"Tarsito", Bandung.

Tentang Penulis

Nama : DR. MOH. SURNO KUTOYO, S>AG.,
S>PD., M.Si., CPHCM.
Ttl : BREBES, 10 JULI 1975.
Pekerjaan : ASN.PNS

BAB 2

TEORI PRODUKSI SERTA PENENTUAN HARGA FAKTOR PRODUKSI

Sri Juminawati

A. Teori Produksi

1. Fungsi, Faktor dan Aktivitas Produksi

a. Fungsi Produksi

Beberapa hal pokok dalam Teori Produksi yaitu berkisar mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor-faktor produksi yang disebut pula masukan atau input, dengan hasil produksinya yang disebut juga dengan produk atau output.

Suatu fungsi produksi akan memberi gambaran kepada kita tentang metode produksi yang efisien secara teknis. Pada metode produksi tertentu, jumlah bahan mentah yang digunakan yaitu minimal, dengan tenaga kerja minimal, serta barang-barang modal lain juga minimal. Seluruh pengguna input dalam proses produksi serba minimal atau serba efisien. Metode produksi yang

efisien semacam ini merupakan hal yang amat diharapkan oleh seorang produsen. Oleh karena itu metode produksi yang boros atau tidak efisien tidak diperhitungkan dalam pembicaraan tentang fungsi produksi.

b. Faktor Produksi

Bahwa faktor produksi bersifat mutlak, karena dengan adanya faktor produksi, kegiatan berproduksi dapat berjalan, untuk menghasilkan suatu produk. Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan, suatu industri, atau suatu perekonomian secara keseluruhan. Dalam kondisi teknologi tertentu, hubungan antara input dan outputnya tercermin dalam sebuah rumusan fungsi produksi yang tertentu pula. Bila teknologi yang digunakan berubah, maka fungsi produksinya juga akan berubah.

Ditemui berbagai faktor produksi, antara lain faktor modal, tenaga kerja, bahan-bahan mentah, serta prasarana-prasarana lain. Dari berbagai faktor ini dapat disederhanakan menjadi dua, di mana keduanya memiliki perilaku yang berbeda, yaitu faktor modal/kapital dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek, faktor tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi variabel, yang jumlah penggunaannya berubah-ubah, disesuaikan

dengan perubahan volume produksi. Sedangkan faktor modal dianggap sebagai faktor produksi yang tetap (*fixed*), dalam arti jumlahnya tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume produksi (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

c. Aktivitas Produksi

Dalam prinsipnya, metode produksi merupakan suatu kombinasi dari faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu satuan produk. Pada umumnya untuk menghasilkan satu satuan produk yang dapat digunakan lebih dari satu metode atau cara, atau proses, atau disebut juga sebagai aktivitas produksi (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

2. Produktivitas

a. Produk Marginal

Produk Marginal pada prinsipnya sama dengan konsep tentang utilitas marginal. Produk Marginal merupakan tambahan produksi yang diperoleh sebagai akibat dari adanya penambahan kuantitas faktor produksi yang dipergunakan. Besarnya produk marginal ini tergantung pada besarnya tambahan kuantitas faktor produksi. Sehingga besarnya produk marginal dapat

dirumuskan sebagai perbandingan atau hasil bagi antara tambahan produk dengan tambahan faktor produksi (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

$$\text{Produk Marginal untuk faktor tenaga kerja} = \frac{\Delta Q}{\Delta TK} \text{ atau } \frac{\partial Q}{\partial TK}$$

$$\text{Produk Marginal untuk faktor modal} = \frac{\Delta Q}{\Delta M} \text{ atau } \frac{\partial Q}{\partial M}$$

ΔQ = tambahan produk

ΔTK = tambahan faktor produksi tenaga kerja

ΔM = tambahan faktor produksi modal

Produk Marginal ini mencerminkan produktivitas dari faktor produksi yang berhubungan dengan faktor produksi yang lain. Produktivitas di sini diartikan sebagai berapakah output yang dihasilkan oleh satu unit input (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

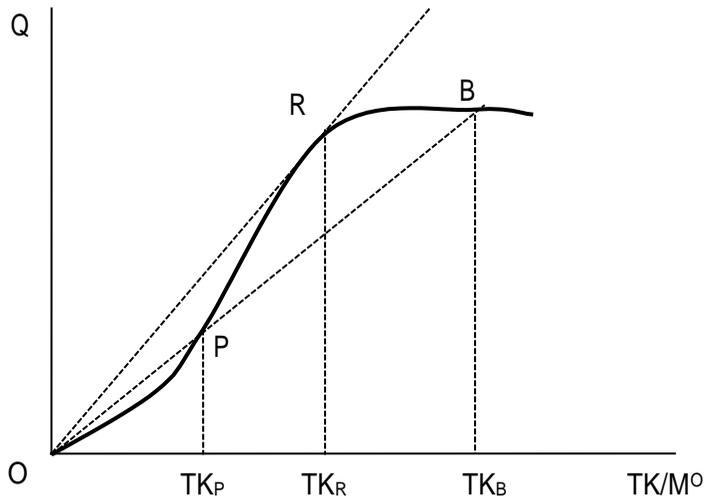
b. Produk Rata-rata

Produktivitas dicerminkan oleh produk marginal. Produktivitas faktor produksi dapat pula ditunjukkan oleh angka produksi rata-rata per satuan faktor. Angka ini dapat diperoleh dengan membagi kuantitas produksi total dengan kuantitas faktor produksi.

Produk rata-rata per satuan tenaga kerja (= produktivitas tenaga kerja $\frac{Q}{TK}$)

Produk rata-rata per satuan modal (= produktivitas modal $\frac{Q}{M}$)

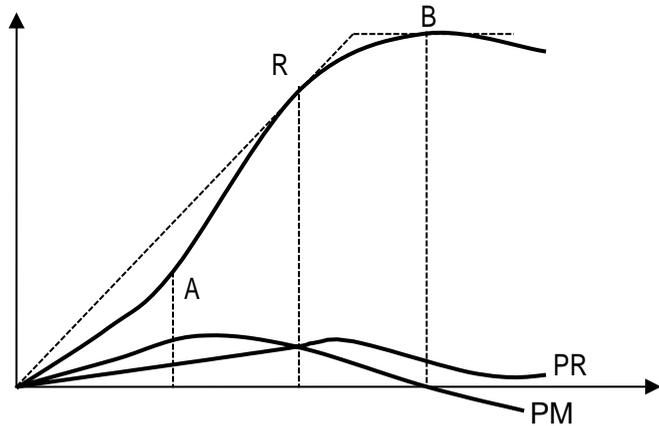
Pada grafik, produk rata-rata atau produktivitas, ditunjukkan oleh lereng dari garis sinar (*ray*) yang dibuat dari titik asal menuju ke titik kurve produksi yang dihasilkan oleh kuantitas tertentu dari faktor produksi yang bersangkutan, seperti berikut ini.



Grafik: Cara Mengukur Produksi Rata-Rata (Sudarsono, 1996).

Penggunaan faktor produksi tenaga kerja sebanyak OTK_A akan menghasilkan produksi rata-rata sebanyak Q/OTK_P . Dalam grafik, besarnya produksi rata-rata ditunjukkan oleh lereng garis sinar dari titik asal (titik origin, O) ke titik P pada kurve produksi. Jarak tegak lurus dari TK_P ke titik P menunjukkan besarnya produksi total. Apabila jumlah ini dibagi dengan OTK_P , akan diperoleh produksi rata-rata yang tidak lain menunjukkan lereng (slope) dari garis sinar tersebut. Semakin banyak penggunaan tenaga kerja, semakin tinggi produksi rata-rata. Kenaikan produksi berimpit dengan garis sinar, yakni pada titik B . pada titik ini, produksi rata-rata sama dengan produksi marginal, yaitu pada saat kuantitas tenaga kerja yang digunakan adalah TK_B (Sudarsono, 1996)

Hubungan antara produksi total, produksi marginal dan produksi rata-rata dari penggunaan faktor produksi tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).



Grafik : Hubungan Antara Produksi Total, Produksi Marginal dan Produksi Rata-rata Dari Penggunaan Faktor TK

B. Penentuan Harga Faktor Produksi

1. Penentuan Harga Faktor Produksi Bukan Modal

a. Permintaan Faktor Produksi

Suatu penawaran faktor produksi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Angka kematian dan kelahiran misalnya, banyak mempengaruhi besarnya penawaran tenaga kerja di masa yang akan datang. Faktor biaya sebagai kekuatan di balik penawaran tidak dapat berlaku sepenuhnya. Akibatnya, teori yang dikembangkan lebih “berat” ke arah permintaan.

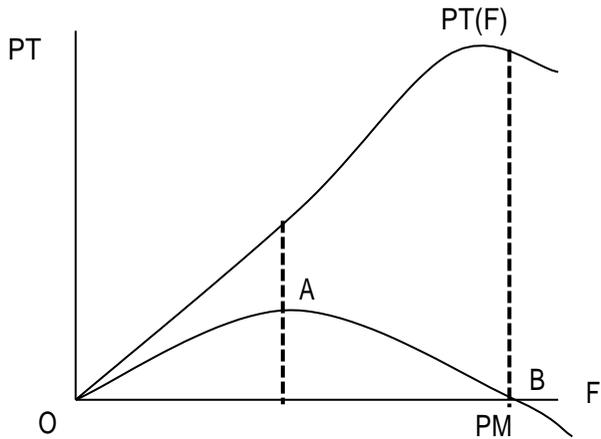
Suatu permintaan terhadap faktor produksi merupakan permintaan turunan. Artinya diturunkan dari permintaan akan barang konsumen. Ada 3 fungsi pokok yang dapat menggambarkan hubungan ini yakni :

$$\begin{array}{ll}
 U = f(Q^k) & U = \text{dayaguna (utility)} \\
 Q^k = g(F) & F = \text{faktor produksi} \\
 F = h(Q^k) & k = \text{komoditi k}
 \end{array}$$

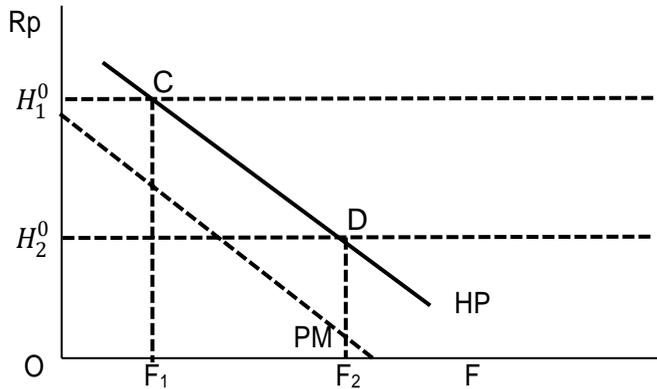
Konsumen menginginkan utilitas atau dayaguna (U). besarnya utilitas yang diperoleh tergantung atas banyak sedikitnya kuantitas komoditi k (Q^k). Banyaknya kuantitas komoditi tergantung atas besarnya input F yang dipakai untuk memproduksi komoditi tersebut. Dari kedua hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan fungsional antara banyaknya input F dengan banyaknya komoditi Q yang dihasilkan. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa banyaknya input F yang dibutuhkan tergantung atas produksi Q yang dibutuhkan masyarakat (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

Dari hubungan tersebut, dapat dijelaskan bahwa titik tolak pembahasan permintaan faktor produksi ini harus dicari pada fungsi produksi.

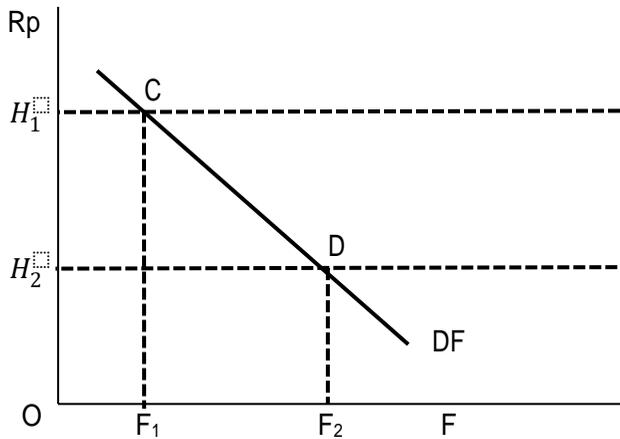
Rangkaian terjadinya permintaan faktor produksi dilukiskan secara sederhana oleh 3 grafik di bawah ini (Sudarsono, 1996).



Grafik : Fungsi Produksi



Grafik : Kurve Harga Produk Marginal



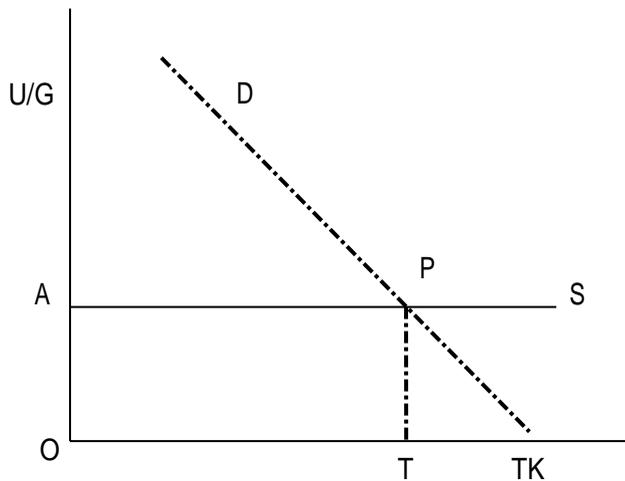
Grafik: Kurve Permintaan Faktor

b. Kesempatan Kerja dan Pembagian Pendapatan

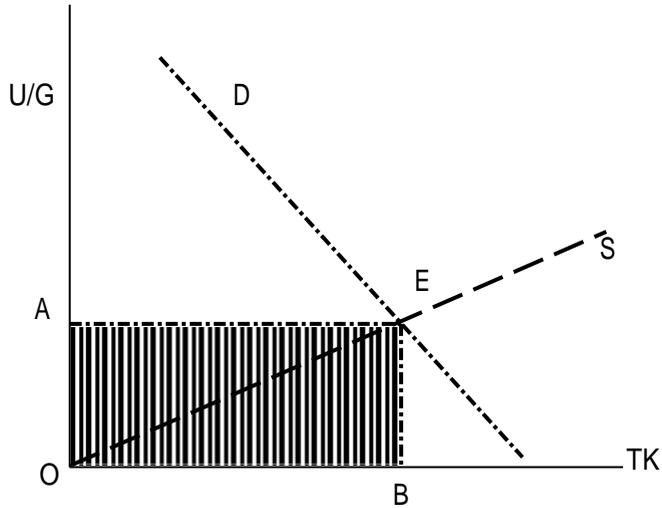
Pada kesempatan kerja menjelaskan besarnya kesediaan rumah tangga perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Besarnya kesediaan ini dapat diukur dengan jumlah orang, atau jumlah jam. Bila tolok ukur ini dianggap terlampau "kasar". Maka untuk mempertajam hitungan bisa digunakan tolok ukur yang lain. Yakni intensitas pekerjaan. Bila perhitungan ini masih juga dianggap pendapatan yang diperoleh dengan pendidikan atau kualitas tenaga kerja yang bersangkutan. Bisa dikatakan juga sesuai dan

tidaknya kualifikasi tenaga kerja dengan pekerjaannya (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

Di samping pendapatan (tingkat upah / gaji), bentuk kurve indifferensi sangat mempengaruhi bentuk kurve penawaran tenaga kerja. Bentuk kurve indifferensi mencerminkan kesediaan untuk bekerja yang dipengaruhi oleh pendidikan, keadaan pengangguran yang ada, sektor perekonomian, harta kekayaan yang dimiliki, dan sebagainya (Sudarsono, 1996).



Grafik : Perusahaan



Grafik : Industri

Keterangan : U/G = upah/gaji

TK = jumlah tenaga kerja

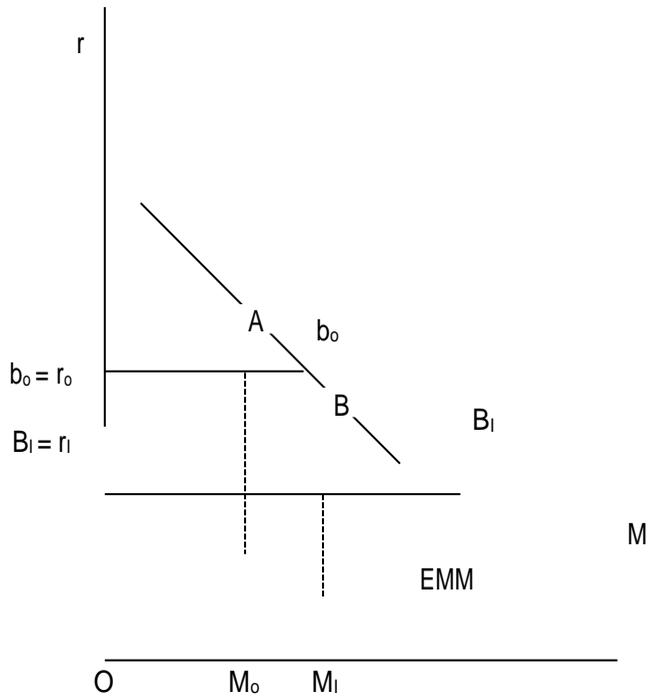
Pada grafik tengah menngambarkan kurve-kurve permintaan dan penawaran tenaga kerja yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Perusahaan ini bertindak sebagai pengikut harga. Tingkat upah/gaji yang ditentukan di pasar harus diikuti sebagai tarif yang berlaku (*going-rate*). Karena banyaknya pencari kerja, perusahaan selalu berhasil mendapatkan tenaga kerja yang dikehendaki pada tingkat upah yang berlaku. Meskipun perusahaan mampu, perimbangan

ekonomis telah mendorong perusahaan untuk membayar pada tingkat OA saja, seperti tertera pada gambar bawah. Kuantitas tenaga kerja yang diperkirakan akan dipergunakan oleh industri sebesar OB (Grafik bawah) dan oleh perusahaan tertentu tersebut adalah OT (Grafik tengah). Pembagian pendapatan nasional yang diberikan kepada tenaga kerja adalah sebesar OAEB (Grafik bawah). Jumlah biaya upah/gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya adalah OAPT (Grafik tengah). Sebab titik P dan titik E merupakan titik optimal bagi perusahaan dan industri (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

2. Penentuan Harga Faktor Produksi Modal

a. Penawaran Modal

Indeks rehabilitas ini disebut pula dengan efisiensi marginal dari modal (*MEC, Marginal Efficiency of Capital*) atau EMM. Perilaku dari indeks r ini diringkas dalam Grafik berikut ini :



Grafik : Titik Optimal Penggunaan Faktor Modal

Titik optimal pengusaha tercapai pada saat $b = r$, yang sejalan dengan $BM = RM$ dalam penggunaan modal. Pada saat tingkat bunga yang berlaku adalah i_0 , kuantitas modal yang diminta modal adalah OM_0 , dimana b_0 , kuantitas modal yang diminta OM_1 , dimana $b_1 = r_1$. Bila $r > b$, investasi perlu ditambah karena belum mencapai

titik optimal. Sebaliknya bila $r < b$, investasi perlu dikurangi karena bukan merupakan jumlah yang optimal pula (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

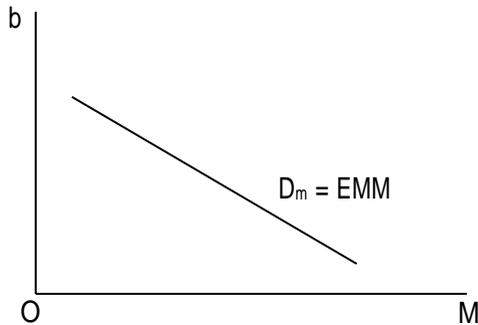
b. Permintaan Modal

Fungsi permintaan modal dapat diringkas menjadi:

$$D_m = f(b)$$

Di mana $\frac{\partial D_m}{\partial b} < 0$ modal menunjukkan bahwa lerengannya menurun.

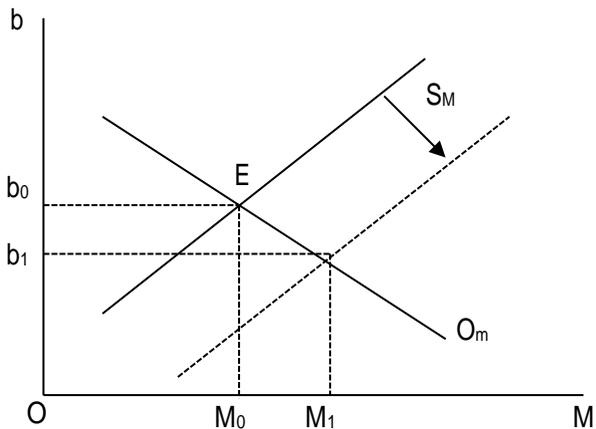
Dengan ketentuan tersebut dapat dilukiskan fungsi permintaan akan modal seperti terlihat pada Grafik berikut :



Grafik : Permintaan Akan Modal

Apabila Grafik fungsi permintaan modal digabungkan dengan Grafik fungsi penawaran modal, maka akan diperoleh grafik baru yang

mencerminkan terjadinya keseimbangan pasar modal. Keseimbangan ini terjadi pada titik E dalam grafik berikut ini :



Grafik : Keseimbangan Pasar Modal

Titik keseimbangan E terjadi pada saat kuantitas modal yang diminta sama dengan kuantitas modal yang ditawarkan (OM_0) pada tingkat bunga yang disetujui oleh kedua belah pihak (b_0) (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

Daftar Pustaka

- Harmadi SHB (2012): Teori Ekonomi Mikro. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hartono, D Faunah & Winarti FX (1985); Pengantar Ilmu Ekonomi, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Karseno AR, 2010; Statistika Ekonomi II; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Lipsev RG & PO Steiner (1984); *Economics*, Harper & Row Publisher Inc. Diterjemahkan oleh Anas Sidik, dengan judul: Pengantar Ilmu Ekonomi, Bina Aksara, Jakarta.
- Mansoer FW (2010); Pengantar Ekonomi Mikro, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Reksohadiprodjo S, 2007; Peramalan Usaha; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Samuelson PA, (?); Economics, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Media Sains Indonesia, Bandung.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- SastroAtmodjo S, 2021; Teori Mikroekonomi. Pustaka Learning Center, Malang.

- Soelistyo & Insukindro (1995); Teori Ekonomi Makro I, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudarsono (1996): Pengantar Ekonomi Mikro, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudarsono, W Usman & Boediono (?); Pengantar Ekonomi Mikro. Penerbit Karunika Jakarta Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudarman A (2000); Pengantar Ekonomi Mikro, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudjana, 1991; Statistik: Untuk Ekonomi dan Niaga; Penerbit "Tarsito", Bandung.
- Sukirno S (2005): Mikro Ekonomi. Rajawali Press, Jakarta.

Tentang Penulis

SRI JUMINAWATI, SE., MM., C.LA_ALC., C.ME

PERSONAL PROFILE

Name : Sri Juminawati, SE., MM., C.LA_ALC., C.ME
Current Address : Perum. Griya Katulampa Blok C. III No. 21, Bogor
Place/Date of Birth : Jakarta, September 25 1964
Sex : Female
Religion : Islam
Marital Status : Married
Citizenship : Indonesian
Hobbies : Sport, Music, Travelling
Telephone No. : +62 812-8488-4334 +62 821-2291-0725

WORK BACKGROUND

AMPD / FUNDING MANAGER
BRI, 2017-2020
FUNDING OFFICER BRANCH OFFICE
BRI, 2011-2020
SUPERVISOR BRANCH OFFICE
KEP. BANANANGSIHAR ROSOK, 2009-2010
SUPERVISOR BRANCH OFFICE
KEP. SUDIRMAN ROSOK, 2008-2009
CREDIT ADMINISTRATION BRANCH OFFICE
BRI BOGOR PAJAJARAN, 2007-2008
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
UNIVERSITAS IBNU KHALIDUN, 2007
OPERATIONAL BRANCH OFFICE
BRI BOGOR DEWI SANTIKA, 2006-2007
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
S7E BINA WAGA BOGOR, 2007
PRINC. CONSUMER BANKING
BRI HEAD OFFICE JAKARTA, 1993-2006
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
UNIVERSITAS PRAMITA JAKARTA, 2005
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
UNIVERSITAS WIRASWASTA INDONESIA JAKARTA, 1995
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
STIE SETIA BUDI JAKARTA, 1995
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
STIE SWADAYA JAKARTA, 1998
MARKETING RETAIL BANKING
BRI HEAD OFFICE JAKARTA, 1996-1998
OPERATIONAL DESK, CARD CENTER
BRI HEAD OFFICE JAKARTA, 1994-1995
COUNTERPART CITIBANK CONSULTANT
BRI HEAD OFFICE JAKARTA, 1989-1993
LOAN & FUND OFFICER
BRI UNIT KOTA JAKARTA, 1988-1989
STAFF OFFICER MARKETING
PT. MUTIACIA INDONESIA, 1987-1988
EXEC. SECRETARY - ELIDA SIGDS MARKETING
PT. UNIVIRK-INDONESIA, 1985-1987
TYPIST - RESEARCH
BUREAU INDONESIA, 1984-1985



CORE SKILLS

Microsoft Access
Basic Computer Hardware
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Mentor C.LA-ALC (Leadership)
Mentor CME (Marketing)
Mentor Praktisi Perbankan
Coach Wiranesia (Wirasaha)

CAREER HIGHLIGHTS

- Reward Recognition IMP BRI 2017
- Pemenang Racing BRITAMA 2017
Kategori AMPD

EDUCATION BACKGROUND

COMPLETING DOCTORAL DISSERTATION (S3)
SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIVERSITY
JAKARTA,
2019-PRESENT
MAGISTER MANAGEMENT DEGREE (S2)
LABORA GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT JAKARTA,
1999-2001
GRADUATE BANKING STIE SWADAYA (S1), 1996-1998
GRADUATE BANKING ACADEMY (D3), 1986-1988

CONTACT DETAILS:

+62 81284884334
+62 82122910725

srijuminawati@gmail.com

Perum. Griya Katulampa
Blok C. III No. 21
Bogor - Jawa Barat

BAB

3

PENGELOLAAN DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Ir. HM. Bambang Libriantono, S.Kom., M.M., IPM.

Membangun perusahaan merupakan impian dari semua orang yang ingin menambah asset yang dimilikinya, banyak usaha-usaha yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam menyiapkannya, dari perencanaan hingga realisasi terbentuknya suatu perusahaan, bukan hanya sampai terbentuknya saja, tapi juga harus dipikirkan bagaimana perusahaan itu dapat bertahan dan berkembang serta berkelanjutan, dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik, serta kreatif dan inovatif dalam proses jalannya perusahaan. Pengetahuan tentang pengelolaan perusahaan dengan menambah wawasan dibutuhkan dalam menciptakan hasil usaha yang baik. Perusahaan merupakan tempat dimana disana terjadi kegiatan/aktivitas yang melibatkan usaha-usaha produksi, baik barang maupun jasa, serta semua faktor-faktor produksi yang ada. Kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan tentunya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dapat dilaksanakan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi yaitu sumber

daya yang dimilikinya yaitu: alam, teknologi, manusia, dan modal.

A. Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi

lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004. (sumber: Wikipedia)

B. Perusahaan Menurut Undang-Undang RI

Menurut UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Jadi bila ada sebuah organisasi yang yang bertujuan menghasilkan laba dan dilakukan secara terus menerus di Negara Indonesia, maka organisasi tersebut disebut badan usaha. Ini bisa dalam bentuk CV, perusahaan, firma dan sebagainya. Menurut M. Polak, sebuah perusahaan dikatakan ada apabila di dalamnya ada

perhitungan tentang laba dan rugi yang dicatat di dalam pembukuan. Disamping itu, istilah ini mengacu pada sebuah tempat yang menjadi pusat kegiatan produksi dan faktornya. Ada perusahaan yang didaftarkan pada pemerintah dan ada pula yang tidak. Jika terdaftar di pemerintah, mereka artinya memiliki badan usaha dan badan usaha ini merupakan status yang terdaftar di perusahaan secara resmi. Di Indonesia sendiri, ada 14 macam bentuk perusahaan yang bisa kita pelajari, antara lain:

- Commanditaire Vennootschap-limited partnership
- Koperasi
- Firma (FA)
- Maatschap
- Persekutuan Komanditer (Limited Partnership)
- Penamaan Modal Asing
- Penanaman Modal Dalam Negeri
- Persekutuan Pedata
- Perusahaan Umum
- Perusahaan Jawatan
- Perseroan Terbatas
- Perseroan Terbuka (P.T. Tbk)
- Usaha Dagang
- Yayasan

C. Unsur-unsur Perusahaan

Beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan atau *company* adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha, setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contoh: Usaha dagang, CV, PT, Koperasi, dan lain-lain.
2. Kegiatan di Bidang Ekonomi, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan.
3. Terus-menerus, artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terus menerus dan bukan kegiatan insidental.
4. Bersifat Tetap, kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang.
5. Diketahui Publik, artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh undang-undang Republik Indonesia.
6. Mendapatkan Laba, tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha.
7. Pembukuan, sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha.

D. **Bentuk Perusahaan di Indonesia**

Perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dan bertujuan menghasilkan barang/jasa. Berikut ini merupakan beberapa bentuk perusahaan di Indonesia:

1. **Perusahaan Berbadan Hukum**

Perusahaan ini bisa dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha baik swasta atau negara yang sudah memiliki syarat-syarat hukum.

Adapun contoh perusahaan berbadan hukum di antaranya:

- PT (Perseroan Terbatas)
- PT. Tbk. (Perseroan Terbatas, Terbuka)
- Perusahaan Perseroan (Persero)
- Koperasi (Co-operative)
- Perusahaan Umum

2. **Perusahaan yang Bukan Berdasarkan Badan Hukum**

Jenis perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang dimiliki dan didirikan oleh beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama.

Mereka bisa menjalankan berbagai bidang perekonomian seperti perdagangan, perjasaaan dan

perindustrian. Perusahaan ini dimiliki oleh swasta, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan.

Berikut ini beberapa contoh perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum:

- Perusahaan perseorangan
- Firma (FA)
- Commanditaire Vennootschap (CV)
- Persekutuan Perdata
- Yayasan – Foundation

3. Perusahaan Multinasional

Ketika sebuah bisnis sudah menyentuh ranah nasional dan berhasil tumbuh sukses, pengertian perusahaan akan lebih berkembang dan bisa berubah menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan ini akan tumbuh dan mendapatkan posisi yang kuat dan kebanyakan bisa bersing di era globalisasi.

Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan bisa tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah terlengkapinya unsur-unsur perusahaan sesuai dengan jabaran pengertian perusahaan di atas, antara lain:

- Kegiatan dalam bidang ekonomi
- Memiliki badan usaha

- Bersifat konsisten
- Terang-terangan
- Memiliki keuntungan atau laba
- Ada pembukuan

E. Jenis-jenis Perusahaan Secara Umum

Perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, antara lain:

1. Perusahaan Berdasarkan Lapangan Usaha

- **Perusahaan Ekstratif**, yaitu perusahaan yang fokus di bidang pemanfaatan kekayaan alam, mulai dari penggalian, pengambilan dan pengolahan kekayaan alam yang tersedia. Misalnya: tambang batu bara.
- **Perusahaan Agraris**, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang. Misalnya perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, dan lainnya.
- **Perusahaan Industri**, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk siap jual. Bisa juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang.

- **Perusahaan Perdagangan**, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi. Misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lainnya.
- **Perusahaan Jasa**, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan. Misalnya jasa perbankan, asuransi, perhotelan, pembiayaan, dan lainnya.

2. Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan

- **Perusahaan Milik Negara**, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara. Informasi selengkapnya bisa dibaca pada artikel tentang pengertian BUMN.
- **Koperasi**, yakni perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya.
- **Perusahaan swasta**, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh sekelompok orang luar (di luar negara).

F. Manajemen Perusahaan (*Company Management*)

Beberapa referensi manajemen perusahaan menurut para ahli :

1. George R Terry (1997)

Menurut GR. Terry, manajemen perusahaan adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari perencanaan (*planning*), penyusunan (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dimana dilakukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan dengan melibatkan manusia dan sumber daya lainnya.

2. Harold Koontz

Menurut Koontz, manajemen perusahaan adalah suatu seni yang produktif yang didasarkan pada sebuah pemahaman ilmu dimana ilmu dan seni tersebut tidak bertentangan, namun saling melengkapi.

3. Wilson Bangun

Menurut Wilson Bangun, manajemen perusahaan adalah serangkaian tindakan dan upaya anggota perusahaan untuk mencapai sasaran atau target bisnis yang diaungi perusahaan tersebut dimana proses tersebut dicapai melalui aktivitas yang sistematis.

4. James A.F. Stoner

Menurut Stoner, manajemen perusahaan adalah proses dalam membuat suatu perencanaan, penyusunan, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota entitas atau organisasi dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Lawrance A.Appley

Menurut L.A. Appley Manajemen Perusahaan adalah sebuah seni untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dan dilaksanakan dengan usaha orang lain.

6. Mary Parker Follet

Menurut Mary Parker Follet Manajemen didalam perusahaan adalah suatu seni, tiap-tiap pekerjaan dapat dikerjakan/diselesaikan dengan bantuan orang lain.

Dari kepakaran yang ada, diperoleh suatu kesimpulan bahwa pengelolaan perusahaan dibutuhkan manajemen yang baik baik berupa konsep manajemen perusahaan maupun penggunaan sumber daya yang ada termasuk unsur manusianya.

Dalam sebuah perusahaan terdapat beberapa fungsi manajemen perusahaan yang penting diantaranya seperti :

1. Memimpin (*Leading*).

Seorang manajer perusahaan bertindak sebagai pemimpin agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Adapun beberapa tugas manajer perusahaan, yaitu :

- Mengambil keputusan.
- Melakukan komunikasi
- Memberi motivasi
- Menentukan sumber daya manusia untuk masuk divisi tertentu
- Mengembangkan SDM melalui penilaian terhadap hasil kinerja dengan memberikan saran ataupun promosi.

2. Merencanakan (*Planning*)

Manajemen didalam perusahaan berfungsi sebagai perncana kegiatan dan aktivitas seperti apa yang akan dilakukan anggota perusahaan, yang meliputi :

- Menentukan jenis kegiatan
- Menetaokan waktu pelaksanaan kegiatan
- Membuat target atau sasaran setiap kegoatan

- Mengatur jadwal (*scheduling*)
- Mengendalikan biaya agar tidak *overbudget*.
- Membuat standar operasional prosedur dari setiap kegiatan

Fungsi ini sangat penting karena tanpa adanya manajeme yang baik perusahaan akan sulit bergerak sesuai tujuannya.

3. Menyusun (*Organizing*)

Manajemen perusahaan dapat berperan sebagai pengatur dan penghubung antar divisi pekerjaan sehingga pelaksanaan setiap tanggungjawab lebih efisien dan efektif, seperti :

- Membuat disain struktur organisasi
- Menentukan dikripsi pekerjaan
- Mendelegasikan tanggung jawab
- Menetapkan hubungan yang membedakan antara atasan dan staff
- Mendeskripsikan setiap hal yang berkaitan dengan pemanfaat sumber daya manusia

4. Pengawasan (*Controlling*)

Setiap kegiatan dan tanggung jawab masing-masing divisi di dalam perusahaan perlu dilakukan

pengawasan guna pengendalian, jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan dari suatu divisi.

Manajer perusahaan berkewajiban untuk mengarahkan, memberi saran dan menentukan pengambilan keputusan, seperti apa yang harus diambil jika terjadi penyimpangan.

Kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamatan meliputi :

- Perkembangan pekerjaan
- Pengukuran hasil pekerjaan
- Melakukan tindakan koreksi dan perbaikan terhadap kesalahan

G. Tingkatan Manajemen dalam Perusahaan

Secara umum, level atau tingkatan manajemen dalam perusahaan terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. ***TOP MANAGEMENT (MANAJEMEN PUNCAK)***
2. ***MIDDLE MANAGEMENT (MANAJEMEN MENENGAH)***
3. ***FIRST-LINE MANAGEMENT (MANAJEMEN LINI)***



Sumber Gambar: Harmony Blog

1. TINGKAT *TOP MANAGEMENT* (Manajemen Puncak)

Dalam level ini manajemen puncak terdiri dari para eksekutif atau pejabat perusahaan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan.

Para pejabat pada level ini bertugas untuk memimpin dan mengatur perusahaan agar berjalan sesuai tujuannya, antar lain COO (*Chief Operating Officer*), CFO (*Chief Financial Officer*), CEO (*Chief Executive Officer*), Direktur, dan sebagainya. Pejabat yang berada di level ini, memegang kendali dan wewenang penuh atas perusahaan. Tugas dalam prinsip manajemen puncak yang dijalankan meliputi :

- a. Merumuskan tujuan perusahaan dalam jangka waktu pendek, menengah maupun panjang.
- b. Merancang kerangka dan kebijakan agar dapat mencapai tujuan perusahaan
- c. Mengatur dan mengelola pekerjaan yang dijalankan manajerial ditingkat manajemen menengah.
- d. Mengelola sumber daya perusahaan seperti asset yang dimiliki seperti: asset tetap, tenaga kerja, keuangan, dll.
- e. Berupaya agar perusahaan terus berkembang dan berkelanjutan.
- f. Menjadi perantara perusahaan dengan pihak eksternal seperti: pemerintahan, media, supplier, dll.

2. **TINGKAT *MIDDEL MANAGEMENT*** (Manajemen menengah)

Ditingkat manajemen ini, manajemen menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai etika profesinya, seperti : General Manager, Region Manager, Divison Manager, dsb.

Tingkat Manajerial menengah memiliki tanggung jawab langsung pada atasannya ditingkat manajemen puncak, sehingga sebagian besar berfungsi juga menjalankan kebijakan atau rencana

yang sudah ditentukan oleh pejabat ditingkat manajemen puncak. Tugas yang dijalankan oleh manajemen menengah antara lain :

- a. Menjelaskan kebijakan dari tingkat manajemen puncak kepada para pegawai atau tingkat dibawahnya (sebagai penghubung antara tingkat puncak dan tingkat pertama)
- b. Mengatur dan mengelola kegiatan sesuai kebijakan yang ditentukan perusahaan
- c. Memberikan dukungan agar pegawai memberikan kemampuan terbaik, termasuk menawarkan tunjangan, insentif, atau bonus agar karyawan mempunyai motivasi dan semangat kerja yang baik.
- d. Melakukan proses rekrutman sesuai kebutuhan perusahaan pada unit kerja yang ditentukan.
- e. Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja kerja di departemennya.
- f. Menjalankan rencana dan kebijakan tingkat manajemen puncak.

3. TINGKAT *FIRST LEVEL MANAGEMENT* (Manajemen tingkat pertama).

Ditingkat manajemen pertama selain menjalankan wewenang sesuai prinsip manajemen juga mengawasi, dan mengatur kegiatan operasional

perusahaan sehari-hari. Termasuk memantau karyaawn untuk memproduksi barang dll. Posisi tingkat pertama seperti : Mandor, Supervisor, Departemen manajer, *section manager*, dan *superintendent*. Tugas yang dijalankan oleh manajemen tingkat pertama antara lain :

- a. Memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah.
- b. Menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan.
- c. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat and aman untuk para karyawan operasional.
- d. Membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai untuk jabatan yang dibutuhkan.
- e. Berkomunikasi dengan karyawan dan mendengarkan saran-saran karyawan serta mendorong para pekerja untuk mengambil inisiatif.
- f. Menjaga dan mempertahankan standar kualitas dan memastikan jumlah output produk/layanan sesuai dengan perencanaan.
- g. Bertanggung jawab untuk meningkatkan moral karyawan dan membangkitkan semangat kerja dalam tim.

- h. Meminimalkan pemborosan sumber daya organisasi/perusahaan.

H. Tugas Manajemen Perusahaan

Tugas dan tanggungjawab dari manajemen perusahaan diwujudkan melalui sistem atau divisi/ bagian atau disebut juga departemen yang bertingkat yaitu :

1. *Human Research*, divisi ini bertugas sebagai penilai yang memberikan saran dan wawasan terhadap sumber daya yang biasanya dipimpin oleh seorang HRD.
2. *Credit Risk*, divisi ini yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memberi pengawasan terhadap asset perusahaan serta memegang informasi lengkap yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan.
3. *Corporate Treasury*, bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan perusahaan, divisi ini bekerja sama dengan bagian finance dalam hal pengelolaan kas perusahaan untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan dalam keadaan sehat.
4. *Compliance*, divisi yang bertindak untuk mengidentifikasi dan memberi bimbingan terhadap pelanggaran aturan serta mendisain aturan yang efektif untuk mendukung komitmen perusahaan

5. *Firm Risk Management*, divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan manajemen risiko, beberapa proses yang dilakukan dalam pengelolaan resiko, yaitu: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi atau mengurutkan risiko, mengatasi risiko, memantau dan meninjau risiko.
6. *Firm strategy and execution*, bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab untuk membantu dalam pengambilan keputusan.
7. *Finance Division*, bagian dari perusahaan yang membuat dan melaporkan catatan keuangan perusahaan kepada pimpinan.
8. *Internal Audit*, bagian ini bertugas memberikan tinjauan independen dari kualitas pengendalian internal, manajemen risiko dan sistem tata kelola proses perusahaan.
9. *Market Risk*, bagian ini bertugas mengelola semua *exposure* risiko pasar dalam kegiatan bisnis perusahaan, dalam hal ini adalah objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksi benar-benar terjadi.
10. *Operational Risk*, bagian ini merupakan bagian dari perusahaan yang bekerja sama dengan unit bisnis dan kelompok control untuk membantu memastikan perusahaan memiliki program yang transparan.

I. Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Perusahaan

Perusahaan membutuhkan sebuah sistem dan metode untuk mengatur jalannya operasional dan memastikan bahwa operasional berjalan dengan baik. Manajemen menjadi metode untuk operasional tersebut dan tak terpisahkan dalam perusahaan. Ruang lingkup manajemen perusahaan mencakup pengelolaan, koordinasi, dan mengawasi segala operasional yang ada. Operasional perusahaan tak akan berjalan mulus tanpa manajemen yang baik.

Untuk dapat mewujudkan manajemen perusahaan yang maksimal dan berkembang pesat dapat dibantu oleh suatu aplikasi komputer dalam pengolahan data yang ada. Data dan Informasi secara besar (*Big Data*) mengenai perusahaan dan berbagai komponen lainnya, dapat disajikan secara sistematis, efektif dan efisien. Sebagai contoh dari data perusahaan adalah identitas hirarki struktur organisasi, lokasi, tingkat jabatan, unit jabatan, jobdeskripsi untuk tiap posisi dan lainnya yang ada kaitannya dengan organisasi perusahaan. Aplikasi dapat diciptakan untuk membantu pengelolaan data dan informasi, ditambah menggunakan *Cloud based server* yang memadai dalam penyimpanan, sehingga memungkinkan perusahaan mengakses data dan informasi dimana dan kapan saja, saat membutuhkan dan tidak bergantung pada jenis spesifikasi perangkat keras khusus.

Daftar Pustaka

Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A; Manajemen Perusahaan;
Pustaka Setia; Solo; 2014

Priyono; Pengantar Manajemen; Zifatama Publisher;
Sidoarjo; 2007.

Wikipedia Indonesia Kamus.

Tentang Penulis



Ir. HM. Bambang Libriantono, S.Kom., M.M., IPM. Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1963, menyelesaikan pendidikan Sarjana Komputer pada tahun 1989, dan Paska Sarjana (M.M.) di Universitas Mercu Buana pada tahun 2010. Karier di dunia Industri selama 14 tahun dimulai pada tahun 1989 yaitu 10 Tahun di Astra Mobil Group (PT.IPPI), 2 Tahun di PT. Indorama Synthetics, Tbk, 2 Tahun di Group Toshiba. Sejak tahun 2002 hijrah ke dunia pendidikan, adapun karir dipendidikkan dimulai dari mengajar di Akademi Pariwisata Indonesia (AKPINDO), AMIK Wahana Mandiri, STIKOM Poltek-Cirebon, Politeknik Indramayu, STT Telematika, STT-NIIT- ITech, STT-Telematika, STIH Dharma Andigha, STMIK Triguna Utama, STMIK Swadharma, ITBSwadharma, Universitas Tangerang Raya, Tutor dan Korektor Universitas Terbuka. Saat ini aktif di Organisasi Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Menulis buku bahan ajar untuk materi Komputer dan Manajemen untuk konsumsi mahasiswa yang diampu.

BAB

4

INVESTASI, KOMSUMSI, TABUNGAN, KESEIMBANGAN

Dr. Sabil, SE, MM

Dosen Universitas Bina Sarana Informatika,
Fakultas Ekonomi & Bisnis Prodi Manajemen

A. Konsep Dasar Investasi

Investasi sebagai pengeluaran- pengeluaran untuk membeli beberapa barang modal dan peralatan- peralatan produksi dengan tujuan guna mengubah dan terutama menambah beberapa barang modal dalam perekonomian yang hendak digunakan untuk memproduksi barang serta servis di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan guna meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian (Sukirno Sadono, 2013) Investasi mencakup penambahan persediaan modal ataupun barang disuatu negeri, semacam bangunan peralatan produksi, serta beberapa barang inventaris dalam masa satu tahun. Investasi ialah langkah mengorbankan konsumsi di masa mendatang (Samuelson, 2004) Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh

pelaku aktivitas ekonomi guna pembelian atau peningkatan barang modal. Barang modal merupakan barang-barang yang melalui cara produksi lebih lanjut guna menjadi barang jadi ataupun barang yang siap untuk dikonsumsi.

Investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran yang meningkatkan stok modal (capital stock). Yang dimaksud dengan stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian, pada satu saat tertentu. Untuk mempermudah penghitungan, umumnya stok barang modal yang dinilai dengan uang, yaitu jumlah barang modal yang dikalikan harga perolehan per unit barang modal. (Rahardja & Mandala Manurung, 2001) Dengan begitu barang modal ialah teori persediaan(rancangan persediaan), karna besarnya dihitung pada satu rentang waktu tertentu Supaya tidak terjadi ketidak sesuaiaan dengan realitas tiap hari, perhitungan harus konsisten dengan perhitungan nasional. Yang dimasukkan dalam perhitungan investasi adalah barang modal, bangunan/konstruksi, maupun persediaan barang jadi yang masih baru. Seperti seorang pengusaha membeli pabrik dan bangunan yang dipakai orang lain, kegiatan tersebut tidak dapat dihitung sebagai investasi, karena kegiatan tersebut tidak menambah stok barang modal yang baru. Investasi merupakan konsep aliran (flow concept), karena besarnya dihitung selama satu interval periode tertentu. Tetapi investasi akan mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia (modal saham) pada satu periode tertentu. Tambahan

stok barang modal adalah pengeluaran investasi satu periode sebelumnya.

1. Investasi Dalam Bentuk Barang Modal dan Bangunan

Yang mencakup dalam investasi barang modal(capital goods) serta bangunan(arsitektur) merupakan pengeluaran- pengeluaran guna pembelian pabrik- pabrik, mesin- mesin, peralatan- per- alatan produksi serta bangunan- bangunan ataupun gedung- gedung yang terkini. Sebab daya tahan barang modal serta bangunan biasanya lebih dari satu tahun, sering kali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap(investasi tetap).

2. Investasi Persediaan

Berdasarkan berbagai pertimbangan Perusahaan harus sering kali memproduksi lebih banyak dari pada target penjualan. Misalkan sebuah pabrik sepeda motor menargetkan penjualan pada tahun 2021 sebanyak 100.000 unit, hal ini bukan berarti hanya memproduksi sesuai dengan rencana target penjualan akan tetapi bisa lebih banyak dari rencana penjualan misalkan 120.000 unit, selisih 20.000 unit ini merupakan persediaan, persediaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan perusahaan. Persediaan sebesar 20.000 ini merupakan investasi yang direncanakan atau investasi yang diinginkan (intended aniestment). Sebab, memang

sudah direncanakan nejak awal. seperti karena suatu hal (misalnya terjadi resesi ekonomi) jumlah mobil yang terjual 95.000 unit, maka persediaan motor menjadi 25.000 unit, lebih besar dari yang direncanakan. Jumlah motor yang tidak terjual rencana sesuali (20.000 unit) investasi yang direncanakan (investasi yang tidak direncanakan). Selain barang jadi, investasi dalam bentuk persediaan bisa juga dilakukan dalam bentuk persediaan bahan baku dan barang setengah jadi/sedang dalam proses penyelesaian. Tujuan persediaan ini juga tetap dalam konteks mening-katkan pendapatan atau keuntungan di masa mendatang.

3. Kriteria Investasi

a. *Paybeck Period*

Paybck period(kurun waktu pulang pokok) ialah periode yang diperlukan agar investasi yang direncanakan bisa dikembalikan, ataupun periode yang diperlukan guna mencapai titik impas. Bila periode yang diinginkan kian pendek, proposal investasi dianggap kian baik.

Rumus :

$$\text{Payback Period} : \frac{\text{Nilai Investasi}}{\text{Kas Masuk Bersih}} \times 1 \text{ Tahun}$$

Indikator Payback Periods :

Semakin cepat kemampuan proyek dapat mengembalikan biaya- biaya yang sudah dikeluarkan dalam investasi proyek maka proyek semakin positif(unit waktu).

b. Gross Benefit Cost Ratio(Gross B atau C)

B/C Ratio mengukur mana yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan dibandingkan hasil(output) yang didapat. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan sebagai C (cost).

Output yang diperoleh dinotasikan sebagai B (benefit). Jika nilai B/C sama dengan 1, maka B = C, output yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan.

Bila nilai B/C < 1 maka B < C yang artinya output yang dihasilkan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya.

Rumus :

$$Gross\ B / C = \frac{\sum_{t=0}^t PV(B)}{\sum_{t=0}^t PV(C)}$$

Indikator Gross B/C :

Bila Gross B/C > 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan

Bila $Gross\ B/C < 1$, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan

c. *Net Present Value (NPV)*

Dua tolok ukur pokok kesatu bisa dihitung berlandaskan nominal(non disconuted method). Sayangnya, perhitungan dengan menggunakan angka nominal bisa menyesatkan, karena tidak memperkirakan nilai waktu uang.

Dapat saja suatu usulan proyek, bersumber pada nilai nominal menghasilkan $B/ C > 1$, padahal nilai angka saat ini di diskonto(discounted method) seperti diuraikan sebelumnya.

Manfaat lain dengan memakai metode diskonto ialah kita bisa langsung menghitung selisih angka saat ini dari biaya keseluruhan dengan pendapatan total bersih

Rumus :

$$NPV = \sum_{t=0}^{t=n} \frac{B_t - C_t}{(1 + i)^t}$$

Indikator NPV :

Bila $NPV > 0$ (positif), maka proyek layak untuk dilaksanakan

Bila $NVP < 0$ (negatif), maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan.

d. *Internal Rate of Return (IRR)*

Merupakan tingkat pengembalian internal adalah kemampuan sesuatu proyek menciptakan return(satuannya%). IRR ini ialah tingkat discount rate yang membuat NPV proyek= 0.

Tujuan perhitungan IRR ialah guna mengetahui persentase manfaat dari suatu proyek setiap tahun. Tidak hanya itu, IRR juga merupakan alat ukur kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman

Pada dasarnya IRR memperlihatkan tingkat bunga yang menghasilkan NPV serupa dengan Nol. Dengan begitu guna mencari IRR kita wajib menambah discount factor(DF) sehingga tercapai angka NPV serupa dengan nol.

Rumus :

$$IRR = I_1 + \frac{NPV^{(+)}}{NPV^{(+)} - NPV^{(-)}} (I_2 - I_1)$$

Keterangan :

i1 = Discount Factor(tingkat bunga) pertama di mana didapat NPV positif.

i2 = Discount Factor(tingkat bunga) pertama di mana didapat NPV negative

Indikator IRR :

Bila $IRR > tk$, discount rate yg berlaku maka proyek layak(go) untuk dilaksanakan

Bila $IRR < tk$, discount rate yg berlaku maka proyek layak(go) untuk dilaksanakan

e. Net Benefit Cost Rasio (Benefit B/C)

Net B/C ialah perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Net B/C ini membuktikan cerminan berapa kali lipat faedah(benefit) yang didapat dari biaya (cost) yang dikeluarkan.

Bila net B atau $C > 1$, maka proyek atau gagasan usaha yang hendak dibangun patut untuk dilaksanakan. Begitu pula kebalikannya, bila net $B/C < 1$, hingga proyek ataupun gagasan usaha yang hendak dilaksanakan tidak layak untuk dijalankan

. Rumus :

$$NetB / C = \frac{NPV^{(+)}}{NPV^{(-)}}$$

Indikator NET B/C adalah :

Bila $Net\ B/C > 1$, maka proyek layak (go) untuk dilaksanakan

Bila $Net\ B/C < 1$, maka proyek tidak layak (not go) untuk dilaksanakan.

B. Konsumsi

Konsumsi dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu kegiatan ini pula untuk memenuhi keinginan baik individu atau bersama-sama. Orang yang melaksanakan aktivitas konsumsi dapat disebut sebagai seseorang konsumen. Mengonsumsi mempunyai tujuan penting yang ingin didapat manusia, ialah guna penuhi kebutuhan hidup dan kebahagiaan. Biasanya, kegiatan mengonsumsi dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk masyarakat konvensional, sebaliknya bagi masyarakat modern aktivitas mengonsumsi dilakukan guna mempertahankan hidup serta untuk mendapatkan kesenangan. Pada masyarakat yang masih tradisional, biasanya aktivitas mengonsumsi merupakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sebaliknya pada masyarakat modern, aktivitas mengonsumsi mereka bukan cuma untuk menjaga hidup, tetapi pula untuk kebahagiaan.

1. Pengertian Komsumsi

Pengertian Konsumsi adalah titik dasar serta tujuan akhir dari semua aktivitas ekonomi masyarakat (T. Gilarso, 2003)

Pengertian mengkonsumsi merupakan pembelanjaan barang dan pelayanan oleh rumah tangga. Yang diartikan dengan barang yaitu barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama mencakup, perkakas, alat transportasi, serta barang yang tidak kuat lama, ilustrasinya santapan serta busana. Pembelanjaan pelayanan yang diartikan yaitu barang yang tidak berupa nyata, contohnya pembelajaran .
Menurut (Gregory Mankiw, 2007)

Konsumsi merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk penuh pembelian barang serta pelayanan guna memperoleh kebahagiaan ataupun guna memenuhi kebutuhannya. Konsumsi digolongkan menjadi dua ialah mengkonsumsi teratur serta mengkonsumsi yang karakternya sedangkan. Mengkonsumsi yang karakternya teratur mempunyai maksud selaku pengeluaran yang dilakukan guna pembelian barang ataupun pelayanan dengan cara berulang balik sepanjang bertahun-tahun. Sebaliknya maksud mengkonsumsi sifatnya sementara merupakan setiap tambahan yang karakternya tidak tersangka dalam mengkonsumsi teratur. (Samuelson, Paul A dan Nordhaus, 2001)

Pendapatan masyarakat suatu Negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yaitu digunakan untuk konsumsi dan sisanya untuk ditabung.

Dimana:

Y = Pendapatan Nasional,

C = Konsumsi,

S = Saving (tabungan)

$$Y=C+S$$

2. Fungsi Konsumsi

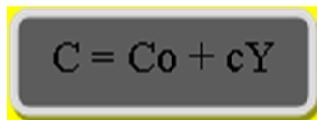
Menggambarkan sebuah fungsi yang menarangkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional yang secara umum dirumuskan sebagai berikut :

Dimana:

C_0 = Konsumsi Otonom

c = MPC (Marginal Propensity to Consume)

c = $\Delta c / \Delta Y$


$$C = C_0 + cY$$

- Konsanta Co menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada saat pendapatan nasional sebesar nol (0)
- Koefisien c (MPC) mencerminkan besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu
- ΔC menunjukkan besarnya perubahan konsumsi dan ΔY menunjukkan besarnya perubahan dalam pendapatan nasional yang mengakibatkan besarnya konsumsi.

Perhatikan: $1 > MPC > \frac{1}{2}$

Keterangan:

$MPC < 1$, menunjukkan bahwa tambahan pendapatan yang diterima seseorang tidak seluruhnya digunakan untuk menambah besarnya konsumsi, melainkan untuk saving (tabungan)
Contoh: $MPC = 0,7 < 1$

$MPC > \frac{1}{2}$ menunjukkan bahwa penggunaan tambahan pendapatan, sebagian besar digunakan untuk menambah besarnya konsumsi sedangkan sisanya yaitu yang jumlahnya lebih kecil merupakan tambahan saving (tabungan). Contoh: $MPC = 0,7 > 0,5$.
Dan $MPS = 0,3$. Karena $MPS + MPC = 1$

C. Fungsi Tabungan

Merupakan suatu fungsi yang menjelaskan hubungan antara tabungan dengan pendapatan nasional. Saving merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Maka berdasarkan pengertian itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} S &= g(Y) \\ &= S_0 + sY \end{aligned}$$

Hubungan antara fungsi tabungan dengan fungsi konsumsi adalah sebagai berikut:

Dimana:

S_0 = Saving (tabungan) otonom

s = MPS (Marginal Propensity to saving) = $\Delta s / \Delta Y$

$$\begin{aligned} Y &= C + S \\ S &= Y - C \\ S &= Y - (C_0 + cY) \\ S &= Y - C_0 - cY \\ S &= -C_0 + (1 - c)Y \end{aligned}$$

- konstanta S_0 menunjukkan besarnya tabungan nasional pada saat pendapatan Nasional sebesar nol (0)

- koefisien s (MPS) mencerminkan besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu
- Δs menunjukkan besarnya perubahan tabungan dan ΔY menunjukkan besarnya perubahan dalam pendapatan nasional yang mengakibatkan besarnya tabungan

Contoh soal: diketahui konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat pendatan sebesar nol (C_0) adalah sebesar 900 dengan marginal Propensity to Consume sebesar 0,7. Maka bentuk fungsi tabungannya.

Jawab:

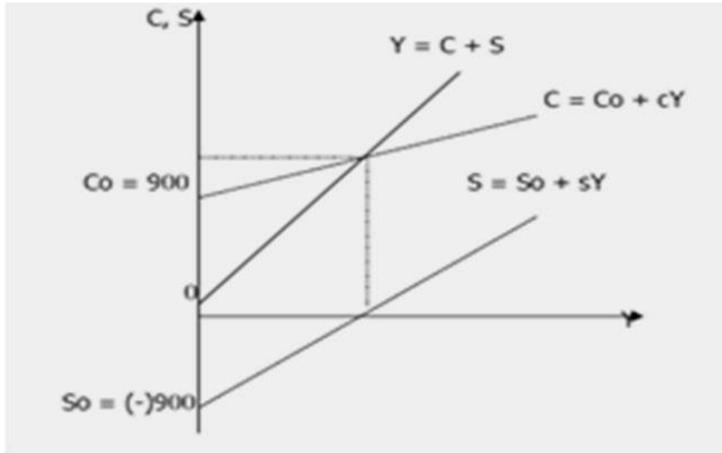
$$Y = C + S$$

$$S = Y - C$$

$$S = Y - (900 + 0,7Y)$$

$$S = -900 + (Y - 0,7Y)$$

$$S = -900 - 0,3Y$$



Gambar : 5.1

1. Pendapatan Disposable (Y_d)

Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan penjumlahan total dari pendapatan semua sektor di dalam suatu negara yang meliputi sektor rumah tangga, sektor badan usaha dan sektor pemerintah.

Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Namun didalamnya tidak termasuk pendapatan pemerintah seperti pajak, cukai dan sebagainya. Apabila Y_d menunjukkan besarnya pendapatan Disposable, T_x menunjukkan besarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah dan T_r menunjukkan besarnya transfer payment pemerintah, maka secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

T_x adalah pajak (merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable)

T_r adalah variable yang memperbesar pendapatan disposable, sebab T_r merupakan pembayaran alihan (transfer payment) yang merupakan pembayaran-pembayaran khusus dari pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya sebagai pembayaran ekstra atau tunjangan. Misalnya berupa tunjangan pensiun, tunjangan hari raya dan bonus. Itu hanya merupakan pengalihan dari pemerintah kepada masyarakat, bukan merupakan imbalan langsung atas jasa masyarakat pada pemerintah dalam tahun yang berjalan.

Sesungguhnya bukan pendapatan nasional (Y) yang merupakan variable bebas dalam persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan namun pendapatan disposable (Y_d).

$$C = C_0 + cY$$

$$S = g(Y) \\ = S_0 + sY$$

$$Y = C + S$$

Dengan demikian fungsi konsumsi dan fungsi tabungan yang sebenarnya adalah :

$$C = f(Y_d) \\ C_0 + cY_d$$

$$S = g(Y_d) \\ = S_0 + sY_d$$

$$Y_d = C + S$$

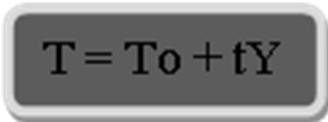
2. Fungsi Pajak

Pajak yang dikenakan pemerintah pada warga negaranya ada 2 macam. Pertama ialah pajak yang jumlahnya tertentu dan tidak dikaitkan dengan pendapatan ($T = T_0$). Kedua adalah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang besarnya merupakan persentase nilai tertentu dari pendapatan ($T = tY$). Secara keseluruhan besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah:

Dimana:

t_0 = pajak Otonom

t = proporsi pajak terhadap pendapatan


$$T = T_0 + tY$$

3. Fungsi Impor

Impor (M) suatu Negara merupakan fungsi pendapatan nasional dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar pula nilai impornya. Hubungan impor dengan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

Dimana:

M_0 = Import Otonom,

$m = \text{MPI (Marginal Propensity to Import)} = \Delta M / \Delta Y$

$$M = M_0 + mY$$

D. Pendapatan Nasional Keseimbangan

Dalam perekonomian tertutup yang belum terdapat kebijaksanaan pajak, pendapatan nasional akan meraih penyeimbang bila besarnya saving sama besarnya dengan investasi. Jika dalam perekonomian yang belum terdapat kegiatan pajak pemerintah, sumber pendapatan nasional ialah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dan pengeluaran masyarakat untuk investasi serta dalam persamaan dapat ditulis $Y = C + I$.

Tetapi dalam perekonomian dimana pemerintah ikut mengadakan transaksi pembelian serta pengeluaran pemerintah, konsumsi pemerintah, serta dalam perekonomian yang telah terdapat tindakan fiskal pemerintah, maka pendapatan nasional bisa dituliskan sebagai berikut : $Y = C + I + G$

Dari satu sisi pemerintah melaksanakan pengeluaran baik kepada masyarakat ataupun konsumsi pemerintah. Pengeluaran kepada masyarakat kerap disebut transfer pemerintah ataupun Tr serta disisi lain pemerintah melaksanakan penarikan iuran ataupun pajak dari masyarakat baik langsung ataupun tidak

langsung yang disebut pajak ataupun Tx. Pendapatan setelah diperhitungkan pendapatan transfer dari pemerintah dan pajak yang wajib diserahkan pada pemerintah disebut:” Disposable Income” ialah pemasukan yang telah siap untuk dikonsumsi serta ditabungkan. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan merupakan:

$$Y_d = Y + Tr - Tx$$

Disebut disposable income, dari persamaan itu kita dapat menurunkan persamaan $Y = Y_d - Tr + Tx$, mengingat Y_d itulah yang digunakan untuk konsumsi dan sisanya merupakan saving maka dapat ditulis : $Y_d = C + S$. Kalau persamaan-persamaan diatas dikumpulkan:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = Y_d - Tr + Tx$$

$$Y_d = C + S,$$

Maka

$$C + I + G = Y_d - Tr + Tx$$

Dengan memperhatikan persamaan $Y_d = C + S$, maka dapat ditemukan

$$C + I + G = C + S - Tr + Tx,$$

ini berarti

$$I + G + Tr = S + Tx \text{ atau } S + Tx = I + G + Tr$$

Dalam perekonomian tiga sektor tingkat pendapatan nasional equilibrium dapat ditentukan dengan rumus :

$$Y = \frac{a + cTr - cTx + I + G}{1 - c} \quad \text{atau} \quad Y = \frac{1}{1 - c} (a - cTx + cTr + I + G)$$

Daftar Pustaka

- Gregory Mankiw. (2007). *Makro Ekonomi*. Erlangga.
- Rahardja, P., & Mandala Manurung. (2001). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. FEUI.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, W. D. (2001). *Ilmi Makro Ekonomi*. PT. Media Edukasi.
- Samuelson, P. A. & W. D. N. (2004). *Ilmu Makro-ekonomi, Edisi Tujuh Belas*. Penerbit Erlangga,.
- Sukirno Sadono. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada.
- T. Gilarso. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Kanisius.

Tentang Penulis



Dr. Sabil, SE, MM merupakan dosen aktif di Universitas Bina Sarana Informatika, pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Prodi Manajemen. Penulis meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia dari SPs.Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.Selain sebagai pendidik, penulis juga aktif mempublikasikan artikel ilmiah di berbagai tingkatan baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.

Penulis Buku : Dasar-Dasar Perpajakan, Mengenal Perilaku Konsumen Dan Konsep Strategi Pemasaran (Berbasis Teori dan Pendekatan Praktis), Kebijakan Pengupahan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Di Kawasan Industri

BAB

5

BENTUK PASAR; PERSAINGAN SEMPURNA, MONOPOLI, DUOPOLI & OLIGOPOLI

Sri Juminawati

Pada dasarnya, dikenal empat bentuk pasar yaitu persaingan sempurna, *monopoli*, *oligopoli*, dan persaingan *monopolistik*. Dua bentuk pasar yang mempunyai perbedaan ekstrim adalah pasar persaingan sempurna mempunyai ciri utama yakni terdapat banyak penjual, sedangkan pasar monopoli menunjukkan dimana hanya ada satu penjual. Dalam kaitannya dengan pemahaman konsep efisiensi ekonomi, pembahasan dalam kegiatan belajar ini hanya akan dititikberatkan pada pengenalan konsep-konsep dasar dalam bentuk pasar persaingan sempurna dan monopoli.

A. Industri dalam Pasar Persaingan Sempurna

Bentuk pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang dianggap paling ideal karena menjamin terciptanya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat efisien. Walaupun dalam kenyataannya sangat tidak mudah untuk menemukan jenis industri

yang bisa digolongkan dalam bentuk persaingan sempurna, sangat penting untuk mempelajari kegiatan industri dalam persaingan sempurna terutama agar dapat membandingkannya dengan bentuk pasar monopoli. (IN Baskoro & NS Damayanti, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

Suatu industri yang bersaing secara sempurna ditandai oleh beberapa karakteristik yang diantaranya adalah :

1. Penjual dan pembeli sama-sama sebagai penerima harga

Dalam bentuk pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga sama halnya pembeli juga tidak dapat menentukan harga. Harga adalah sesuatu yang given, karenanya baik penjual maupun pembeli hanya berkonsentrasi dalam hal jumlah barang yang diperjual belikan. Interaksi seluruh penjual dan seluruh pembeli dipasarlah yang menentukan harga pasar. Karakteristik pertama ini bersumber dari dua asumsi yakti :

- a. Ada banyak pembeli dan penjual dimana setiap pembeli maupun penjual hanya merupakan bagian kecil yang tidak berarti dalam transaksi pasar secara keseluruhan.
- b. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang sejenis (*homogen*) dimana tidak ada perbedaan

antara barang yang dijual oleh perusahaan satu dengan lainnya.

2. Tidak ada hambatan bagi penjual atau pembeli untuk masuk atau keluar pasar, seandainya perusahaan mengalami kerugian akan mudah baginya untuk keluar dari pasar, sebaliknya jika ada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan dalam pasar tersebut akan mudah pula baginya untuk masuk.

Produsen dan konsumen sama-sama mempunyai informasi yang sempurna mengenai pasar, baik itu mengenai harga dan setiap perubahan-perubahannya. Hal ini menyebabkan para produsen tidak dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku di pasar (IN Baskoro & NS Damayanti, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

B. Industri dalam Pasar Monopoli

Suatu bentuk pasar yang mempunyai karakteristik yang bertolak belakang dengan persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat 1 perusahaan industri dalam pasar monopoli ditandai oleh beberapa karakteristik yang diantaranya adalah :

1. Karakteristik Pasar Monopoli

a. Penjual berbagai penentu harga (*price setter*)

Dengan tidak adanya saingan di pasar menyebabkan perusahaan monopolis dapat sepenuhnya mempengaruhi harga. Dengan melakukan pengendalian atas barang yang diproduksinya dan jumlah barang yang ditawarkannya, perusahaan monopoli dapat menentukan tingkat harga yang dikehendaknya. Sebagai konsekuensinya, permintaan yang di hadapi di pasar sama dengan permintaan yang di hadapi perusahaan monopoli. Pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau menginginkan barang tersebut maka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Karakteristik monopolis sebagai penentu harga ini bersumber dari dua asumsi yakni :

- 1) Hanya ada satu penjual di pasar.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak dapat digantikan oleh barang lain, hanya perusahaan itulah yang menjual barang tersebut.

b. Ada hambatan bagi penjual lain masuk ke dalam industri tersebut, baik yang bersifat legal yakni melalui undang-undang maupun karena sifat teknologinya yang canggih.

2. Alasan Munculnya Monopoli

Salah satu ciri dari perusahaan monopolis adalah hanya ada salah satu perusahaan yang beroperasi di pasar. Munculnya perusahaan tunggal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Monopoli karena adanya penguasaan atas input atau teknologi yang digunakan.

Suatu perusahaan monopoli bisa saja menguasai sumberdaya tertentu yang sangat penting dan tidak ada perusahaan lain yang memilikinya seperti sama halnya perusahaan akan menjadi monopolis bila diberikan hak paten atas penemuan teknologi tertentu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain.

- b. Monopoli karena adanya kekuatan hukum yang muncul dalam bentuk penguasaan atas barang/jasa tertentu seperti jasa pengiriman surat, telekomunikasi.

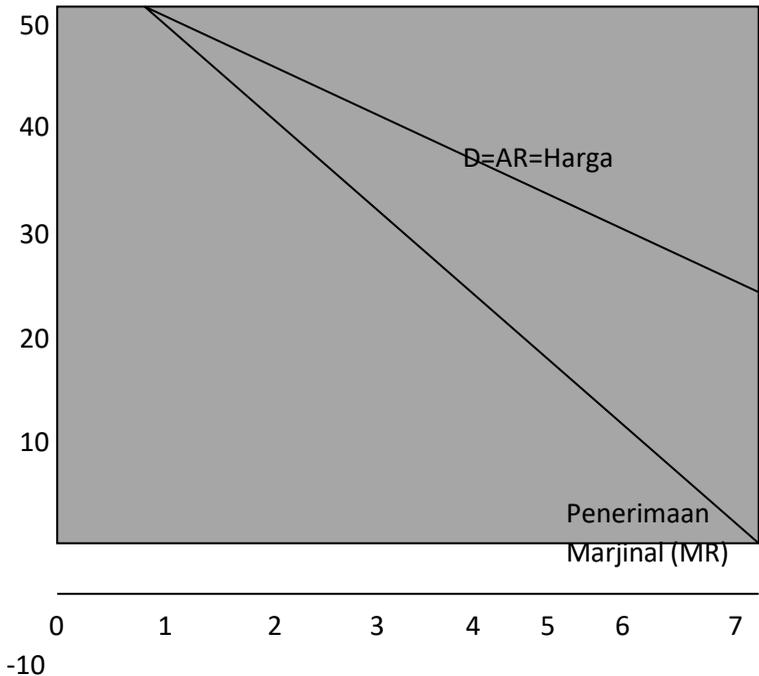
- c. Monopoli alamiah karena menekankan pada skala ekonomis dimana satu perusahaan akan memproduksi barang lebih murah dibandingkan dengan apabila diproduksi oleh lebih dari satu perusahaan.

3. Pemaksimalan Keuntungan dalam Industri Monopoli

Semua perusahaan, baik yang beroperasi di pasar persaingan sempurna maupun di pasar monopoli, untuk memaksimalkan keuntungannya akan memilih tingkat output dimana biaya Marjinal (MC) = Penerimaan Marjinal (MR). Penerimaan Marjinal bagi Perusahaan di Pasar persaingan Sempurna adalah sama dengan pada tingkat harga berapa barang tersebut di jual. Perusahaan monopoli, mempunyai Penerimaan marjinal yang besarnya tidak sama dengan harga barang itu sendiri. (IN Baskoro & NS Damayanti, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

Penerimaan Marjinal (MR) adalah tambahan penerimaan karena perusahaan menambah jumlah barang yang dijual sebanyak 1 satuan. Perhatikan Gambar 3.8, pada titik B monopolis menjual 1 unit barang dengan harga Rp 500,00 maka Penerimaan Totalnya adalah Rp 500,00 Pada titik C monopolis menjual 2 unit barang dengan harga Rp 450,00 maka Penerimaan Total sebesar Rp 900,00. Penjualan unit ke dua barang tersebut meningkatkan Penerimaan Total sebesar Rp 400,00. Ini berarti MR sebesar Rp 400,00 dan lebih kecil dari harganya yakni Rp 450,00. Setelah Anda mempelajari Kurva Permintaan dan Kurva Penerimaan Marjinal dari perusahaan monopoli, langkah berikutnya adalah mempelajari bagaimana perusahaan monopoli menentukan harga yang dapat

memaksimalkan keuntungannya. (IN Baskoro & NS Damayanti, 1996)



Gambar : Kurva Penerimaan Marginal dan Kurva Permintaan Monopolis

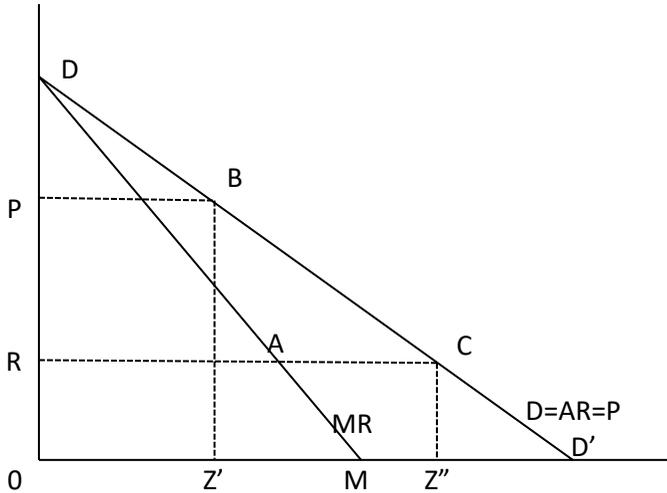
4. Kegagalan Pasar Monopoli

Keadaan perekonomian dikatakan efisien jika memberikan sebanyak mungkin barang dan jasa kepada konsumen dengan harga serendah mungkin dengan asumsi sumberdaya dan teknologi sudah tertentu. Inefisiensi dapat timbul jika barang dan biaya

-biayanya tidak benar-benar mencerminkan manfaat dan biaya sosialnya (social benefits dan costs). Dalam kegiatan belajar ini, masalah inefisiensi ini akan dijelaskan melalui uraian tentang konsep-konsep yang muncul dalam kegagalan pasar yakni monopoli, sumberdaya milik umum, barang publik dan eksternalitas (IN Baskoro & NS Damayanti, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

Satu di antara sumber inefisiensi yang ada yaitu tidak adanya persaingan yang dalam bentuk ekstrimnya adalah monopoli. Di dalam pasar monopoli, perusahaan adalah keseluruhan industri barang/jasa yang bersangkutan dan perusahaan menghadapi kurva permintaan industri yang negatif. Akibatnya, jika monopoli ingin menjual komoditinya lebih banyak maka yang harus dilakukannya adalah menurunkan harganya atau jika monopoli ingin menjual barangnya lebih sedikit maka harga barang tersebut dinaikkan. Bagi monopoli, $MR < P$ dan kurva MR berada di bawah kurva D-nya. Karena monopoli memproduksi output di mana $MR = MC$ dan P melebihi MR maka dengan kurva biaya dan kurva permintaan yang sama monopoli memproduksi lebih sedikit dan menentukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan di persaingan sempurna. Dengan demikian, monopoli seringkali dianggap mengarah pada inefisiensi alokasi sumberdaya dan karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar,

keuntungan monopoli umumnya mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi pendapatan.



Dapat diasumsikan bahwa sebuah industri terdiri dari I perusahaan monopoli yang mempunyai biaya marjinal dan biaya rata-rata pada tingkat dimana $MC = AC = R$. Kurva permintaan barang tersebut adalah DD' . Dalam bentuk pasar persaingan sempurna, industri tersebut akan berproduksi pada jumlah barang sebesar Z'' , dan tingkat harga dimana $R = MC$. Sementara itu jika industri tersebut berada dalam pasar monopoli, kurva penerimaan marjinalnya (MR) adalah DM . Jika $MR = MC$, maka monopolis akan berproduksi pada jumlah barang sebesar Z' dan menjual barangnya pada tingkat harga P bukan pada R .

Dengan membatasi produksi sebesar Z'' , monopoli dapat menikmati kelebihan keuntungan sebesar $PBAR$. Luas bidang $BCZ''Z'$ memperkirakan besarnya permintaan yang dapat dilayani oleh industri dalam persaingan sempurna yang tidak dilayani oleh monopolis, dengan biaya sebesar $ACZ''Z'$. Jadi segitiga BCZ adalah besarnya perkiraan kerugian ekonomis yang diderita oleh masyarakat akibat monopolisasi industri. Hal ini menunjukkan inefisiensi pemanfaatan sumberdaya, artinya industri tersebut sebenarnya mampu memproduksi sebesar Z'' tetapi yang diproduksi hanya sebesar Z' . Dengan tidak adanya saingan mengakibatkan perusahaan monopolis bebas mengontrol biaya serta sumberdaya yang dikuasainya termasuk juga limbah yang dihasilkannya. Inefisiensi yang dilakukan oleh masyarakat atau dikenal dengan biaya sosial (*social cost*) (IN Baskoro & NS Damayanti, 1996: Sunarno S. Atmodjo, 2021).

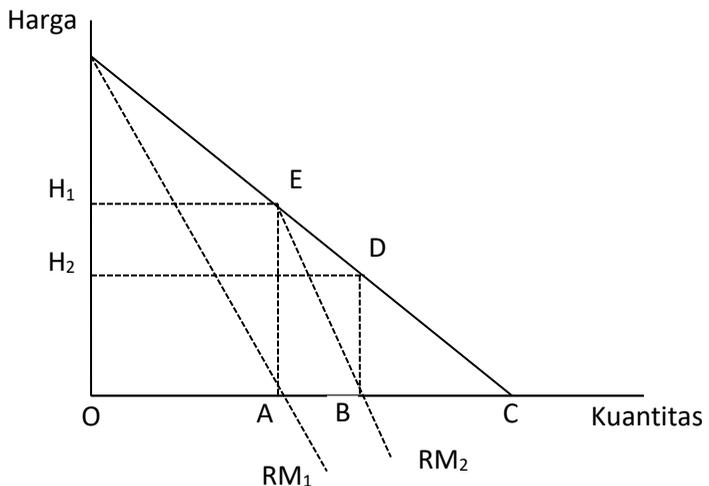
C. Industri dalam Pasar Duopoli

1. Pengertian Pasar Duopoli

Beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan duopoli yaitu cara membagi satu pasar tersebut di antara dua perusahaan yang beroperasi di situ. Umumnya seorang pegiat duopoli menganggap bagian yang dikuasai oleh saingan adalah sebagai datum. Atas dasar datum itu dia berusaha untuk

memanfaatkan sisa pasarnya agar dapat memaksimalkan keuntungan yang selalu diasumsikan sebagai tujuan satiap perusahaan.

Ahli ekonomi Perancis yaitu Cournot, yang merintis jalan untuk menggambarkan hubungan interdependensi antara dua duopolis yang saling bersaing. Oleh karena itu cara penjelasan ini sering disebut sebagai model Cournot. Pertama-tama dia menyederhanakan masalahnya dengan mengemukakan dua buah asumsi pokok. Pertama, stuktur permintaan pasar digambarkan sebagai satu garis lurus. Kedua biaya untuk memproduksi dapat kita lukiskan seperti dapat kita lihat pada gambar berikut (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).



Grafik : Penentuan Produksi Model Cournot

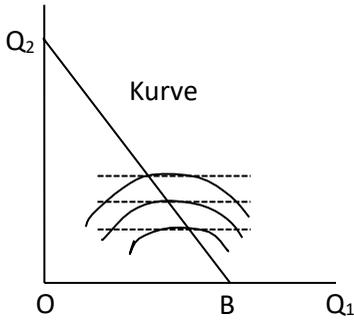
2. Model Cournot

Sebuah kepeloporan yang dilakukan oleh Cournot dilanjutkan oleh Strackelberg. Hubungan interdependensi antara dua orang duopolis lebih jelas ditunjukkan oleh Strackelberg dengan kurve reaksi yang dilihat dari sudut masing-masing pihak.

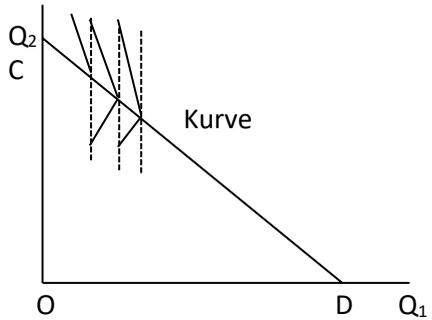
Suatu teori model Strackelberg tidak perlu dikaji secara mendalam, yang penting untuk dicatat adalah hubungan interdependensi, antara dua perusahaan dalam pasar duopoli. Akan tetapi apabila pembaca berminat untuk memahami generasi yang dilaksanakan oleh Strackelberg dapat meneruskan membaca bagian ini sampai selesai oleh karena bermamfaat untuk pemahaman meteri teori ekonomi selanjutnya (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

3. Model Strackelberg

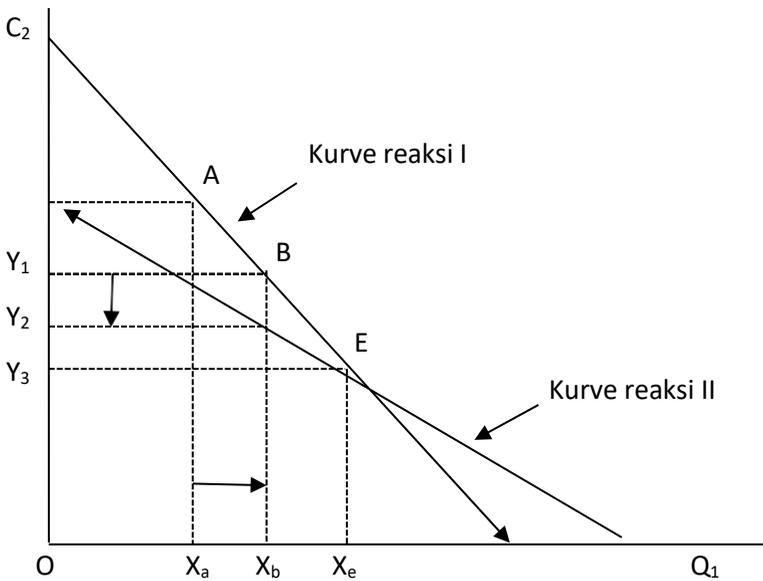
Melalui cara mengimplementasikan analisis kurve indeferensi, kurve keuntungan iso yang diajukan oleh von Strackelberg model Cournot dapat diperjelas dan digeneralisasikan. Keuntungan iso yang diajukan oleh Strackelberg adalah seperti terlihat pada gambar-gambar berikut, kurve keuntungan iso (keuntungan sama atau keuntungan tetap) adalah kurve yang menunjukkan berbagai kuantitas produksi yang akan mendatangkan keuntungan yang sama (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).



Grafik: Peta Keuntungan Iso Dengan Kurve Reaksi Duopolis I



Grafik : Peta Keuntungan Iso Dengan Kurve Reaksi Duopolis II



Grafik : Ekuilibrium Cournot Stabil

Dapat dimengerti bahwa titik potong E dari kurve reaksi duopolis I dan II pada gambar di atas. Misalkan duopolis I memproduksi OX_a maka duopolis II akan memproduksi OY_1 atas dasar kurve reaksinya tetap, maka duopolis pertama akan memberikan reaksi, dengan memproduksi OX_b , dengan menganggap duopolis I produksinya tetap, maka duopolis merencanakan berproduksi sebesar OY_b . tahap ini bisa dilanjutkan terus sampai pada titik potong E, di mana duopolis I memproduksi X_e dan duopolis II OY_e . Bila $OY < OY_2$, dan $OX < OX_e$, akan terjadi reaksi berantai yang mendorong penyelesaian ke arah titik E. dengan demikian dapat dikatakan bahwa titik ekuilibrium Cournot adalah stabil (Sudarsono, 1996; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

4. Pendekatan Matematika

Serta merta dengan menerapkan alat matematika, dapat ditinjau Ekuilibrium Cournot, dengan menggunakan asumsi tradisional yaitu bahwa produknya adalah homogen sehingga fungsi permintaannya dapat ditulis seperti berikut (Sudarsono, 1996):

$$H = f(Q) = f(Q_1 + Q_2)$$

Oleh karena tidak ada biaya produksi, fungsi keuntungan adalah fungsi pendapatannya (RT). (Sudarsono, 1996)

$$RT_1 = \pi_1 = H \cdot Q_1$$

$$= f(Q) \cdot Q_1$$

$$RT_2 = \pi_2 = H \cdot Q_2$$

$$= f(Q) \cdot Q_2$$

D. Industri dalam Pasar Oligopoli

1. Karakteristik Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli merupakan situasi pada sejumlah kecil atau beberapa perusahaan dalam sebuah industri. Misalnya adalah industri alat-alat listrik, perakitan mobil dan motor, industri rokok, semen, dan lain-lain. Unsur bentuk pasar ini adalah persaingan bukan harga dan monopoli, tetapi yang dominan adalah unsur monopoli. Produknya ada yang didiferensiasikan dan ada pula yang tidak. Contoh jenis produk yang terakhir adalah peleburan baja dan aluminium; semen, dan pupuk. Saling ketergantungan serta pengaruh tindakan perusahaan individual cukup besar. Boleh dikatakan tak ada penyelesaian umum modelnya dan hanya ada pola atau kasus reaksi yang berbeda-beda.

Karakteristik pasar industri oligopoli adalah jumlah perusahaan hanya sedikit atau beberapa saja karena terdapat rintangan masuk ke dalam industri tersebut, produknya ada yang homogen dan ada yang

didiferensiasikan, serta terdapat beberapa perusahaan yang mencapai skala ekonomis. Unsur oligopoli ditunjukkan oleh derajat atau nisbah konsentrasi industri atau penjualan 4 atau 5 perusahaan terbesar mendominasi suatu industri. Skala ekonomis dan manfaat mengadakan *marger* agar *output* dapat diproduksi secara lebih efisien mendorong industri ini terkonsentrasi hanya pada beberapa perusahaan besar saja. Hal ini memerlukan permintaan yang cukup stabil. Dengan merger atau penggabungan mereka berhenti bersaing dan menguasai pangsa pasar lebih besar. Model-model dasar serta kasus-kasusnya dianalisis, kesimpulannya menunjukkan ada kecenderungan ketegaran harga, dan *output* yang dihasilkan. (FW. Mansoer, 2010; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

2. Model Industri Oligopoli

Pada model industri oligopoli terdapat dua kelompok yaitu kasus industri oligopoli tanpa kolusi dan oligopoly dengan kolusi. Pada oligopoli tanpa kolusi, diketengahkan dengan model kurva permintaan patah, model perusahaan biaya terendah, dan model perusahaan dominan. Pada kasus oligopoli dengan kolusi, dikemukakan model maksimasi keuntungan bersama, serta model kerteil pembagian pasar. Dengan berbagai kondisi berbeda perusahaan produsen oligopolis berusaha memaksimumkan

keuntungan dengan mempertimbangkan reaksi perusahaan-perusahaan lain yang ada pada industri tersebut atas tindakannya. Karena cukup bervariasi bentuk pasar industri ini maka penarikan kesimpulan secara umum agak sukar dilakukan, walaupun dilakukan maka sifatnya khusus berlaku lebih banyak pada kasus tersebut.

Pada model oligopoli dengan kurva permintaan patah, didasarkan pada skenario anggapan mengenai reaksi pesaing bila perusahaan mengubah harga *output*. Di sini dianggap perusahaan-perusahaan lain tak bereaksi bila sebuah perusahaan menaikkan harga produk. Tetapi bila perusahaan tersebut menurunkan harga maka perusahaan-perusahaan pesaing lain akan mengimbangi dengan juga menurunkan harga bahkan mungkin lebih rendah. Akibatnya pada tingkat harga tersebut kurva permintaan yang dihadapi perusahaan menjadi patah lebih tak elastis. Para pembeli akan beralih ke perusahaan-perusahaan lain. Sedangkan pada keadaan pertama di mana perusahaan menaikkan harga sementara yang lain tidak berbuat demikian maka ia dengan cepat kehilangan para pembeli karena mereka beralih ke perusahaan-perusahaan lain yang tak menaikkan harga. Pada bagian yang patah, kurva MR tak dapat ditentukan (terputus tegak lurus) pada tingkat *output* yang bersangkutan. Akibatnya, dengan prinsip maksimisasi keuntungan $MR=MC$, *output* dan harganya akan tegar

tak berubah meskipun kurva-kurva biaya, termasuk MC berubah.

Pada model perusahaan oligopoli tanpa kolusi dengan biaya terendah, maka perusahaan tersebut yang menentukan harga dan kuantitas *output* yang diproduksi dengan pedoman $MR=MC$, sementara perusahaan lain mengikuti harga tersebut dan memproduksi serta menjual atau mengisi sebanyak sisa pasar. Pada model perusahaan dominan, perusahaan tersebut membiarkan perusahaan-perusahaan lainnya menjual dipasar dengan harga yang menghasilkan keuntungan maksimal kepada mereka, kemudian perusahaan dominan menentukan harga dan kuantitas yang diproduksi (FW Mansoer, 2010; Sunarno S. Atmodjo, 2021). Sunarno S. Atmodjo, 2021).

Pada perusahaan model oligopoli dengan kolusi, maksimisasi keuntungan bersama mendorong perusahaan berkolusi menjadi satu dan bertindak sebagai perusahaan monopolis yang memaksimalkan keuntungan, kemudian membaginya. Jadi masing-masing perusahaan hanya bertindak sebagai unit produksi atau pabrik saja. Pada model kartel, pembagian pasar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berkolusi menentukan harga jual bersama dan kemudian membagi pasarnya mungkin secara geografis, atau menentukan kuota produksi masing-masing yang harus dipatuhi dan dipenuhi. Masing-masing perusahaan harus menjual

di daerah geografis yang telah ditentukan bersama atau memproduksi dan menjual sebanyak yang telah disepakati bersama.

3. Halangan Kolusi

Sering kali terdapat beberapa hambatan atau halangan untuk mengadakan kolusi, yaitu adanya larangan mengadakan kartel (kolusi) baik berdasarkan persetujuan bersama atau menurut undang-undang, jumlah perusahaan yang terlalu banyak mempersulit kolusi harga, *output* yang tak identik mempersulit kolusi, dan akhirnya kemungkinan di antara mereka ada yang tak jujur dan melanggar harga dan kuota produksi yang telah disetujui bersama.

Dikarenakan persaingan harga bisa mengakibatkan timbulnya perang harga yang tak diinginkan dan merugikan semua, perusahaan-perusahaan oligopoli cenderung mengadakan persaingan bukan harga. Mereka ditopang dengan dana-dana untuk mengadakan pengembangan produk, pengembangan teknologi, dan kampanye advertensi serta promosi penjualan.

Suatu halangan atau rintangan masuk membuat industri oligopoli bersifat restriktif dengan *output* lebih sedikit dan biaya produksi lebih tinggi. Perusahaan pada industri ini cenderung memperoleh laba ekonomis. Penetapan harga dan *output* cenderung

mendekati situasi industri monopoli. Tetapi industri oligopoli juga mempunyai efek yang baik. Beberapa produk pada bentuk pasar industri ini mengalami penurunan biaya dan harga disertai perluasan produksi dan perbaikan kualitas. Persaingan bukan harga mendorong mereka mengembangkan teknik produksi dan perbaikan kualitas. Advertensi dilakukan untuk menaikkan permintaan.

Suatu permasalahan yang cukup penting, yaitu dilema tahanan tersangka kejahatan yang menggambarkan kesulitan untuk bekerja sama, meskipun ini memberi manfaat bersama. Ini memberikan contoh bagi kerja sama antara perusahaan-perusahaan monopolis di mana upaya untuk memelihara komitmen/perjanjian penentuan harga dan kuantitas sulit dipertahankan meskipun hal ini memberikan manfaat bersama guna memperoleh laba monopolis (FW Mansoer, 2010; Sunarno S. Atmodjo, 2021).

Daftar Pustaka

- Harmadi SHB (2012): Teori Ekonomi Mikro. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hartono, D Faunah & Winarti FX (1985); Pengantar Ilmu Ekonomi, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Karseno AR, 2010; Statistika Ekonomi II; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Lipsey RG & PO Steiner (1984); *Economics*, Harper & Row Publisher Inc. Diterjemahkan oleh Anas Sidik, dengan judul: Pengantar Ilmu Ekonomi, Bina Aksara, Jakarta.
- Mansoor FW (2010); Pengantar Ekonomi Mikro, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Reksohadiprodjo S, 2007; Peramalan Usaha; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Samuelson PA, (?); *Economics*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Media Sains Indonesia, Bandung.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- SastroAtmodjo, Sunarno., Sukrisno, A. & Eka Susilawati (2021); Teori Ekonomi Mikro. Media Sains Indonesia, Bandung.

- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Teori Mikroekonomi. Pustaka Learning Center, Malang.
- Soelistyo & Insukindro (1995); Teori Ekonomi Makro I, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudarsono (1996): Pengantar Ekonomi Mikro, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudarsono, W Usman & Boediono (?); Pengantar Ekonomi Mikro. Penerbit Karunika Jakarta Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudarman A (2000); Pengantar Ekonomi Mikro, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudjana, 1991; Statistik: Untuk Ekonomi dan Niaga; Penerbit "Tarsito", Bandung.
- Sukirno S (2005): Mikro Ekonomi. Rajawali Press, Jakarta.

Tentang Penulis

SRI JUMINAWATI, SE., MM., C.LA_ALC., C.ME

PERSONAL PROFILE

Name : Sri Juminawati, SE., MM., C.LA_ALC., C.ME
Current Address : Perum. Griya Katulampa Blok C. III No. 21, Bogor
Place/Date of Birth : Jakarta, September 25 1964
Sex : Female
Religion : Islam
Marital Status : Married
Citizenship : Indonesian
Hobbies : Sport, Music, Travelling
Telephone No. : +62 812-8488-4334 +62 821-2291-0725

WORK BACKGROUND

AMPD / FUNDING MANAGER
BRI, 2017-2020
FUNDING OFFICER BRANCH OFFICE
BRI, 2011-2020
SUPERVISOR BRANCH OFFICE
KCP BAKAMANGSIANG BOGOR, 2009-2010
SUPERVISOR BRANCH OFFICE
KCP SUBIRMAN ROGOR, 2008-2009
CREDIT ADMINISTRATION BRANCH OFFICE
BRI BOGOR PAJALARAN, 2005-2008
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
UNIVERSITAS IBNU KHALIDUN, 2007
OPERATIONAL BRANCH OFFICE
BRI BOGOR DEWI SARTIKA, 2006-2007
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
STIE BINA HARAS BOGOR, 2007
PROD. CONSUMER BANKING
BRI HEAD OFFICE JAKARTA, 1999-2006
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
UNIVERSITAS PRAMITA JAKARTA, 2000
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
UNIVERSITAS WIRASATTA INDONESIA JAKARTA, 1999
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
STIE SETIA BUDI JAKARTA, 1999
DOSEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
STIE SWADAYA JAKARTA, 1998
MARKETING RETAIL BANKING
BRI HEAD OFFICE JAKARTA, 1996-1998
OPERATIONAL DESIG. CARD CENTER
BRI HEAD OFFICE JAKARTA, 1994-1995
COUNTERPART CITIBANK CONSULTANT
BRI HEAD OFFICE JAKARTA, 1989-1993
LOAN & FUND OFFICER
BRI UNIT KOTA JAKARTA, 1988-1989
STAFF OFFICER MARKETING
PT. MUTIHA INDONESIA, 1987-1988
EXEC. SECRETARY - ELON GIBBS MARKETING
PT. UNILEVER INDONESIA, 1985-1987
PIYUPT - RESEARCH
BURSAU INDONESIA, 1984-1985



CORE SKILLS

Microsoft Access
Basic Computer Hardware
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Mentor C.LA-ALC (Leadership)
Mentor CME (Marketing)
Mentor Praktisi Perbankan
Coach Wiranesia (Wirausaha)

CAREER HIGHLIGHTS

🏆 Reward Recognition IMP BRI 2017
🏆 Pemenang Racing BRITAMA 2017
Kategori AMPD

EDUCATION BACKGROUND

COMPLETING DOCTORAL DISSERTATION (S3)
SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIVERSITY
JAKARTA,
2019-PRESENT
MAGISTER MANAGEMENT DEGREE (S2)
LABORA GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT JAKARTA,
1999-2001
GRADUATE BANKING STIE SWADAYA (S1), 1996-1998
GRADUATE BANKING ACADEMY (D3), 1986-1988

CONTACT DETAILS:

☎ +62 81284884334
☎ +62 82122910725

✉ srijuminawati@gmail.com

📍 Perum. Griya Katulampa
Blok C. III No. 21
Bogor - Jawa Barat

BAB 6

PERHITUNGAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

Nur Arif Nugraha

A. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu Negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665.(Hull, 1899) Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Oleh karena itu pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional.(Callen, 2008)

Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Pendapatan Nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa atau negara. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Konsep ini biasanya dikenal dengan sebutan pendapatan perkapita. Meskipun pendapatan perkapitanya belum menggambarkan tingkat kemajuan seluruh rakyat.(Yoshanda, 2020)

Pendapatan Nasional dapat digunakan untuk mengetahui susunan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi disetiap sektor perekonomian terhadap penyusunan pendapatan nasional. Pendapatan Nasional dapat digunakan untuk memutuskan dan menyusun untuk dibuat kebijakan yang sekiranya dipandang perlu. Contohnya di sektor pertanian, pemerintah dapat membuat berbagai macam kebijakan seperti penyediaan pangan, industri pupuk, irigasi dan lain-lain. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk untuk membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentu. Hal

ini berkaitan dengan pergerakan arus kehidupan ekonomi.(Yoshanda, 2020)

Pendapatan nasional mengandung beberapa pengertian antara lain Produk Domestik Bruto atau PDB (*Gross Domestic Product* atau GDP), dapat pula berarti Produk Nasional Bruto atau PNB (*Gross National Product* atau GNP), dan dapat juga National Income (NI), yang juga merupakan beberapa pengertian dari pendapatan nasional.

1. Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu periode. Dalam menghitung GDP jumlah pasar, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri. (Mankiw, 2010)

2. Produk Nasional Bruto

Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara (nasional) selama 1 periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar, yang harus diperhatikan

yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Dalam GNP ini, hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada didalam negeri maupun diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.(Mankiw, 2010)

Ilustrasi: GDP (dalam miliar rupiah) negara X sebesar 7.000.000, pendapatan penduduk negara A yang ada di negara Y sebesar 200.000, dan pendapatan penduduk asing di negara X sebesar 300.000, maka jumlah GNP adalah:

$$\begin{aligned} \text{GNP} &= \text{GDP} + \text{Pendapatan neto dari luar negeri} \\ &= 7.000.000 + (200.000 - 300.000) \\ &= 7.000.000 - 100.000 \\ &= 6.900.000 \end{aligned}$$

3. Produk Nasional Neto

Produk Nasional Netto/*Net National Product* (NNP) adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaian. (Mankiw, 2010)

Contoh: Penyusutan alat di perusahaan X sebesar 11.000, maka jumlah NNP adalah:

$$\begin{aligned}\text{NNP} &= \text{GNP} - \text{penyusutan} \\ &= 6.900.000 - 15.000 \\ &= 6.885.000\end{aligned}$$

4. Pendapatan Nasional Neto

Pendapatan Nasional Netto/*Net National Income* (NNI) adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat digeserkan kepada pihak lain, contoh pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. (Mankiw, 2010)

Contoh: Pajak penjualan barang sebesar 100.000, dan subsidi sebesar 25.000, maka jumlah NNI adalah:

$$\begin{aligned}\text{NNI} &= \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung} + \text{Subsidi} \\ &= 6.885.000 - 100.000 + 25.000 \\ &= 6.810.000\end{aligned}$$

5. Pendapatan Orang Pribadi

Pendapatan orang pribadi adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya.(Blanchard, Fischer and BLANCHARD, 1989) Pendapatan orang pribadi dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dibayar oleh setiap badan usaha kepada pemerintah.
- b. Laba yang tidak dibagi adalah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk tujuan tertentu.
- c. Iuran pensiun adalah iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan perusahaan dengan tujuan untuk dikembalikan setelah tenaga kerja tersebut mencapai umur tertentu dan tidak lagi bekerja.
- d. Asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak, dimana pihak satu harus wajib membayar iuran atau yang lainnya, dan pihak yang lain harus memberikan jaminan penuh kepada pembayar iuran tersebut.

Dalam pendapatan perseorangan termasuk juga pembayaran transfer Pembayaran transfer adalah pembayaran-pembayaran di negara-negara yang dibayarkan kepada orang-orang tertentu. Pembayaran tersebut bukan merupakan balas jasa atas

partisipasinya dalam proses produksi pada tahun berjalan, melainkan tahun-tahun sebelumnya. (Chioma, 2009)

Contoh:

Pembayaran transfer sebesar 40.000, pajak perseroan 20.000, laba ditahan 30.000, iuran pensiun 25.000, asuransi sebesar 50.000. aka jumlah PI adalah:

$PI = NNI + \text{Pembayaran transfer} - (\text{iuran pensiun} + \text{asuransi} + \text{laba ditahan} + \text{pajak perseroan})$

$= 6.810.000 + 40.000 - (25.000 + 50.000 + 30.000 + 20.000)$

$= 6.810.000 + 40.000 - 125.000$

$= 6.725.000$

6. Pendapatan yang Siap Dibelanjakan

Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari penghasilan orang pribadi setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. (Mankiw, 2010)

Contoh: Jika pajak penghasilan sebesar 100.000, maka jumlah DI adalah: $DI = PI - \text{pajak langsung}$

$$= 6.725.000 - 100.000$$

$$= 6.625.000$$

B. Perhitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan berbagai macam metode. Perhitungan pendapatan nasional tersebut dapat dilakukan dengan tiga macam metode perhitungan yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran dimana ketiga metode tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda. (Mankiw, 2010)

1. Metode Produksi

Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian digolongkan menjadi sektor ekonomi dan lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional antar negara, dan antar waktu di suatu negara. Pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Y = (\text{Unit 1} \times \text{Harga 1}) + \text{Nilai tambah} (\text{Unit 2} \times \text{Harga 2}) + \dots + \text{Nilai tambah} (\text{Unit n} \times \text{Harga n})$$

Contoh:

Industri pengolahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membeli 1000 kapas dari petani kapas dengan harga 100.000 per meter
- b. Kapas diproses menjadi benang dengan harga 170.000
- c. Benang diproses menjadi kain dengan harga 200.000
- d. Kain diproses menjadi pakaian dengan harga 250.000
- e. Pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000

Pendapatan nasional metode produksi (nilai tambah) adalah:

- a. Petani kapas : $1000 \times \text{Rp}100.000$
= Rp100.000.000
- b. Benang : $(1000 \times \text{Rp}170.000) - (1000 \times \text{Rp}100.000)$
= Rp 70.000.000
- c. Kain : $(1000 \times \text{Rp}200.000) - (1000 \times \text{Rp}170.000)$
= Rp 30.000.000
- d. Pakaian: $(1000 \times \text{Rp}250.000) - (1000 \times \text{Rp}200.000)$
= Rp 50.000.000

$$\begin{aligned} \text{e. Pasar : } & (1000 \times \text{Rp}300.000) - (1000 \times \text{Rp}250.000) \\ & = \text{Rp } 25.000.000 + \text{Pendapatan nasional} \\ & = \text{Rp}275.000.000 \end{aligned}$$

2. Metode Pendapatan

Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya satu tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi pelaku ekonomi yang memiliki sumber daya alam berupa tanah, maka akan mendapatkan uang sewa (rent). Bagi yang memiliki sumber daya manusia, maka akan mendapatkan upah wage). Bagi yang memiliki modal, maka akan menerima bunga (interest). Bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka akan memperoleh laba (profit).(Kira, 2013)

$$Y = \text{rent} + \text{wage} + \text{interest} + \text{profit}$$

Contoh:

Suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa 100.000, upah 200.000, bunga 300.000, dan laba 400.000. maka jumlah pendapatan nasional adalah:

$$\begin{aligned} &= 100.000 + 200.000 + 300.000 + 400.000 \\ &= 1.000.000 \end{aligned}$$

3. Metode Pengeluaran

Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional merupakan jumlah pengeluaran yang telah digunakan oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam empat sektor yang sama dalam metode pendapatan.

Hasil perhitungan pendapatan nasional berdasarkan ketiga metode tersebut secara teori akan menghasilkan angka yang sama, untuk negara yang sama pada tahun yang sama. Jika terdapat perbedaan, biasanya nilainya relatif kecil atau tidak material. Di antara ketiga metode perhitungan, yang paling lazim digunakan dan disajikan oleh negara-negara di dunia adalah perhitungan dengan metoda atau pendekatan pengeluaran. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional (Y) adalah jumlah nilai pengeluaran yang dibelanjakan oleh sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah; serta sektor perdagangan internasional jika perekonomian bersifat terbuka, dimana terdapat kegiatan ekspor (X) dan impor (M). (Kuznets, 1949)

Pelaku ekonomi di sektor rumah tangga adalah individu atau rumah tangga. Pelaku di sektor bisnis adalah industri atau perusahaan. Sementara pelaku di

sektor pemerintahan adalah pemerintah pusat negara yang bersangkutan. Pengeluaran agregat sektor rumah tangga dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi masyarakat, yakni bagian dari pendapatan yang tidak ditabung. Pengeluaran agregat sektor rumah tangga dilambangkan dengan huruf C, (Consumption). Pengeluaran agregat sektor bisnis diwakili oleh nilai investasi yang dibelanjakan oleh perusahaan-perusahaan (Investment), dilambangkan dengan I. Pengeluaran agregat sektor pemerintah maksudnya ialah belanja rutin pemerintah (Government), dilambangkan dengan G. Dengan demikian, pendapatan nasional (Y) berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai: $Y = C + I + G$, jika perekonomian bersifat tertutup. Jika perekonomian bersifat terbuka, sehingga terdapat ekspor (X) dan impor (M), maka rumus perhitungan menjadi: $Y = C + I + G + (X - M)$.

Contoh:

Pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga 300.000, investasi produsen 250.000, pengeluaran pemerintah 200.000, ekspor barang dan jasa 350.000, impor barang dan jasa 150.000. maka pendapatan nasional adalah

$$= 300.000 + 250.000 + 200.000 + (350.000 - 150.000)$$

$$= 300.000 + 250.000 + 200.000 + 200.000$$

$$= 950.000$$

Dari ketiga metode perhitungan diatas dapat diartikan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah dari semua pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam sebuah negara dalam waktu satu tahun.

Pendapatan negara ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi. Dilihat dari jumlah barang yang dihasilkan, pendapatan nasional diekompokkan menjadi: Produk Nasional Netto/Net National Product (NNP), Pendapatan Nasional Bersih/Net National Income (NNI), Pendapatan Perseorangan/Personal Income (PI), dan Pendapatan yang Siap Dibelanjakan/*Disposable Income* (DI).

C. Distribusi Pendapatan Nasional

Pada dasarnya distribusi pendapatan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemeratakan jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, distribusi pendapatan adalah salah satu langkah pemerintah untuk meratakan kemakmuran masyarakat. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan juga jumlah pengangguran.(Brueckner, Norris and Gradstein, 2015)

Untuk dapat mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan, dapat dilihat pada kurva Lorenz, kurva ini merupakan gambaran dari distribusi jumlah penduduk dan jumlah pendapatannya, dan rasio gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan, semakin tinggi rasio gini, maka akan semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. (Kalecki, 1938)

Berikut adalah arti nilai dari besaran rasio gini:

$G < 0.3$ artinya rasio gini atau ketimpangan rendah

$0.3 \leq G \leq 0.5$ artinya rasio gini atau ketimpangan sedang

$G > 0.5$ artinya rasio gini atau ketimpangan tinggi

Tidak meratanya pendapatan ini atau ketimpangan dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial lainnya, salah satunya adalah tingginya tingkat kriminal, karena disatu sisi ada penduduk yang benar-benar kaya dan disisi lain masih banyak penduduk yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan.

1. Tujuan Distribusi Pendapatan Nasional

Tujuan distribusi pendapatan nasional sebenarnya dengan jelas dinyatakan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, karena secara umum tujuan dari distribusi pendapatan ini adalah untuk mengurangi

dan meminimalkan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Alat Ukur Distribusi Pendapatan Nasional

Distribusi pendapatan nasional dapat diukur menggunakan dua alat ukur berikut ini, yaitu menggunakan koefisien rasio gini, menggunakan kriteria dari Bank Dunia.(Gilbert *et al.*, 1948)

Koefisien Gini adalah koefisien atau angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Besaran Koefisien Gini dimulai dari 0 sampai dengan 1. Jika Koefisien Gini sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna. Sebaliknya, jika Koefisien Gini sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna, karena hanya satu pihak yang menerima keseluruhan dari pendapatan nasional.

Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara dapat diketahui dari grafik yang dinamakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Sementara indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini.

Semakin tinggi atau besar Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata). Begitu pula jika semakin kecil Indeks Gini, semakin rendah tingkat ketidakmerataannya.

Alat ukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang kedua, Bank Dunia melihat dari besarnya kontribusi (sumbangan) dari 40 persen penduduk termiskin terhadap keseluruhan pendapatan nasional.

Kriteria yang dipakai Bank Dunia adalah sebagai berikut.

- Jika kelompok 40 persen penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12 persen keseluruhan pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangan tinggi.
- Jika kelompok 40 persen penduduk termiskin memperoleh pendapatan antara 12-17 persen dari keseluruhan pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangannya sedang.
- Jika kelompok 40 persen penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih dari 17 persen dari keseluruhan pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangannya rendah.

Daftar Pustaka

- Blanchard, O. J., Fischer, S. and BLANCHARD, O. A. (1989) *Lectures on macroeconomics*. MIT press.
- Brueckner, M., Norris, E. D. and Gradstein, M. (2015) 'National income and its distribution', *Journal of Economic Growth*, 20(2), pp. 149–175.
- Callen, T. (2008) 'What is Gross Domestic Product?', *Finance&Development*, December, pp. 48–49.
- Gilbert, M. *et al.* (1948) 'Objectives of national income measurement: a reply to Professor Kuznets', *The Review of Economics and Statistics*, pp. 179–195.
- Hull, C. H. (1899) *Economic writings of Sir William Petty. Vol. 1*. Augustus M Kelley, New York.
- Kalecki, M. (1938) 'The determinants of distribution of the national income', *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, pp. 97–112.
- Kira, A. R. (2013) 'The Factors Affecting Gross Domestic Product (GDP) in Developing Countries: The Case of Tanzania', *European Journal of Business and Management*, 5(4), pp. 148–158.
- Kuznets, S. (1949) 'National income and industrial structure', *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, pp. 205–241.
- Mankiw, G. (2010) *Macroeconomics*. 7th edn. New York: Worth Publisher.

Yoshanda, A. A. (2020) *PENDAPATAN NASIONAL*.
Sidoarjo. Available at:
<http://eprints.umsida.ac.id/6990/>.

Tentang Penulis



Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M. Lahir di Demak pada tanggal 16 Desember 1978. Dia menyelesaikan kuliah di Program Diploma III Pajak dan mendapatkan gelar Ahli Madya Perpajakan pada tahun 1999 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 9 September 1999. Setelah mengawali karir di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Oktober 1999, dia melanjutkan studi Program Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan mendapat gelar Sarjana Sains Terapan pada 3 Februari 2006. Selepas lulus, kemudian diangkat menjadi Pemeriksa Pajak dan ditempatkan di Surakarta dan Temanggung. Pada tahun 2011, dia mendapatkan beasiswa S2 dari *Australia Development Scholarships (ADS)* sampai akhirnya mendapatkan gelar *Master of Public policy and Management* di *The University of Melbourne*, Australia. Setelah lulus, ditempatkan di Kantor Pusat DJP selama hampir 3 tahun. Setelah lulus seleksi penerimaan dosen di lingkungan Kementerian Keuangan, pada bulan November 2016, dia pindah dari DJP ke Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, akhirnya pada Desember 2017 diangkat menjadi Dosen Tetap di PKN STAN dan sampai sekarang ditempatkan di Jurusan Pajak pada program studi Diploma III Pajak.

BAB 7

KEMISKINAN, INEKUALITAS DAN MOBILITAS

La Ode Turi

Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka

A. Pendahuluan

Polemik tentang penentuan strategi dasar pembangunan selalu saja muncul dalam pembangunan ekonomi. Polemik tersebut berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Di antara keduanya, manakah yang harus diprioritaskan, apakah yang diprioritaskan itu tentang pertumbuhan ekonomi atau pemerataan. Para pakar ekonomi berpendapat bahwa prioritas pada lajur pertumbuhan ekonomi tinggi dapat dipakai untuk mengurangi kemiskinan, sementara kemiskinan dalam kehidupan ekonomi di negara yang sedang berkembang sulit dihindari.

Kemiskinan masih sulit untuk diukur dengan pendekatan social. Namun secara teoritis, dengan indikator ekonomi, kemiskinan dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan

pengeluaran. Sementara yang digunakan oleh BPS untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran. Meningkatnya angka kemiskinan mengakibatkan (a) penurunan tingkat kesehatan masyarakat akibat kekurangan gizi, (b) munculnya demoralisasi yang ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas.

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, terutama bagi negara-negara yang berkembang dan tertinggal. Kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi, akan tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya.

Selama kurun waktu yang cukup panjang, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antardaerah yang sulit dihilangkan, namun hanya bisa dikurangi, agar keselarasan dalam sistem terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Ketimpangan pasti akan selalu ada baik di negara maju, sedang berkembang maupun di negara miskin. Ketimpangan secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya alam, sumberdaya manusia, fisik, teknologi dan modal. Sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan daerah, pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah kebijakan yaitu kebijakan otonomi daerah dan kebijakan

desentralisasi fiskal. Karena dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan optimalisasi pembangunan akan terjadi adanya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesetaraan kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas adanya mobilitas sosial, baik pada perubahan lebih tinggi, maupun lebih rendah dari sebelumnya atau mungkin hanya berpindah tanpa mengalami perubahan kedudukan. Mobilitas sosial dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan.

B. Kemiskinan

1. Pengertian

Kemiskinan, dalam pendekatan ilmu ekonomi mengarah pada kemiskinan absolut yaitu status kesejahteraan seseorang yang secara materi berada di bawah suatu batas minimal tertentu yang disebut garis kemiskinan (GK), yang dihitung berdasarkan nilai uang barang dan jasa sebagai standar hidup minimal. Garis kemiskinan berguna untuk mengklasifikasikan individu atau rumah tangga miskin dari miskin dan tidak miskin. Dengan diketahuinya tingkat kesejahteraannya (Y), maka jika $Y < GK$ disebut miskin, dan jika $Y > GK$ disebut tidak miskin.

Indikator kesejahteraan terdiri dari moneter dan non moneter. Indikator moneter meliputi: pendapatan vs konsumsi, sedangkan indikator non moneter yaitu *morbidity*, rasio pendidikan/dokter, *literacy rate*, *school enrollment*, *malnutrition*, dan aspek non ekonomi lain yang tidak mudah dikuantifisir. Indeks komposit: kombinasi indikator non dan moneter (misalnya: Indeks pembangunan manusia/HDI).

Kemiskinan secara ekonomi yaitu ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimal. Atau ketidakmampuan yang mendasar untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Beberapa definisi dan pengertian kemiskinan dari beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Menurut Cahyat (2007), kemiskinan adalah suatu situasi apabila seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.
- b. Menurut Mencher (Siagian, 2012) kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga

mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak.

- c. Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan kepemilikan kekayaan materil, tanpa mengabaikan standar atau ukuran fisiologi, psikologik dan sosial.
- d. Menurut Bradshaw (2005) kemiskinan merupakan situasi yang serba kekurangan makanan pokok, tempat berlindung, sarana kesehatan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang bermartabat.

Jadi disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi yang disebabkan karena tidak adanya kesempatan kerja dan akses modal karena diskriminasi atau ketidakadilan politik, sosial dan ekonomi, serta rendahnya kemampuan mereka untuk melawan penyebab kemiskinan, sehingga tidak terpenuhinya pendidikan yang cukup, rendahnya keamanan yang menjamin hidupnya, serba kekurangan dalam hal makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

2. Konsep dan Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005). Menurut Kartasasmita (1996) konsep kemiskinan berdasarkan pola waktu, yaitu (a) kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti itu pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi, (b) kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, (c) kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan, (d) kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Konsep kemiskinan menurut Sunyoto (2006) ada 3 yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang dirumuskan dengan cara membuat ukuran tertentu yang konkret. Ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup minimum anggota masyarakat dan berbeda-beda di setiap daerah. Contohnya kebutuhan masyarakat pedesaan

berbeda dengan perkotaan dan begitu pula antara masyarakat desa pertanian berbeda dengan desa nelayan. Meskipun demikian konsep ini sangat populer.

- b. Kemiskinan relatif. Dirumuskan dengan dimensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Konsep kemiskinan ini lazimnya diukur pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan ini diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kekayaan hidup. Konsep ini juga telah memperoleh banyak kritikan terutama karena sangat sulit menentukan bagaimana hidup yang layak. Ukuran kekayaan juga beragam dan terus berubah-ubah. Apa yang dianggap layak dalam komunitas tertentu boleh jadi tidak layak bagi komunitas lainnya. Dan apa yang dianggap layak pada saat ini boleh jadi tidak layak pada dua lima tahun ke depan.
- c. Kemiskinan subjektif. Dirumuskan berdasarkan kelompok kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu konsep kemiskinan ini dianggap lebih tepat apabila dipergunakan untuk memahami kemiskinan dan dirumuskan cara atau strategi yang efektif untuk penanggulangannya.

Ted K. Bradshaw mengemukakan bahwa umumnya kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa teori, diantaranya (1) teori kemiskinan individual (*the individual of poverty*), (2) teori budaya kemiskinan (*the culture of poverty*), (3) teori kemiskinan structural (*the structural of poverty*), dan (4) teori siklus kemiskinan (*the cycle of poverty*). Teori keempat (siklus kemiskinan) merupakan integrasi dari tiga teori pertama.

Teori kemiskinan structural (*the structural of poverty*), dimana orang-orang atau sekelompok orang yang mengalami diskriminasi atau berbeda dibawah distorsi secara politis, biasanya tidak memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lain, baik dalam hal meyampaikan aspirasi mereka maupun kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang baik. Kesempatan bekerja dan berusaha biasanya dibatasi oleh peraturan pemerintah, dan sulit mengurus berbagai dokumen administrasi.

Teori kemiskinan individual (*the individual of poverty*), yaitu kekuarangan-kekurangan pada individu untuk mengembangkan diri dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Budaya yang mempengaruhi pertumbuhan psikis individu dalam reaksinya dengan lingkungan yang mana budaya mereka telah distorsi, misalnya adanya budaya kemiskinan dalam lingkungan dimana individu tersebut bertumbuh.

Teori budaya kemiskinan (*the culture of poverty*); Distorsi budaya adalah penyimpangan atau berkurangnya kualitas nilai budaya dari budaya masyarakat asli yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Distorsi budaya biasanya ditandai adanya sistem kepercayaan budaya yang mendukung sub budaya kemiskinan.

3. Jenis dan Ukuran Kemiskinan

Berdasarkan faktor penyebabnya, kemiskinan terdapat tiga jenis yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural (Baswir, 1997). Chambers (dalam Nasikun, 2001) membagi kemiskinan ke dalam empat bentuk, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. **Kemiskinan natural**, yaitu keadaan seseorang atau kelompok masyarakat miskin, sejak awal memang sudah miskin, karena tidak memiliki sumber daya (alam, manusia dan pembangunan). Walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, akan tetapi mereka hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang rendah.

Kemiskinan kultural, mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya dan kebiasaan hidup mereka karena faktor budaya, seperti pemalas, pemboros, tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya.

Kemiskinan struktural disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi *asset* produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Kemiskinan absolut, apabila pendapatan seseorang atau masyarakatnya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan pada pendapatan mereka.

Faktor penyebab kemiskinan karena faktor individual, factor social, factor kultral dan factor structural (Suharto, 2005). Faktor individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan

psikologis individu yang miskin. Mereka miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari individu yang miskin dalam menghadapi kehidupannya. Faktor sosial, dimana kondisi lingkungan sosialnya yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, dan juga kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin, biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi. Faktor kultural atau kualitas budaya kemiskinan yang menghubungkan dengan kebiasaan hidup mereka, seperti sikap malas, menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja. Sedangkan faktor struktural, berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh sistem ekonomi *neoliberalisme* yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan dan pekerja sektor informal terjerat oleh pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Kemiskinan diukur berdasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun yang dibagi menurut wilayah pedesaan/perkotaan (Suryawati, 2005). Ukuran kemiskinan di daerah

pedesaan yaitu (1) miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (2) miskin sekali, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (3) paling miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai tukar beras per orang. Sedangkan ukuran kemiskinan di daerah perkotaan yaitu (1) miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (2) miskin sekali, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (3) paling miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai tukar beras per orang pertahun. Sedangkan Badan Pusat Statistik (2010), menetapkan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan ukuran menurut World Bank, menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional.

Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

4. Dimensi, Ciri-ciri dan Indikator Kemiskinan

Menurut Chambers (dalam Prastyo, 2010), kemiskinan merupakan *integrated concept* yang terdiri dari lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan proper. Proper dimaksudkan sebagai kepemilikan *asset* yang kurang atau akses yang rendah terhadap aliran lalulintas uang dan barang, terutama pangan. Permasalahan kemiskinan seperti halnya kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan. Dimensi kemiskinan proper dapat diukur antara lain melalui butir-butir pertanyaan pengeluaran rata-rata sebulan dan rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan; (2) ketidakberdayaan (*powerless*). Ketidakberdayaan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga atau kelompok dalam menentukan peristiwa-peristiwa yang menyangkut nasib dan peruntungannya dan hubungan-hubungan sosial dengan orang, keluarga atau kelompok lain. Umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari

seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan atau pun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dimensi ketidakberdayaan, kemiskinan antara lain dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan: (a) status penguasaan bangunan tempat tinggal, (b) status penguasaan tanah, (c) kondisi rumah atau bangunan tempat tinggal, (e) luas bangunan dan pekarangan, (f) jenis fondasi bangunan terluas, (g) jenis kerangka atap yang terbanyak; (3) kemiskinan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*). Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga yaitu situasi yang membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Situasi tersebut dapat diartikan sebagai penjualan barang atau tenaga kerja, hubungan utang piutang atau gadai, dan tindakan lain yang terpaksa dilakukan untuk mengatasi berbagai situasi darurat; (4) ketergantungan (*dependency*). Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin disebabkan oleh tingkat ketergantungan terhadap pihak lain sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan pencetakan pendapatan baru; (5) keterasingan (*isolation*). Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas

kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan. Dimensi isolasi dapat diukur melalui butir-butir pertanyaan antara lain (a) jarak terdekat dari dan ketempat fasilitas-fasilitas kendaraan umum, kesehatan, pasar, atau kelompok perkotaan, taman hiburan/rekreasi, tempat pendidikan (SD, SLTP, SLTA; (b) lama bersekolah (dalam jumlah tahun), (c) mendengarkan radio seminggu yang lalu, nonton TV seminggu yang lalu dan membaca koran/majalah seminggu yang lalu (Nasikun, 1993:3).

Sedangkan menurut Arsyad (2010) kemiskinan dapat ditinjau dari dua dimensi yaitu (1) dimensi absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang berdasarkan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang merupakan sebuah patokan seseorang untuk hidup secara layak. Seseorang termasuk dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya; (2) kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial, seiring terjadinya fenomena seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi ia masih jauh lebih rendah dibanding dengan masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan

golongan bawah maka akan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Jadi, kemiskinan itu relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Menurut Adisasmita (2006) indikator kemiskinan masyarakat desa yaitu (1) kurang kesempatan memperoleh pendidikan, (2) memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas, (3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian, (4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan), (5) menggunakan cara-cara pertanian tradisional, (6) kurangnya produktivitas usaha, (7) tidak adanya tabungan, (8) kesehatan yang kurang terjamin, (9) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial, (10) terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa, (11) tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih, dan (12) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

5. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Siagian (12012) terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan secara substansial, dimana dalam bentuk kekuranganmampuan, yang meliputi fisik, intelektual, mental emosional atau temperamental,

spitual, sosial psikologis, keterampilan dan *asset*. Sedangkan faktor eksternal yaitu factor yang berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan formal, budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, kondisi geografis yang sulit, tandus, dan terpencil, serta kebijakan publik yang belum berpihak pada masyarakat miskin.

Sedangkan penyebab kemiskinan menurut suara orang miskin (BKPK, 2001) yaitu (1) keterbatasan pendapatan, modal, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk modal sumber daya manusia, misalnya pendidikan formal, keterampilan dan kesehatan yang memadai, modal produksi, misalnya lahan dan akses terhadap kredit, modal sosial, jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik, sarana fisik (misalnya akses terhadap prasarana dasar seperti jalan, air bersih, listrik) di daerah yang terpencil; (2) kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan karena krisis ekonomi, kegagalan panen karena hama, banjir atau kekeringan, kehilangan pekerjaan (PHK) konflik sosial dan politik, korban kekerasan sosial dan rumah tangga, bencana alam (longsor, gempa bumi, peubahan iklim global, serta musibah seperti jatuh

sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang wabah penyakit); (3) tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari kejahatan, kesewenang-wenangan aparat, ancaman dan intimidasi, kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

C. Inekualitas

1. Pengertian

Ketimpangan (*inequality*) yang terjadi dalam perekonomian suatu wilayah merupakan hal yang umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu ada yang terdapat daerah maju dan daerah terbelakang. Ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif terhadap masyarakat setempat. Perbedaan tersebut membuat tingkat pembangunan berbeda-beda pula, sehingga menimbulkan GAP atau jurang kesejahteraan di daerah tersebut (Kuncoro, 2006).

Ketimpangan ekonomi (*economic nequality*) adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan dan peluang ekonomi antara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Ketimpangan dapat terlihat dan terjadi di

semua Negara sedang berkembang. Tingkat pengangguran yang akut dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat orang memiliki sedikit kesempatan untuk naik tangga sosial. Akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Penduduk yang terlahir dari keluarga miskin, tidak otomatis membuat orang tetap miskin. Akan tetapi jika mereka dapat mengatasinya dengan baik dan tekad yang kuat atau dengan bantuan eksternal, maka mereka bisa keluar dari kemiskinan. Misalnya program-program kesejahteraan pemerintah seperti perbaikan akses pendidikan, keterampilan, dan pelatihan adalah salah satu cara mengatasinya.

2. Ukuran Ketimpangan (inekualitas)

Ada beberapa ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur ketimpangan, diantaranya adalah:

- a. *Size Distribution*; Untuk mengukur ketimpangan ini dilakukan dengan cara menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin. Selanjutnya dapat diukur dengan melakukan perbandingan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan

nasional. Sedangkan tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk miskin menerima 17 persen pendapatan nasional.

- b. Kurva Lorenz; merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Kurva ini menggambarkan hubungan antara prosentase jumlah penduduk dengan prosentase pendapatan yang diterima (Arsyad, 1997).
- c. Indeks Gini; indeks gini dihitung dengan menggunakan kurve Lorenz. Caranya adalah membandingkan atau membagi bidang yang dibatasi oleh garis regionl dengan kurva Lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal. Angka yang didapat disebut indeks atau koefisien atau rasio gini. Indeks gini berkisar 0 dan 1. Gini sebesar 0 menunjukkan pemerataan sempurna. Semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama. Sedangkan gini indeks 1 berarti ada ketidakmerataan yang sempurna.

Ketimpangan ekonomi terkait erat dengan kesenjangan kekayaan dan pendapatan dalam perekonomian. Mereka yang kaya menjadi semakin kaya dan menguasai perekonomian. Sedangkan orang miskin harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka. Seringkali, akses ekonomi lebih mementingkan orang kaya daripada orang miskin,

sehingga pada akhirnya membuat ketimpangan menjadi semakin akut. Pemerintah seringkali menggunakan beberapa metrik untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Rasio Gini (atau indeks Gini) yang paling banyak digunakan. Selain itu, ada *Inequality-adjusted Human Development Index* (IHDI), yang mana mengukur pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan distribusinya di antara masyarakat.

3. Faktor Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Menurut Adelman dan Morris, terdapat delapan faktor yang mempengaruhi ketimpangan, yaitu:

- a. Tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada penurunan pendapatan perkapita;
- b. Inflasi adalah bertambahnya pendapatan uang tetapi tidak dengan pertambahan produksi barang-barang;
- c. Banyaknya investasi dalam proyek yang padat modal sehingga prosentase pendapatan modal dan tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran pun akan bertambah;
- d. Ketimpangan pembangunan antar wilayah;
- e. Mobilitas sosial yang rendah;

- f. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
- g. Ketidakelastisan permintaan negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang yang menyebabkan semakin memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan negara maju;
- h. Industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain menjadi hancur.

Ketimpangan ekonomi terdapat beberapa alasan diantaranya:

- a. Tingkat pengangguran yang tinggi; Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Peningkatan tingkat pengangguran memperlemah permintaan terhadap barang dan jasa. Tentunya akan mengakibatkan aktivitas produksi lesu. Bisnis mengurangi pekerja. Itu mengarah pada lebih banyak pengangguran dan semakin sedikit pendapatan bagi rumah tangga.
- b. Kondisi pekerjaan yang buruk; Upah di bawah standar internasional atau nasional masih terjadi. Hal ini membuat orang tidak bisa memperoleh

pendapatan yang layak. Sehingga, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mengakses layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan.

- c. Pendidikan dan keterampilan rendah; Hal ini dapat membatasi orang untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Orang miskin sulit untuk mengakses pendidikan atau pelatihan karena mereka tidak memiliki uang. Jadi, memberikan lebih banyak akses terhadap fasilitas semacam itu adalah salah satu solusi untuk keluar dari kemiskinan.
- d. Diskriminasi ekonomi; Menjadi minoritas atau imigran seringkali membuat orang mendapat perlakuan tidak adil ketika mereka mengejar kesempatan ekonomi atau mengakses layanan penting.
- e. Infrastruktur yang buruk; Orang yang tinggal di daerah terpencil sulit untuk mengakses barang esensial dari daerah lain. Selain itu, buruknya infrastruktur meningkatkan biaya logistik dan harga barang, membuat daya beli orang miskin semakin jatuh. Orang juga tidak mudah berpindah ke wilayah lain untuk mengejar kesempatan ekonomi yang lebih baik.
- f. Ukuran Keluarga; Lebih banyak anggota keluarga, lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika hanya mengandalkan kepala keluarga untuk

mencari nafkah, pendapatan seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.

- g. Konsentrasi Kekayaan; Orang kaya memiliki sumber daya yang lebih baik daripada orang miskin. Mereka menguasai sebagian besar dari perekonomian. Jika mereka harus bersaing, sebagaimana pasar bebas anjurkan, orang miskin berada pada posisi yang tidak unggul. Mereka sulit berhadapan dengan orang kaya. Hasilnya, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

Ada hubungan atau keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, UMK, PAD, jumlah penduduk dengan ketimpangan.

- 1) Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan;

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita sering dijadikan patokan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Besarnya pendapatan perkapita sangat erat kaitannya

dengan pertumbuhan penduduk, sehingga apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, maka tingkat pertumbuhan penduduk meningkat, begitu juga sebaliknya.

2) Hubungan antara IPM dengan ketimpangan;

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu daerah dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah tersebut. Peranan tingkat pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih tinggi dibanding dengan yang pendidikannya rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi. Teori tersebut sesuai dengan teori *human capital* yaitu apabila pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pembangunan dikarenakan pendidikan berperan didalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

3) Hubungan antara UMK dengan ketimpangan;

Upah minimum dapat mengurangi ketimpangan. Upah minimum *meredistribusi* pendapatan dengan menurunkan keuntungan

perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah. Dengan demikian menetapkan upah minimum, maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil.

4) Hubungan antara PAD dengan ketimpangan;

PAD merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan apakah memiliki kekayaan sumber daya atau tidak. Atau daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Akibat dari perbedaan tersebut kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidak heran apabila suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju dan terbelakang.

5) Hubungan antara jumlah penduduk terhadap ketimpangan.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang tinggi tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan.

D. Mobilitas

1. Pengertian

Mobilitas adalah pergerakan atau perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Mobolitas sosial adalah suatu pergerakan atau perpindahan seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Menurut para ahli, diantaranya Horton & Hunt bahwa mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Paul B. Horton, bahwa mobilitas sosial adalah sebuah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas social lainnya, atau dari strata satu ke strata lainnya. Sedangkan Kimball Young dan Raymond W. Mack, mengemukakan bahwa mobilitas sosial merupakan suatu gerak dalam struktur sosial yang mencakup sifat hubungan antar individu maupun kelompok dengan pola-pola tertentu yang mengatur organisasi di suatu kelompok sosial.

Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari status sosial tertentu ke status sosial lainnya. Mobilitias sosial dapat dialami oleh semua individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kesempatan berusaha dengan kecakapannya untuk mencapainya ke dalam status sosial yang lebih baik. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari

adanya sebuah mobilitas sosial, baik itu berubah menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya atau mungkin hanya berpindah tanpa mengalami perubahan kedudukan.

2. Bentuk dan Contoh Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok masyarakat ke status sosial lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Ada pula bentuk mobilisasi sosial antargenerasi dan mobilitas sosial intragenerasi. Perpindahan gerak sosial ini juga berupa perpindahan status sosial naik ke atas atau turun ke bawah. Bentuk mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Perpindahan tersebut bisa menjadi ke tingkat lebih rendah, yang lebih tinggi lagi atau terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada lapisan sosial yang sebelumnya. Contoh sosial climbing yaitu mobilitas ditandai dengan naiknya status seseorang yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Misalnya seorang karyawan memiliki kinerja yang sangat bagus kemudian ia berhasil naik pangkat menjadi manajer di kantornya. Contoh lain yaitu banyak atlet olahraga yang berangkat dari keluarga miskin, tetapi karena bakatnya dan disertai dengan latihan keras, ia berhasil meraih berbagai gelar juara yang mendatangkan

kekayaan. Sosial sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang, dari atas ke bawah. Adapun alasan dari adanya sosial sinking adalah memasuki masa pensiun, turun jabatan, maupun dipecat, berhalangan melaksanakan tugas. Contoh: polisi yang diturunkan pangkat jabatannya, karena melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Mobilitas sosial horisontal merupakan perpindahan status dalam lapisan yang sama. Pada mobilitas ini, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang.

Contoh: Seorang kepala sekolah yang dipindahkan bertugas ke sekolah lain karena masa kerja di sekolah lamanya sudah habis. Walaupun ia dipindahkan ke sekolah yang baru, namun jabatannya masih tetap sebagai kepala sekolah.

3. Dampak Mobilitas Sosial

Efek atau dampak yang ditimbulkan terkait dengan adanya proses mobilitas sosial, baik berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Dampak positif terdiri atas:

- a. Meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Hal ini disebabkan karena tiap individu atau kelompok tentu akan giat dan lebih semangat bekerja agar status sosialnya bisa naik, sehingga produktivitas akan meningkat karena adanya motivasi tersebut.

- b. Tiap individu memiliki kesempatan menaikkan status sosialnya; Dengan usaha dan kerja keras, seseorang bisa menaikkan status sosialnya, dimana tiap orang sama-sama memiliki kesempatan tersebut.
- c. Menjadi pendorong sekaligus mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan positif ini terjadi, apabila didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan salah satu cara yaitu dengan memperbaiki kualitas pendidikan.
- d. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat; Adanya gerak sosial juga akan mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, dikarenakan adanya faktor faktor pendorongnya.
- e. Meningkatkan integritas sosial; Mobilitas sosial yang naik keatas tentu akan memunculkan banyak tantangan baru yang berbeda. Hal ini kemudian akan turut mendorong masyarakat untuk selalu mencoba hal-hal baru menuju arah perubahan yang lebih baik.

Perubahan sosial yang terjadi tentunya akan mendapatkan respon yang berbeda-beda. Ada yang meresponnya sebagai sebuah tantangan, ada juga yang meresponnya sebagai bentuk penerimaan.

Penerimaan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya mobilitas sosial menjadi salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat.

Dampak negatif mobilitas sosial, yaitu: (1) kurangnya rasa solidaritas antar individu dan kelompok, (2) timbulnya gangguan psikologi; apabila individu atau kelompok sosial tidak mempunyai tekad untuk berubah ke arah yang lebih baik dan tidak bisa menerima keadaan dengan ikhlas. Mobilitas sosial menyebabkan banyak individu yang cemas dan takut jika saat jabatannya turun yang mengakibatkan status sosialnya juga ikut turun; (3) timbulnya gangguan antarkelas; Salah satu dampak negatif mobilitas sosial, jika dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan sosial yang didasarkan ukuran kekayaan atau kekuasaan yang disebut sebagai kelas sosial. Sehingga dengan adanya mobilitas sosial dapat mengakibatkan terjadinya konflik antarkelas sosial; (4) timbulnya konflik antara kelompok sosial. Kelompok sosial bisa terbentuk karena persamaan ideologi, agama, ras atau persamaan lain. Gerak sosial bisa berdampak pada terjadinya konflik antar kelompok sosial, misalnya seperti tawuran antar warga desa yang berbeda; (5) konflik antar generasi; Mobilitas sosial juga bisa menyebabkan terjadinya konflik antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama, sedangkan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan.

4. Faktor Pendorong dan Penghambat Mobilitas Sosial

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial adalah

a. Faktor struktural;

Faktor struktural, yaitu jumlah relatif dari posisi tertentu atau kedudukan yang lebih tinggi yang bisa diisi, maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor struktural terdiri atas (a) struktur pekerjaan (dalam kedudukan tinggi atau rendah) sehingga orang dapat terpacu untuk menaikkan kedudukan sosial ekonominya, (b) perbedaan fertilitas tingkat kelahiran berhubungan dengan jumlah jenis pekerjaan yang mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Hal ini berpengaruh pada proses mobilitas sosial yang akan berlangsung, (c) ekonomi ganda. Jika suatu negara menerapkan sistem ekonomi ganda atau gabungan tradisional dan modern akan berdampak pada jumlah pekerjaan, baik yang berstatus tinggi maupun rendah, sehingga mobilitas seseorang tergantung pada keberhasilan dalam melakukan pekerjaan di bidang yang diminati. Pada masyarakat modern, kenaikan status sosial sangat dipengaruhi oleh faktor prestasi yang diraih. Contoh adanya lowongan pekerjaan dapat mendorong pengangguran untuk melakukan mobilitas sosial. Ketidakseimbangan jumlah

lapangan kerja yang tersedia dibanding dengan jumlah pencari kerja.

b. Faktor individu,

Faktor individu merupakan kualitas seseorang baik dari segi pendidikan, penampilan, kecakapan, hingga keahlian. Faktor individu terbagi atas: (a) perbedaan kemampuan. Orang yang cakap atau memiliki kemampuan yang lebih mempunyai kesempatan dalam menentukan mobilitas sosial atau keberhasilan hidup. Contoh berbagai instansi terbaik membutuhkan sumber daya manusia dengan prestasi yang baik dari perguruan tinggi kenamaan dalam negeri dan luar negeri; (b) orientasi sikap pada mobilitas. Tiap orang punya sikap berbeda dalam mendorong prospek mobilitas sosialnya. Diantaranya yaitu melalui pendidikan, kebiasaan kerja, penundaan kesenangan, dan memperbaiki penampilan diri. Contoh, seorang karyawan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan rela mengikuti kursus untuk meningkatkan peluang karier dan posisinya; (c) kemujuran. Kemujuran berperan dalam mendorong kerja keras seseorang mencapai titik hasil dan respons yang diharapkan.

c. Status sosial,

Setiap manusia lahir dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Jika tidak puas dengan status pemberian tersebut, seseorang dapat mencari

kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi dengan melihat kemampuan dan jalan yang dapat ditempuh. Makin luwes sebuah struktur sosial di masyarakat, semakin mungkin seseorang mendapat kedudukan yang dicari sendiri.

d. Faktor ekonomi,

Faktor ekonomi dapat mendorong seseorang menjalani mobilitas. Contoh orang yang tidak lagi mau hidup di lingkungan dengan keadaan ekonomi berkekurangan akan berpindah ke tempat lain, baik migrasi atau urbanisasi. Kenyataan hidup yang serba kekurangan dapat mendorong manusia untuk giat bekerja dan merubah status sosialnya.

e. Situasi politik,

Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas suatu masyarakat dalam sebuah negara. Situasi yang tidak menentu berpengaruh ke situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas masyarakat ke daerah yang lebih aman. Situasi yang tidak sesuai dengan harapan, paham, atau hati nurani dapat mempengaruhi situasi keamanan dan kenyamanan seseorang bertahan di negerinya, meskipun negara tersebut memiliki sumber daya alam yang baik. Contohnya, warga yang mengungsi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih aman.

f. Kependudukan,

Faktor kependudukan (Demografi), yaitu pemukiman yang semakin padat dapat mendorong sebagian warga masyarakat mencari tempat kediaman lain dan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Dengan demikian, mobilitas secara geografis tersebut dapat mendorong mobilitas sosial.

g. Keinginan untuk melihat daerah lain.

Keinginan untuk melihat daerah lain, dapat mendorong masyarakat untuk melangsungkan mobilitas geografis dari satu tempat ke tempat lain. Contoh, berekreasi ke daerah tujuan wisata. Seorang turis ketika di negaranya ia berstatus sosial rendah, setelah pindah ke Indonesia dan menekuni beberapa usaha dan sukses, maka turis tersebut telah berubah status sosial menjadi kelas menengah atau bahkan kelas atas.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat bagi mobilitas sosial diantaranya adalah adanya kemiskinan, sistem lapisan sosial yang tertutup, dan kebudayaan masyarakat. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu, dan salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, karena dengan adanya pendidikan yang rendah, maka kualitas sumber daya manusia pun juga menjadi rendah. Akibatnya, kemampuannya

untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Misalnya dalam masyarakat feodal, hanya keturunan bangsawan yang dapat menduduki lapisan sosial kelas atas, sementara rakyat kecil tetap menempati lapisan kelas bawah.

Faktor kebudayaan masyarakat. Adakalanya masyarakat bersifat tertutup pada perubahan yang terjadi karena pengaruh dari luar kebudayaannya. Golongan masyarakat ini biasanya memegang teguh adat istiadatnya, sehingga masyarakatnya sulit melakukan mobilitas sosial karena tidak mau menerima perubahan yang ada. Faktor kebudayaan meliputi diskriminasi dan *stereotip gender*. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik, selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Sedangkan faktor *stereotip gender* dapat membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan, seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita juga bisa menghambat mobilitas sosial. Misalnya, ada pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi toh yang bekerja adalah suami. Nah, perilaku seperti itu dapat menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya meningkat.

E. Penutup

Setiap orang memiliki hak untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dan semakin meningkatnya angkatan kerja merupakan masalah utama dalam sektor ketenagakerjaan. Ketidaktersediaan lapangan pekerjaan bagi setiap angkatan kerja menyebabkan angka pengangguran meningkat, hal ini semakin diperparah bila terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan yang berhenti beroperasi. Masuknya Indonesia dalam kesepakatan MEA yang membuka persaingan tenaga kerja secara bebas dengan negara-negara Asia Tenggara semakin menambah beratnya tantangan dunia ketenagakerjaan pada masa kini. Terkait dengan hal tersebut diperlukan sumber daya tidak hanya terdidik akan tetapi juga terlatih sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dan berdaya dalam keluar dari kemiskinan.

Secara konseptual, faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia (rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan), motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan kekeluargaan (cara pandang yang menganggap orang tua sebagai beban), terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai (gaji yang rendah dan waktu kerja yang banyak), dan tidak kreatif. Selanjutnya faktor-faktor yang keluar dari kemiskinan, secara konseptual yaitu berinvestasi atau menabung, taat beragama (tidak putus asa, memiliki harapan untuk

berubah), membangun jaringan dan dukungan dari pemerintah dan swasta. Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial saja. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah beserta semua komponen pembangunan yang didasarkan pada pemberdayaan dan potensi sumber daya yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adelman, Irma, and Morris, Cynthia, 1973. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. California, Stanford University Press. <http://books.google.co.id/>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIMYKPM
- Badan Pusat Statistik. (2010). Badan Pusat Statistik Indonesia. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kekamin, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, 2005. <http://demografi.bgs.go.id/>
- Baswir, Revrison. (1997). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BKPK dan SMERU. (2001). *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian SMERU,
- Bradshaw, Ted. K. (2005). *Theories of Poverty and Anti Poverty Programs in Community Development*. Community Development: Journal of the Community Development Society, vo.38, No.1
- Cahyat, Ade, dkk. (2007). *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga*. Bogor: Cifor

- Horton, Paul B dan Chester L Hunt, 1984. *Sosiologi* Jilid Keenam. Jakarta: PT. Erlangga.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996) *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Penerbit PT. Pustaka. Jakarta: CIDESINDO.
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasikun. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Diktat Kuliah Program Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Prastyo, A. Agus. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Semarang: UNDIP PRESS.
- Sallatang, M.A. (1986). *Kemiskinan dan Mobilisasi Pembangunan*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas.
- Siagian, Matias. (2012). *Kemiskinan dan Solusi*. Medan: Grasindo Monoratama.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarto, K. (1993). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE – UI.
- Suryawati, Chriswardani. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang: UNDIP PRESS.

Tentang Penulis



La Ode Turi, lahir di Buton tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Buton dan Baubau. Kemudian menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar (UM) tahun 1987, S2 di Universitas Negeri Malang (UNM) tahun 1994, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2006. Saat ini penulis adalah dosen tetap di

Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka pada program studi Akuntansi. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan yang ditekuni, dengan melakukan beberapa penelitian dan pengabdian yang didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (DIKTI), serta penelitian kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, penulis juga mendedikasikan diri untuk menulis buku semenjak Desember tahun 2007.

BAB 8

PERPUTARAN MESIN EKONOMI SERTA PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN PASAR

Rahmat Joko Nugroho

Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

A. Perputaran Mesin Ekonomi

Perekonomian yaitu serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait dalam membantu menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Dalam perekonomian ada yang dikenal dengan sederhana atau perekonomian dua sektor dapat diartikan sebagai perekonomian tertutup yang hanya mencakup sector perusahaan (*business*) dengan sector rumah tangga (*house hold*). Perekonomian ini tidak dipungut pajak dan tidak terdapat kegiatan pemerintah. Perekonomian ini juga tidak berhubungan dengan ekonomi atau perdagangan luar negeri, berarti dalam perekonomian ini tidak diadakan kegiatan ekspor dan impor. Perekonomian ini atau yang biasa disebut Sistem Perekonomian Sederhana adalah Perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dari perekonomian dua sector ini pendapatannya didapatkan

dari faktor – faktor produksi antara lain gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta, dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri.

1. Pelaku kegiatan ekonomi

a. Rumah Tangga keluarga (konsumen)

Ada dua peran yang dimainkan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pertama sebagai konsumen. Sebagai konsumen, rumah tangga keluarga membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain berperan sebagai konsumen, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia faktor produksi, seperti tenaga kerja. Jasa sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga diberdayakan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain tenaga kerja, rumah tangga keluarga juga memiliki faktor produksi yang lain seperti tanah dan modal.

Pendapatan ini digunakan oleh rumah tangga keluarga untuk membeli barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, sebagian dari pendapatan ini juga harus dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Contohnya, pajak penghasilan. Jika

pendapatan mereka lebih besar dari pada pengeluaran, mereka dapat menyimpan sebagian dari pendapatan tersebut dilembaga keuangan.

Secara singkat, rumah tangga keluarga diasumsikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal dan kewirausahaan.
- 2) Total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi ini diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan.
- 3) Kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Mereka menjadi konsumen semua barang dan jasa. Itulah sebabnya rumah tangga keluarga disebut juga rumah tangga konsumen.
- 4) Rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan.
- 5) Jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi.

b. Rumah Tangga Produksi (Produsen)

Rumah tangga produsen atau sering disebut perusahaan, merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat.

Dilihat dari kepemilikannya, rumah tangga produsen atau perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan negara umumnya menekankan layanan kepada masyarakat tanpa berujuan mencari laba. Perusahaan swasta dan perusahaan negara berbentuk persero sebagian besar bertujuan mencari laba.

Rumah tangga produsen diasumsikan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa.
- 2) Rumah tangga produsen menyewa faktor-faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja dan modal dari rumah tangga keluarga.
- 3) Rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi, serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga.
- 4) Rumah tangga produsen membayar pajak

kepad pemerintah.

- 5) Rumah tangga produsen tidak memiliki simpanan.

Layanan sumber daya mengalir dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen atau perusahaan. Pembayaran mengalir dari rumah tangga produsen ke rumah tangga keluarga. Barang dan jasa mengalir dari perusahaan rumah tangga. Rumah tangga keluarga menggunakan pembayaran mereka terima untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan.

c. Masyarakat Luar Negeri

Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Tanpa hubungan dengan masyarakat luar negeri, keadaan ekonomi akan semakin buruk. Coba bayangkan bagaimana perekonomian Indonesia jika kita mengadakan hubungan dengan masyarakat luar negeri. Namun, banyak juga barang-barang yang harus diimpor dari luar negeri karena kita belum mampu membuatnya. Atau, walaupun kita mampu membuatnya, diperlukan biaya produksi yang tinggi sehingga harga produknya akan mahal. Selanjutnya, sebagian barang yang kita produksi juga kita ekspor ke

negara lain karena produksinya terlalu banyak atau karena ekspor ke negara lain akan memberikan keuntungan yang lebih banyak. Kedua kegiatan ini tentunya mengharuskan kita untuk selalu membuka hubungan dengan negara lain.

Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kerja sama dengan masyarakat luar negeri.

- 1) Pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan.
- 2) Hasil bumi dan hasil kerajinan Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk mendapatkan devisa.
- 3) Memungkinkan pengiriman tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Hal ini tentu akan membantu pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran.
- 4) Memungkina dilakukannya alih teknologi maju dari masyarakat luar negeri yang sangat bermanfaat bagi negara kita yang sedang membangun.
- 5) Memungkinkan negara kita untuk melakukan impor berbagai barang kebutuhan konsumsi dan barang-barang modal untuk menunjang pembangunan.

2. Peran pelaku kegiatan ekonomi

Peran konsumen

- a. Sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pada kegiatan ekonomi, peran konsumen sangat menentukan barang dan jasa yang diproduksi. Dewasa ini, sebelum barang diproduksi, riset pasar atas kebutuhan konsumen atau pemakaiannya dilakukan terlebih dahulu.
- b. Membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Barang akan mengendap di gudang jika belum terjual atau sebelum sampai ketangan konsumen. Konsumen berperan memperlancar arus barang.
- c. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai institusi yang berusaha mensejahterakan masyarakat (konsumen) dapat menetapkan peraturan-peraturan yang berpihak pada konsumen.
- d. Berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Rumah tangga atau konsumen sebagai pemilik tanah, tenaga kerja dan modal dapat menaikkan, bahkan jika perlu menurunkan harga-harga faktor produksi seperti sewa, upah dan bunga.

Peran produsen

- a. Sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perlu barang dan jasa. Barang dan jasa itu dihasilkan oleh produsen dengan mempergunakan faktor-faktor produksi.

- b. Sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kemakmuran negara.
- c. Sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan ekonomi yang terkait.
- d. Memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Produsen sebagai penghasil barang mempunyai kekuatan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.
- e. Mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen.
- f. Membayar harga barang faktor-faktor produksi. Pembayaran harga barang-barang faktor produksi yang diterima konsumen menambah pendapatan masyarakat.
- g. Melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Produsen sebagai wirausahawan berusaha untuk mencari atau menemukan cara-cara kerja baru agar harga pokok barang menjadi murah dan waktu melakukan produksi menjadi cepat.

3. Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi/circular flow diagram

Arus lingkaran kegiatan ekonomi atau circular flow diagram menggambarkan kegiatan ekonomi yang terus menerus berputar dan menghubungkan antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya.

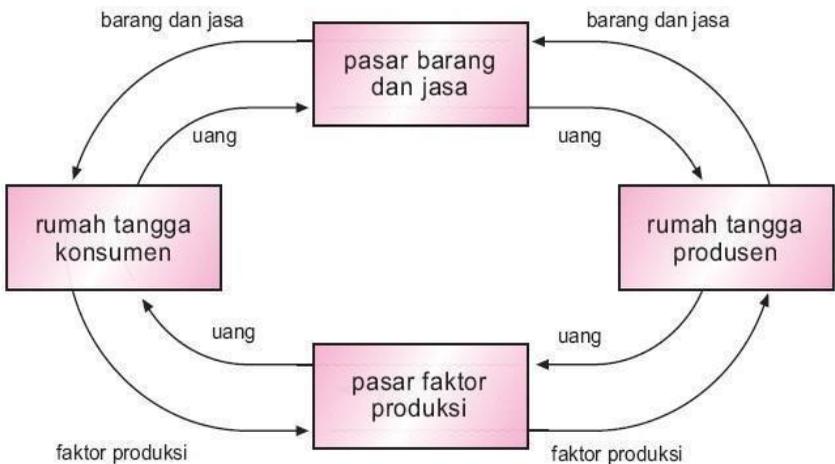
Rumah tangga produksi atau perusahaan memproduksi barang dan jasa, juga membeli sumber daya produksi. Mereka membayar upah, sewa, dan bunga kepada pemilik faktor produksi. Rumah tangga konsumsi, sebagai konsumen dan pemilik sumber daya produksi menerima pembayaran dari produsen, yang kemudian mereka belanjakan untuk barang-barang konsumsi. Sebagian uang itu diberikan pula pada pemerintah sebagai pajak. Pemerintah kemudian memakai pajak itu untuk memberikan pelayanan atau untuk membangun sarana dan prasarana perekonomian, yang kesemuanya adalah untuk rumah tangga konsumsi dan produksi. Rumah tangga konsumsi pun membeli barang-barang dari masyarakat ekonomi luar negeri (impor). Di lain pihak, rumah tangga produksi akan mengekspor sebagian produknya ke luar negeri. Kegiatan ekspor impor dengan masyarakat luar negeri ini harus mendapat izin dari rumah tangga negara (pemerintah). Pemerintah akan mencatat semua aktivitas yang terjadi dan akan dipakai sebagai bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Manfaat circular flow diagram antara lain adalah memperlihatkan proses kegiatan ekonomi yang terjadi di antara pelaku-pelaku ekonomi, membantu pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan perekonomian, membantu pemerintah melihat sumber pendapatan dan pengeluaran bagi negara, dan lain sebagainya.

a. Perekonomian dua sektor

Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi (masyarakat) dan rumah tangga produksi (perusahaan). Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini.

Gambar perekonomian dua sektor:



Dari gambar diatas, terlihat bahwa rumah tangga konsumen (RTK) adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli.

Dalam kegiatan ekonomi, Rumah Tangga (Konsumen) mempunyai dua peran penting, yaitu

- Sebagai Pelaku Konsumsi (Konsumen) Rumah Tangga Konsumen berperan sebagai pelaku konsumsi dapat dilihat dari pemanfaatan produk berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Sebagai Pelaku Produksi (Produsen) Rumah Tangga Konsumen juga berperan sebagai pelaku produksi yaitu dengan menyediakan

faktor produksi, seperti : tenaga kerja, tanah atau lahan, bahan baku, modal serta pengusaha (wirausaha). Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, konsumen memerlukan pemasukan berupa uang. Pendapatan konsumen dapat berasal dari perusahaan tempat bekerja, lahan/tempat yang disewakan, dan lainnya dalam bentuk : gaji, uang sewa, bunga modal, laba atau keuntungan dari hasil penjualan bahan baku. Interaksi inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya arus uang, barang dan juga jasa yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.

Rumah Tangga Produsen (RTP)

Rumah Tangga Produsen berperan dalam menyediakan barang dan jasa untuk Rumah Tangga Konsumen. Di Indonesia sendiri, Rumah Tangga Produsen (Perusahaan) dibagi menjadi 3 kategori yaitu BUMN, BUMS, dan Koperasi.

Sementara, menurut lapangan usahanya, Rumah Tangga Produsen di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu Industri Primer, Sekunder, dan Tersier.

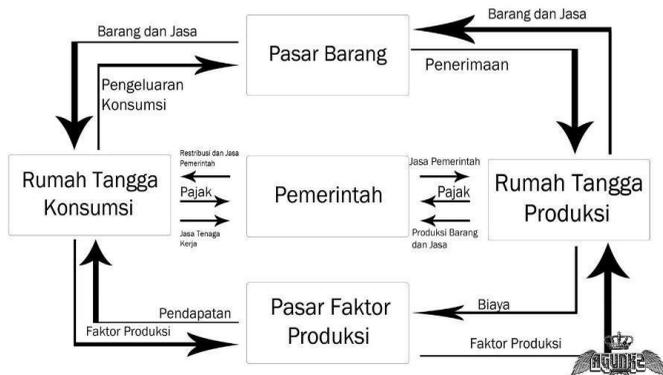
Berikut, beberapa peran Rumah Tangga Produsen (Perusahaan) dalam kegiatan ekonomi, antara lain:

- Memproduksi barang dan jasa setelah diproduksi, barang dan jasa yang dihasilkan didistribusikan kepada konsumen sehingga dapat dengan mudah dibeli ataupun dikonsumsi.
- Memanfaatkan berbagai faktor pendukung produksi untuk melakukan proses produksi. Faktor pendukung produksi bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, modal dan juga pengusaha.
- Sebagai penyalur barang dan jasa (distributor). Tidak sedikit perusahaan yang langsung mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan untuk rumah tangga (konsumen), pemerintah, masyarakat luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri.
- Menjamin kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi dengan cara memberikan UMR di atas rata-rata, atau dengan menambahkan bonus.
- Bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja sekaligus menjamin hari tua atau pensiunan karyawan. Hal ini dapat terealisasi dengan mengikutsertakan setiap karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- Menambah penghasilan Negara melalui Pajak. Perusahaan wajib membayar pajak kepada

Negara. Hal ini juga sekaligus membantu Pemerintah dalam menaikkan pendapatan Negara melalui pajak.

b. Perekonomian tiga sektor

Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut.



Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum.

Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

c. Perekonomian empat sektor (perekonomian terbuka)

Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka

adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding eksportnya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya.

Dalam perekonomian empat sektor kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeriterdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga produksi), dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi.

Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga produksi), dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi, sehingga membentuk sistem

perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sudah tidak adalagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain yang dalam perdagangan internasional disebut ekspor dan impor. Dimana dalam transaksi pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing (devisa).

Pasar secara sederhana merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Adapun defnisi pasar adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan

pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Mekanisme tersebut tidak hanya dimengerti sebagai cara pembeli dan penjual bertemu dan kemudian berpisah, tetapi lebih dari itu, dimaknai sebagai tatanan atas berbagai bagian, yaitu para pelaku seperti pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh para pelakunya, serta regulasi pemerintah yang saling terkait, berinteraksi,

Pasar sendiri memiliki tiga fungsi, yaitu: fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sedangkan menurut fisiknya, jenis pasar dibedakan ke dalam pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara langsung. Barang yang dijual belikan juga tersedia di pasar tersebut. Sedangkan pasar abstrak merupakan pasar tidak nyata dimana transaksi antar penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui telepon, internet, dan lain lain.

Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli akan menentukan tingkat harga suatu komoditas (barang atau jasa) dan jumlah komoditas yang diperjual belikan. Sehingga dalam ilmu ekonomi bila kita berbicara tentang pasar, maka secara otomatis kita akan membicarakan mengenai pertemuan antara penjual dan pembeli,

barang/jasa yang dijual, serta harga tertentu atas barang/jasa yang dijual tersebut.

B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan konsumsi. Konsumsi itu dapat dilihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas ini diwujudkan dengan berbagai tindakan. Tindakan itu antara lain membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, terminal dan taman umum. Pemerintah juga berusaha menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha, misalnya dengan menjaga stabilitas harga-harga dan memberlakukan peraturan yang mendorong iklim berusaha. Peran pemerintah lainnya yang tak kalah penting adalah melakukan distribusi pendapatan agar tidak timbul jurang pemisah yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Distribusi pendapatan ini misalnya dilakukan pemerintah melalui penerapan sistem perpajakan yang dapat membantu masyarakat miskin. Pajak yang diterima pemerintah antara lain digunakan untuk pembayaran transfer. Pembayaran transfer adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat meskipun mereka tidak menyediakan barang dan jasa.

Contohnya adalah tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dana sosial, dan tunjangan veteran.

Pengeluaran pemerintah merupakan penghasilan bagi rumah tangga keluarga dan pendapatan bagi perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Dengan diperkenalkannya pemerintah dalam aliran sirkuler, total nilai produksi perusahaan tidak lagi sama dengan nilai pendapatan rumah tangga. Rumah tangga menerima pendapatan dari pemerintah sehingga total nilai pengeluaran dalam perekonomian adalah sama dengan total pendapatan yang diterima.

Pemerintah mempunyai 3 peran penting dalam kegiatan ekonomi, meliputi Pemerintah Sebagai Produsen, pemerintah berperan sebagai penyedia jasa layanan umum untuk kepentingan masyarakat. Misalnya;

1. Minyak Bumi yang dihasilkan oleh Pertamina
2. Listrik dihasilkan oleh PT PLN Persero
3. Penyelenggara Pos yaitu PT POS Indonesia
4. Di bidang Pendidikan, dalam bentuk Sekolah Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
5. Di bidang kesehatan dalam bentuk Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah

Pemerintah Sebagai Konsumen, pemerintah tentunya juga membutuhkan jasa ataupun barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

Sebagai contoh: Di dalam sebuah gedung Pemerintahan, pemerintah membutuhkan lemari, meja, komputer dan juga membutuhkan barang keperluan kantor seperti kertas, tinta, pensil, dan masih banyak lagi.

Pemerintah sebagai Pengendali Kegiatan Perekonomian. Selain menjadi produsen dan konsumen, pemerintah juga berperan sebagai pengendali kegiatan perekonomian melalui berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan rakyat.

- 1) Membuat Kebijakan Fiskal (kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran Negara)
- 2) Membuat dan menetapkan Kebijakan Moneter (kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan laju inflasi)
- 3) Membuat Peraturan Keuangan Internasional
- 4) Penetapan harga eceran

Pemerintah dapat menentukan harga eceran untuk melindungi konsumen maupun produsen, misal harga gabah, gula pasir.

- 5) Penetapan Pajak.

Pemerintah dapat menarik pajak dalam perekonomian, sbg bentuk peranan pemerintah dalam meratakan pendapatan penduduk. Pajak brg mewah

biasanya lebih tinggi dibandingkan pajak untuk barang impor yg digunakan input proses produksi.

6) Pemberian Subsidi

Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen agar produsen dpt menghasilkan brg/jasa yang kompetitif terutama agar bisa bersaing dengan barang barang impor.

Daftar Pustaka

- Alam S. Ekonomi kelas X SMA/MA. Erlangga, 2013
- Billas, Richard A., *Microeconomic Theory*, 2nd ed. Singapore: McGraw-Hill, 1998
- Blanchard, Oliver, *Macroeconomics*. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 2000
- Case, Karl E. and Ray C. Fair, *Principles of Economics*, 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1996
- Chiang, Alpha C., *Fundamental Methods of Mathematical Economics*, 3rd ed. Manila: McGraw-Hill, 1984
- Djohanputro, Bramantyo, *Prinsip-prinsip Ekonomi makro*, PPM, 2005
- Ferguson, C.E. and J.P. Gould, *Microeconomic Theory*, 4th ed. Kuala Lumpur: Irwin, 1975
- Lipsey, Richard G., et al, *Economics*, 9th ed. Singapore: Harper Collins, 1990
- Putong, Iskandar, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*: Ghalia Indonesia, 2003
- Rahardja, Prathama, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Universitas Indonesia, 1999
- Salvatore, Dominic, *Teori Mikro Ekonomi*, Erlangga, 1992
- Sicat, Gerardo P., *Economics*. Manila: National Book Store, 1983

Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi*, Teori Pengantar Rajawali
Grasindo Persada, 2010

Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* , Rajawali
Grasindo Persada, 2010

Wahyu Adji dkk. *Ekonomi. Gelora Aksara Pratama*, 2007

Wijaksoni, Erick dan Endang Mulyadi. *Ekonomi kelas X
SMA/MA*. Yudihistira, 2013

Tentang Penulis



Rahmat Joko Nugroho. Penulis dilahirkan di Kebumen Jawa Tengah. Pendidikan Dasar diselesaikan SD Negeri Jemur Pejagoan, dilanjutkan di SMP Negeri I Kebumen, dan SMA Negeri I Kebumen. Setelah selesai kemudian penulis melanjutkan kuliah di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Kemudian Bekerja pada Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan sebagai tenaga dilapangan di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan. Selanjutnya penulis bekerja di PT Warnert Lambert Indonesia di tempatkan di Bandar Lampung, kemudian penulis dipindahkan ke Samarinda Kalimantan Timur, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata dua di Universitas Mulawarman Samarinda dan mendapat beasiswa CIFOR dalam penyelesaian studinya. Selanjutnya penulis mendirikan CV Tiara Agrosejahtera yang bergerak dalam bidang konsultan. Selain itu penulis juga sebagai tenaga pengajar di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Disela kesibukanya juga menulis beberapa buku Manajemen Agribisnis, Dasar Manajemen Bisnis, Jurnal dan Pengabdian Masyarakat

BAB 9

KEUANGAN DAN PENGELUARAN NEGARA, SERTA BEBAN PAJAK

Yunita Wulandari, M.H

A. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara. Semua aspek negara termasuk hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinyatakan milik negara dikenal dengan keuangan negara. Dalam rangka perwujudan tujuan tersebut maka keuangan negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Peraturan yang dimaksud terdiri dari *Indische Comptabiliteitswet (ICW)*, *Indische Bedrijvenwet (IBW)* dan *Reglement voor het Administratief Beheer (RAB)*. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggung

jawaban keuangan negara digunakan *Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR)*.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiscal, dan kebijakan moneter.

Keuangan Negara juga dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi objek, subyek, proses, dan tujuannya. Dari sisi objeknya, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan subyeknya, Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana sebelumnya tersebut yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari prosesnya, Keuangan

Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana sebelumnya tersebut mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Sedangkan dari sisi tujuannya, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana sebelumnya tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bidang pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi 3 area, yaitu bidang pengelolaan fiscal, bidang pengelolaan moneter, dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Adapun cakupan pembahasan terkait keuangan negara meliputi:

1. Penerimaan negara
2. Pengeluaran negara
3. Hutang dan pinjaman
4. Kebijakan keuangan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan fiscal dan kebijakan keuangan internasional dan mengelola hutang pemerintah.

Penerimaan keuangan negara berasal dari dalam dan luar negeri, untuk dalam negeri yaitu:

- 1) Keuntungan dari perusahaan-perusahaan; (BUMN, Perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN)
- 2) Pajak;
- 3) Menciptakan uang baru;
- 4) Meminjam pada bank;
- 5) Pinjaman kepada masyarakat;
- 6) Denda-denda;
- 7) Cukai¹;
- 8) Retribusi²

Sedangkan yang berasal dari luar negeri yaitu:

- 1) Pinjaman-pinjaman baik pinjaman kepada negara maupun pinjaman kepada organisasi-organisasi negara
- 2) Hadiah-hadiah dari rampasan perang

¹ Cukai dapat diartikan pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor dan barang konsumsi

² Retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa

Dalam pelaksanaannya, keuangan negara dikelola berdasarkan asas-asas umum berikut:

- a. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, karena pada dasarnya setiap sen uang negara adalah uan rakyat, dan akuntabilitas ini harus sesuai dengan ketentuan peratran perundang-undangan yang berlaku.
- b. Profesionalitas, yang artinya mengutamakan keahlian dan kompetensi yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- d. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yang dalam praktiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Selain 5 asas diatas, untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara juga didasarkan pada asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisitas. Penjelasan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- Asas Tahunan, memberikan persyaratan yaitu anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislative (DPR).
- Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, artinya semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karenanya, anggaran adalah anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/ tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif; jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif; penggunaan anggaran hanya diperuntukkan jenis/ macam anggaran yang telah ditentukan.

Menghadapi perekonomian negara, khususnya terhadap ancaman yang ada maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini telah memenuhi syarat Produk Hukum sehingga diputuskan untuk menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, sedangkan anggaran negara berarti rencana keuangan yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dasarnya, APBN mengandung perkiraan jumlah pendapatan, perkiraan jumlah belanja dan perkiraan pembiayaan.

Secara singkat, APBN terbagi menjadi 2 bagian kelompok besar, yaitu anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara. Anggaran pendapatan negara merupakan sasaran penerimaan negara yang diharapkan dapat dihimpun dalam tahun anggaran bersangkutan, yaitu meliputi berbagai jenis pendapatan dalam negeri, serta pendapatan negara yang bersumber dari bantuan luar negeri.

Sedangkan anggaran belanja negara, selain dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran rutin guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dituangkan ke dalam berbagai jenis program dan kegiatan serta pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah, juga dipergunakan untuk belanja pembangunan yang dituangkan dalam berbagai jenis program dan proyek pembangunan pada berbagai sektor dan subsektor.

Rencana keuangan negara ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab demi kemakmuran rakyat. APBN juga sebagai alat pengontrol kegiatan pemerintah sehingga pemerintah memiliki acuan yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dalam waktu tersebut. Siklus

pengelolaan APBN secara keseluruhan dilakukan melalui:

1. Perencanaan APBN
2. Penyusunan APBN
3. Pembahasan APBN
4. Penetapan APBN
5. Pelaksanaan APBN
6. Pelaporan dan Pencatatan APBN
7. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi berdasarkan Pasal 3 ayat 4 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

Adapun penjelasan fungsi APBN yaitu:

- **Fungsi otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Anggaran publik merupakan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara atau daerah untuk satu periode di masa yang akan datang, tetapi sebelum dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya anggaran publik yang dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif dan ditetapkan dengan undang-undang (lihat kembali pengertian APBN ditetapkan dengan undang-undang) yang isinya bagaimana mengalokasikan dan menarik uang dari rakyat, maka harus dilihat sebagai sebuah hubungan kekuasaan (*power relation*) antara eksekutif, legislatif dan rakyat sendiri. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil

tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

Arti penting perencanaan sebagai acuan penyusunan APBN diperjelas dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga tahun berikutnya. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/ Lembaga disusun dengan menggunakan pendekatan: 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; 2) Penganggaran Terpadu; 3) Penganggaran berbasis kinerja.

Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. Ini penting dilakukan agar APBN terhindar dari kondisi *insolvabilitas* (krisis anggaran). Karena itu pula dalam usulan anggaran tersebut disertai dengan prakiraan maju. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Negara/ Lembaga untuk menghasilkan dokumen RA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Sedangkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Karena itu

dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja ini diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

- **Fungsi pengawasan.** Fungsi pengawasan juga sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka akan terlihat apakah pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam UU APBN atau tidak. Dalam prakteknya fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. BPK menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Disamping itu, pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh inspektorat jenderal/inspektorat utama pada masing-masing departemen/Lembaga dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada semua departemen/lembaga (termasuk BUMN). Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal tersebut diatas bersifat *post audit*. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
- **Fungsi alokasi,** berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Melalui fungsi alokasi, maka APBN terutama sisi pengeluaran ditujukan untuk sektor-sektor pembangunan. Fungsi alokasi tidak hanya ditujukan untuk masalah pengangguran saja tetapi juga akan disesuaikan dengan tujuan-tujuannya atau “sesuai dengan apa yang seharusnya”.

Misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus mendapatkan prioritas utama. Atau untuk meningkatkan sumberdaya manusia, maka alokasi anggaran untuk pengembangan sumberdaya manusia harus cukup dominan. Dengan demikian fungsi alokasi akan mengarahkan pengeluaran anggaran pemerintah pada orientasi peran yang akan dilakukan oleh pemerintah.

- **Fungsi distribusi**, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Melalui fungsi distribusi, komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain-lain, akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Atau, pembukaan daerah terisolasi akan cenderung menguatkan *terms of trade* kelompok masyarakat terpencil. Manfaat marjinal tindakan ini yang terbesar biasanya akan dinikmati oleh kelompok

masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan mereka yang berpenghasilan tinggi, dimana yang terakhir ini sebelumnya telah memiliki akses (meskipun terbatas).

Peran distribusi APBN berkaitan juga terhadap usaha untuk memperbaiki kegagalan mekanisme pasar (*market failure*) dalam mengangkat kelompok masyarakat yang berpendapatan bawah dan memperbaiki distribusi pendapatan. Fungsi ini berjalan secara paralel dengan aspek penerimaan dimana dengan sistem pajak yang progresif akan memberikan beban pajak yang "fair" sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan dan kemudian disalurkan melalui pengeluaran pemerintah.

Distribusi juga dilakukan untuk pembangunan daerah tertinggal. Saat ini Indonesia menghadapi pembangunan yang tidak merata sehingga masih banyak daerah yang tertinggal. Fungsi distribusi juga akan menunjukkan bahwa APBN merupakan produk kebijakan pemerintah yang bersifat politis. Adanya pengeluaran untuk subsidi adalah salah satu contohnya. Walaupun secara teori subsidi baik BBM maupun non BBM merupakan distorsi di dalam perekonomian, namun pemerintah tetap menganggarkannya di dalam APBN.

Hal tersebut diyakini tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dalam

mempertahankan tingkat konsumsinya namun juga untuk meredam terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam prakteknya fungsi tersebut menjadi bagian dari penyusunan APBN. Fungsi ini juga menjadi bagian dari politik anggaran.

- **Fungsi stabilisasi**, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat.

Dalam stabilisasi tersebut pada dasarnya dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. APBN juga dapat mengurangi dampak *inflasioner* dengan melakukan sterilisasi anggaran, yaitu meningkatkan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia atau mempercepat pembayaran beban utang luar negeri. Dengan demikian dalam penetapan APBN, mengacu kepada UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia memberikan pendapat

dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN (Pasal 54 Ayat 2).

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu: Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, dan penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

- 1) Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
- 3) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Adapun asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas:

- 1) Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
- 2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- 3) Penajaman prioritas pembangunan

- 4) Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang Negara

C. Pajak

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya 'huistaks' yaitu pada tahun 1816. *Huistaks* adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi saat itu, kita (rakyat Indonesia) harus menyetornya ke pemerintah Belanda. Berikutnya menunjukkan bahwa jenis - jenis pajak bertambah lagi, yaitu :

- 1) Tahun 1920 ada *Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting* alias Pajak Penghasilan.
- 2) Tahun 1925 ada *Ordonantie op de Vennootschapbelasting* alias Pajak Perseroan atau sekarang dikenal dengan nama Pajak Penghasilan Badan.

Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, kerajaan - kerajaan yang ada di Nusantara ini juga sudah menerapkan pajak pada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Hingga saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis

pajak yang ada. Sebagai warga Negara yang baik, tentunya kita akan membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena semuanya juga untuk kesejahteraan kita Bersama. Atau sejarah lain menerangkan bahwa Pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB.

Semua ketentuan perpajakan diatur oleh Undang-Undang. Adapun perundang-undangan dibidang perpajakan yang “dilahirkan” sesuai apa yang dikehendaki oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya beberapa undang-undang :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 4) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang Undang RI No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut berlakunya)
- 7) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- 9) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 10) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 ini mengubah :

- a) UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- b) PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- c) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- d) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- e) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- f) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- g) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

- h) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- i) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- j) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disamping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan lain, yaitu retribusi, sumbangan, bea, dan cukai.

- 1) Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal

balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contoh tiket masuk objek wisata.

- 2) Sumbangan ialah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu pula contoh: sumbangan bencana alam
- 3) Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh: bea masuk, bea keluar dan bea balik nama.
- 4) Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Contoh: cukai tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris), cukai etil alkohol/ etanol dan cukai minuman mengandung alkohol .

Pelaksanaan pajak yang dilakukan pemerintah memiliki dua fungsi yaitu: sebagai Fungsi penerimaan (*budgetair*) dan Fungsi pengatur (*regulerend*). Fungsi penerimaan yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak juga dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu berdasarkan golongan, sifat, pemungut dan pengelolanya. Hal tersebut sebagaimana uraian berikut ini:

1) Menurut golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut pemungut dan pengelolanya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:

- i. Pajak Daerah Tingkat I: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

- ii. Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

Daftar Pustaka

- Budiman, Nita Andriyani, Sri Mulyani, Dianing Ratna Wijayani. 2019. *Perpajakan*. (Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Lebih Dekat dengan Pajak*. Jakarta.
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Unegeri Yogyakarta.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. (Yogyakarta: Buku Litera)
- Soeriaatmadja, Arifin. 2010. Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Solihin, Dadang 2006. *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*. (Jakarta: Artifa Duta Prakarsa)
- Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)
- <https://peraturan.bpk.go.id/>

Tentang Penulis



Yunita Wulandari, M.H lahir di Jember, 3 Juni 1994. Ia adalah lulusan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dan menyelesaikan pendidikan Masternya di bidang Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020. Email: yunita.wulan@unida.gontor.ac.id dan IG: @yunitawulan_36

BAB

10

TEORI PERSAINGAN MONOPOLI

Yoesoep Edhie Rachmad

A. Pengertian Monopoli

Monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat pada satu perusahaan saja, dimana perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti. Monopoli merupakan keadaan pada satu perusahaan yang memasok seluruh pasar persaingan monopolistik. Ketika perusahaan memiliki kekuatan penuh untuk mengendalikan pasar.

Struktur pasar yang bertentangan dengan ciri-ciri persaingan sempurna yaitu pasar monopoli. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui bentuk pasar monopoli, yaitu situasi pasar dimana hanya ada satu penjual produk, dan produk tersebut tidak ada penggantinya (no-substitutes).

Konsep monopoli mendahului pengembangan pemasaran sebagai disiplin yang berbeda dan didasarkan pada era di mana produk, pasar, masyarakat, komunikasi dan konsumen sangat berbeda. Secara khusus, gagasan

tradisional monopoli memfokuskan pada persaingan dengan bisnis lain. Beberapa penyebab monopoli adalah sebagai berikut :

1) Paten.

Seorang penemu suatu output tertentu pasti mendaftarkan temuannya itu kepada pemerintah dan mendaftarkan hak paten agar orang lain tidak diperbolehkan memproduksi maupun menjual outputnya itu. Bila pemerintah memperkenankan, jadilah ia monopolis bagi output hasil temuannya itu. Biasanya pemerintah menetapkan batasan waktu bagi berlakunya paten tersebut. Sesudah batas waktu itu terlewati, output itu menjadi terbuka untuk diproduksi dan dijual oleh siapa pun juga.

2) Pemberian Pemerintah.

Sebuah perusahaan dapat memperoleh hak monopoli karena hak itu diberikan oleh pemerintah kepadanya. Pemerintah yang memberikan hak monopoli itu dan pemerintah juga yang dapat mencabut pemberiannya jika memang dipandang perlu.

3) Penguasaan Input.

Seorang monopolis dapat terus memegang monopoli dari suatu produk tertentu, dan akan

menguasai pasar input yang menjadi bahan pokok produk.

4) Penguasaan Metode Produksi.

Seseorang menemukan cara membuat produk tertentu, tapi dia tidak mau mendaftarkannya kepada pemerintah untuk mendapatkan Hak paten, melainkan merahasiakan cara pembuatan produk tersebut, sehingga ia pun menjadi monopolis bagi produk itu. tapi apabila ada orang lain bisa yang secara kebetulan mampu membuat output dan teknologi yang sama, maka pada saat itulah hilang monopoli yang selama ini dipegang oleh penemu pertama tadi.

5) Pasar terlalu kecil untuk ditempati lebih dari satu firm.

Melihat keberhasilan produsen tersebut, produsen lain mencoba pula memasuki pasar dengan membuat produk yang sama. Akan tetapi pasar terlalu kecil, sehingga gugurlah pendatang baru itu karena kalah dalam persaingan pemasaran.

6) Monopoli Alamiah (Natural monopoly).

Monopolis mendapatkan hak monopolinya karena kehebatan manajemen. Sebuah perusahaan

ditata sedemikian baiknya sehingga dapat dicapai efisiensi yang bagus sekali.

Monopoli mempunyai pengaruh dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, ada beberapa kebaikan dan keburukan dalam pasar monopoli. Monopoli mempunyai pengaruh yang tidak selalu lebih buruk daripada persaingan sempurna, berikut pengaruh yang baik adalah:

- 1) Monopoli mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi baru dalam produknya. Keuntungan monopoli yang didapatkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk pengembangan dan tujuan penelitian.
- 2) Dalam kasus monopoli alamiah, di mana luas pasar terbatas dan skala ekonomis yang besar, maka sangat tidak efisien bila diharapkan dalam bentuk industri persaingan sempurna. Sebab bila dilakukan yang terjadi justru timbulnya banyak perusahaan kecil, di mana masing- masing perusahaan kecil ini tidak bisa memanfaatkan skala ekonomis yang besar, hal ini akan menyebabkan industri menjadi tidak efisien

Monopoli mempunyai pengaruh yang tidak selalu lebih baik terhadap kesejahteraan masyarakat, berikut pengaruh yang kurang baik adalah:

- 1) Hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen, karena volume produksi lebih kecil dari volume output yang optimal. Hal ini akan membuat kesejahteraan konsumen yang semakin berkurang.
- 2) Menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor produksi. Konsumen akan dirugikan karena harga jual di atas harga keseimbangan yang berdasarkan mekanisme harga pasar. Sementara bagi pemilik faktor produksi dirugikan oleh dengan dibayarnya faktor produksi dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar dari output yang dihasilkan.
- 3) Memburuknya kondisi makro ekonomi nasional, sebab jumlah output riil industri lebih sedikit daripada kemampuan sebenarnya. Karena tidak seluruh faktor produksi terpakai sesuai dengan kapasitas produksi. Kondisi ini akan menimbulkan pengangguran yang akan berdampak buruk bagi perekonomian secara menyeluruh.
- 4) Memburuknya kondisi perekonomian internasional, hal ini terjadi karena munculnya inefisiensi. Sebab efisiensi menjadi faktor penentu dalam perdagangan bebas. Monopoli yang menimbulkan inefisiensi akan berdampak buruk bagi kondisi perekonomian internasional.

Ada beberapa mekanisme yang dapat mengurangi efek negatif monopoli adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah menetapkan undang-undang anti-Trust.
- 2) Pemerintah mendirikan perusahaan tandingan di dalam pasar tersebut dengan tujuan untuk memberi persaingan kepada si monopolis untuk membatasi kekuasaan monopolinya.
- 3) Pemerintah membuka kran impor sehingga barang buatan luar negeri bisa memberikan persaingan kepada barang dalam negeri.
- 4) Pemerintah membuat ketentuan khusus terhadap operasi perusahaan monopoli tersebut, misalnya dengan menetapkan harga yang seharusnya di bawah harga monopolis, atau dengan penetapan tingkat output yang optimum bagi masyarakat. Dapat pula dengan mengenakan pajak kepada monopolis.

Monopoli dan Diskriminasi Harga

Berikut ini karakteristik pasar persaingan monopoli adalah sebagai berikut :

- 1) Pasar Monopoli adalah industri satu perusahaan dimana barang atau jasa hanya dihasilkan oleh pasar monopoli tidak dapat dibeli dari tempat lain. Sehingga para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut.
- 2) Tidak Mempunyai Barang Penggantinya. Seperti contoh listrik. Dimana yang mirip aliran listrik dari

barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listik karena, ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi, setrika, magic com atau alat elektronik lainnya.

- 3) Tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam Industri perusahaan monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli membuat perusahaan-perusahaan lain untuk tidak ada kemungkinan memasuki industri tersebut. Ada beberapa hambatan yang membuat masuk ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar.
- 4) Dapat mempengaruhi penentuan harga dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya, dalam hal ini perusahaan monopoli bertindak sebagai penentu harga atau price setter.
- 5) Tidak begitu membutuhkan promosi iklan, oleh karena itu perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam industri. Perusahaan

monopoli tidak memerlukan promosikan barangnya, tetapi perusahaan monopoli tetap sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

Dalam kondisi yang memungkinkan perusahaan monopoli melakukan diskriminasi harga, berikut ini syarat-syarat diskriminasi harga adalah :

1. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain.
2. Sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga.
3. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan dimasing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Keuntungan mungkin tidak akan diperoleh dari kebijakan ini apabila permintaan dan elastisitas permintaan tersebut menjadi bersamaan dikedua pasar tersebut.
4. Kebijakan dalam diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya yang melebihi pertambahan keuntungan yang akan diperoleh. Apabila biaya yang dikeluarkan melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, dan tidak terdapat manfaat untuk menjalankan kebijakan tersebut.
5. Produsen dapat memanfaatkan beberapa perilaku konsumen yang tidak rasional. Dimana saat produsen melakukan penjualan dengan produk yang sama,

tetapi terdapat perbedaan dalam kemasan produk, merek produk, dan promosi iklan.

B. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Pasar Persaingan Monopoli.

Monopoli dapat terjadi disebabkan karena beberapa perusahaan lain dianggap tidak menguntungkan untuk masuk ke dalam pasar, atau memang terhalang (atau ada maksud untuk dihalang-halangi) masuk pasar. Halangan untuk dapat masuk ke dalam pasar disebut dengan istilah *Barriers to Entry*, yang dalam hal ini dibedakan atas dua jenis, adalah :

1. Alasan teknis (*technical barriers to entry*).

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada (*existing firm*). Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal seperti :

- a. Perusahaan memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus (*special knowledge*) yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Perusahaan monopoli yang memiliki suatu sumber daya yang tertentu dan unik, yang tidak dimiliki perusahaan lain. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik (*istimewa*) yang tidak dimiliki oleh orang lain atau perusahaan lain.

- b. Tingginya efisiensi memungkinkan perusahaan mempunyai biaya yang menurun. Makin besar skala produksi, biaya marjinal semakin menurun sehingga biaya produksi per unit semakin rendah (decreasing). Suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan dimana biaya produksi mencapai minimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang wujud dipasar. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomi yang demikian sifatnya, perusahaan dapat menurunkan harga barang apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga adalah sedemikian rendahnya sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dulu berkembang. Keadaan ini mewujudkan pasar monopoli.
- c. Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengontrol sumber faktor produksi yaitu alam, manusia dan lokasi produksi. Perusahaan Monopoli Alamiah (Natural Monopolist) adalah perusahaan yang memiliki daya monopoli karena mempunyai kemampuan teknis.

2. Karena alasan hukum atau undang-undang (legal barriers to entry)

- a. Undang-undang dan Hak Khusus Kebanyakan monopoli murni tercipta karena alasan hukum atau undang – undang, bukan karena alasan teknis atau ekonomis sehingga mereka memiliki hak khusus untuk mengelola industri tersebut seperti Badan-badan Usaha Milik Negara. Hak khusus juga tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga oleh satu perusahaan kepada perusahaan lainnya seperti agen tunggal, importir tunggal, lisensi, dan bisnis waralaba (franchise). Agar usaha mengembangkan teknologi dengan tujuan untuk menciptakan barang baru akan memberikan keuntungan kepada perusahaan, haruslah pemerintah melarang dan menghukum kegiatan menjiplak. Langkah ini dilakukan dengan memberikan hak paten kepada perusahaan yang mengembangkan barang baru.
- b. Hak Paten atau Hak Cipta. Hak paten merupakan monopoli berdasarkan hukum, karena pengetahuan-pengetahuan yang merupakan kekayaan intelektualnya yang menciptakan daya monopoli secara teknis. Hak Cipta (Copy Rights) merupakan bentuk lain dari hak paten, yaitu merupakan suatu jaminan hukum untuk menghindari penjiplakan. Dimana hak cipta tertentu diberikan kepada penulis buku dan penggubah lagu. Dengan adanya hak cipta tersebut hanya penulis atau penggubah lagu saja yang

mempunyai hak ke atas penerbitan buku yang ditulis dan lagu yang digubah.

C. Monopoli dan Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi yang mungkin terdapat dalam monopoli terdapat adalah sebagai berikut harga yang lebih tinggi, jumlah produksi yang lebih rendah, dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan di dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa ahli ekonomi berpendapat dimana monopoli dapat menimbulkan dampak yang yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan membuat distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih tidak merata. Beberapa peran monopoli dan kesejahteraan masyarakat terlihat dari :

1. Keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati oleh produsen monopoli untuk jangka waktu yang panjang. Keuntungan monopoli biasanya lebih dari normal, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan, karena terdapat perbedaan dengan keuntungan perusahaan lain. Apabila ada monopoli yang hanya menerima keuntungan normal, bukan berarti hanya kebetulan tetapi dapat diartikan tidak terdapat adanya kasus ketidakadilan.
2. Volume produksi lebih kecil dari volume output yang telah optimal atau level maksimum. Berarti monopoli tidak efisien bagi masyarakat karena adanya pemborosan.

3. Ada beberapa unsur eksploitasi terhadap :

- a) Konsumen, dengan ditetapkannya harga jual diatas ongkos produksi dari unit terakhir outputnya.
- b) Pengusaha atau Pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan, dimana Biaya Tenaga kerja (upah buruh) lebih rendah dari pada sumbangannya dalam bentuk output.

Sejarah menunjukkan monopoli tidak selalu buruk, justru perusahaan monopolilah yang menunjukkan suatu dinamika untuk berkembang lebih besar karena keuntungan monopoli bisa digunakan untuk tujuan-tujuan penelitian dan pengembangan yang kemudian diikuti dengan inovasi-inovasi dalam tehnologi. Pengendalian monopoli untuk kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengaturan Perusahaan Monopoli

Adanya biaya sosial monopoli menyebabkan timbulnya upaya pengaturan monopoli dan pembatasan perusahaan monopolis. Tujuan pengaturan monopoli tidak hanya menekan biaya sosial monopoli, tetapi juga mengubah biaya sosial monopoli menjadi suatu manfaat sosial. Dengan pengaturan, monopoli dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengendalian Harga

Pemerintah dapat mendorong perusahaan monopoli itu untuk meningkatkan output sampai tingkat yang harus diproduksi industri jika diatur menurut batas persaingan sempurna. Peraturan ini juga mengurangi keuntungan perlu monopoli itu.

3. Pajak Lump-sum

Pemerintah bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan perusahaan monopoli tanpa mempengaruhi output atau harga komoditi, yaitu dengan membebankan pajak lump-sum (seperti pajak izin ataupun pajak keuntungan).

4. Pajak Per-Unit

Pemerintah bisa mengurangi keuntungan monopoli dengan membebankan pajak per-unit. Tetapi hal tersebut berdampak perusahaan monopoli bisa mengalihkan sebagian beban pajak perunit kepada para konsumen, dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan output komoditi yang lebih kecil.

5. Diskriminasi Harga

Seorang perusahaan monopoli dapat meningkatkan outputnya dan keuntungannya untuk suatu tingkat output tertentu dengan melakukan

diskriminasi harga. Salah satu bentuk diskriminasi harga terjadi apabila perusahaan monopoli menetapkan harga-harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda. sehingga unit terakhir dari produk yang dijual di setiap pasar dapat diberlakukan dengan harga yang sama. Hal ini sering kali disebut sebagai diskriminasi harga tingkat ketiga.

Daftar Pustaka

- Blythe, J. 2006, *Principles and Practice of Marketing*, Thomson Learning, London.
- Boediono, 1996. *Ekonomi Mikro Cet.ke 18*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ida Nuraini, 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Malang: UMM Press.
- Sadono Sukirno, 2002. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi Cet.ke-18*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suherman Rosyidi, 2012. *Pengantar Teori Ekonomi, Cet 10*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Zubair Hasan, 2007. *Introduction to Microeconomics: An Islamic Perspective*, Selangor: Prentice Hall.

Tentang Penulis



Yoesoep Edhie Rachmad, S.E, M.M, CIPA. Lulus S-1 di Program Studi Akuntansi FEB Universitas Dr. Soetomo, dan lulus S-2 di Program Magister Manajemen Universitas Dr. Soetomo. Saat ini sedang meneruskan jenjang pendidikan S-3 di Program Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Telah

mengikuti dan mendapatkan gelar non akademik CIPA yaitu Certified International Person Assessor. Berprofesi sebagai Konsultan Manajemen, Keuangan dan Perpajakan, Assesor, Motivator dan aktif di STAI Al-Mahdi, FakFak, Papua Barat.

BAB

11

PERDAGANGAN INTERNASIONAL, KURS VALUTA, DAN LEMBAGA EKONOMI INTERNASIONAL

Yuliana Br Purba

A. Perdagangan Internasional

Perdagangan luar negeri mempunyai arti yang sangat penting bagi negara terbelakang. Perdagangan luar negeri memberikan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

1. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya perdagangan internasional dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya.

Contohnya seperti ketika orang berbelanja barang impor dari *marketplace* tertentu.

Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada tiga bentuk hubungan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

- a. Terjadinya pertukaran *output* atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama
- b. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara
- c. Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun yang lalu serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, hingga politik suatu negara.

Di beberapa negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan *Gross Domestic Product* atau GDP.

Perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Perdagangan internasional bilateral, Perdagangan internasional regional, dan Perdagangan internasional multilateral. Sementara menurut bentuknya, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor

dan impor, konsinyasi, *package deal*, *border crossing* dan lainnya.

2. Tujuan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan *Gross Domestic Product* atau GDP, artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama satu tahun lamanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut ada peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran, berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional dan banyak hal lainnya.

Selain tujuan utama, perdagangan internasional juga memiliki tujuan lain antara lain:

a. Menaikkan devisa Negara

Tujuan yang pertama dari kebijakan perdagangan internasional adalah guna menaikkan devisa negara. Melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengeksport barang yang ada di dalam ke luar negeri dan begitu juga sebaliknya.

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produksi nasional bruto (GDP) dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun diluar negeri dan warga negara yang tinggal di dalam maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP, jadi hanya faktor produksinya saja.

c. Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor

Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang, sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang tersebut.

d. Eksistensi tenaga kerja

Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen.

e. Memenuhi Kebutuhan di Negara Lain.

Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Oleh karena itu dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nabatinya, yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe. Begitu juga sebaliknya.

Perdagangan internasional dilakukan dan disetujui oleh kedua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain, ketika negara tersebut tidak dapat memproduksi kebutuhan yang dimaksud.

3. Manfaat Perdagangan Internasional

Setelah mengetahui definisi serta tujuan dari perdagangan internasional, juga perlu mengetahui apakah manfaat yang dapat diperoleh suatu negara yang melakukan kerja sama perdagangan internasional tersebut. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi

negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional.

Selain itu, dengan perdagangan internasional, tidak akan ada negara yang kehilangan sumber dayanya, sehingga setiap warga negara dapat menikmati standar kehidupan lebih baik.

Perdagangan internasional juga memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap PDB negara serta memiliki peran dalam meningkatkan perdagangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB dari negara perdagangan tersebut.

4. Keuntungan Melakukan Perdagangan

Keuntungan yang dapat diperoleh sesuatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri menurut pandangan Mazab Merkantilis dan Klasik sebagai berikut:

- a. Pandangan Mazab Merkantilis, yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad keenambelas dan ketujuhbelas, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya keluar negeri.
- b. Ahli-ahli konomi Klasik, menganalisis dengan lebih mendalam lagi perananan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. David Ricardo, misalnya

mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Teorinya menerangkan keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan, merupakan teori yang hingga sekarang menjadi dasar kepada teori perdagangan luar negeri. Berdasarkan teori tersebut negara-negara digalakkan menjalankan system perdagangan bebas. Yang dimaksud dengan perdagangan bebas adalah system perdagangan luar negeri dimana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan.

5. Beberapa Keuntungan Melakukan Perdagangan

a. Memperoleh Barang yang Tidak Dapat Diproduksi di dalam Negeri

b. Memperoleh keuntungan dari Spesialisasi

Sebab yang utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Keuntungan dimaksud antara lain: (a). Faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisien. (b) Penduduk negeri itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang.

c. Memperluas pasar Industri-industri dalam Negeri

Beberapa jenis industri telah dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum mesin-mesin sepenuhnya digunakan. Artinya industry masih dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungannya apabila masih terdapat pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu.

d. **Menggunakan Teknologi dan Meningkatkan Produktivitas**

Perdagangan luar negeri memungkinkan sesuatu negara untuk mempelajari Teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

6. Keuntungan Mutlak dan Keuntungan Berbanding

a. Keuntungan mutlak.

Yang diartikan dengan keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh sesuatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksi barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain.

b. Keuntungan berbanding

Perdagangan luar negeri juga dapat dilakukan walaupun salah satu negara tersebut lebih efisien dari negara yang lain di dalam memproduksi kedua barang.

7. Kerugian dari Perdagangan Internasional

Berikut kerugian yang akan dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional, yaitu:

- a. Kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri.
- b. Barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif
- c. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia maka akan ada eksploitasi sumber daya alam.
- d. Terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat.
- e. Persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar.

8. Contoh Perdagangan Internasional

Untuk lebih memahami penjelasan mengenai perdagangan internasional, berikut beberapa contoh dari aktivitas perdagangan internasional yang dapat diperhatikan:

a. Perdagangan internasional ekspor

Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya adalah ekspor sumber daya alam seperti lobster dan lain sebagainya. Selain ekspor lobster,

juga sering melakukan ekspor sumber daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit, rempah-rempahan, kopi hingga pasir ke negara tetangga.

Selain ekspor yang dilakukan pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya ekspor baju dengan motif maupun design khusus yang dibuat oleh orang lokal.

b. Perdagangan internasional impor

Kebalikan dari ekspor, perdagangan internasional impor berarti negara membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. Selain melakukan ekspor, Indonesia juga tidak jarang melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Walaupun terkadang masih menjadi pro dan kontra, Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras.

c. Perdagangan internasional barter

Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut.

Contoh kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut.

d. Perdagangan internasional konsumsi

Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi saja, tetapi juga melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi.

Contohnya dengan melakukan pelelangan pada suatu produk, negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi, maka berhak mendapatkan produk tersebut dan produk tersebut boleh diperjual belikan secara bebas tan terkecuali.

9. Kebijakan Perdagangan Internasioanl

Ada delapan kebijakan perdagangan internasional, sebagai berikut:

- a. Tarif, merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor

- b. Subsidi ekspor, pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri
- c. Pembatasan impor, pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor.
- d. Pengekangan ekspor secara sukarela, merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela
- e. Persyaratan kandungan lokal, aturan mengenai bagian tertentu yang dari unit fisik.
- f. Subsidi kredit ekspor, wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli.
- g. Pengendalian pemerintah
- h. Hambatan birokrasi, merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor.

10. Faktor Penggerak Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional bukan hanya seputar impor dan ekspor barang, tetapi penggunaan atau pemakaian jasa-jasa lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti pengangkutan, pembayaran internasional, dan kebijakan pemerintah negara lain. Terjadinya perdagangan internasional harus didasari dengan kepercayaan dan saling memberikan keuntungan.

Beberapa faktor penggerak terjadinya perdagangan internasional sebagai berikut:

a. Perbedaan sumber daya alam

Adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, perdagangan internasional harus dilakukan supaya kuantitas dan kualitas produksi di suatu negara bisa berjalan dengan lancar.

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang berbeda-beda. Karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembanagan iptek di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain.

c. Terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha

Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi (barang) maka barang itu lebih baik di jual ke negara lain. Siapa tahu negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang

menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan.

d. Warga negara lain memiliki kertarikan pada suatu produk yang sama

Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk dalam negeri. Dengan adanya hal seperti ini maka perdagangan internasional harus dilakukan karena untuk memenuhi keinginan atau kesukaan warga dari negara tersebut.

e. Adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain

Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah melakukan perdagangan internasional karena dengan perdagangan internasional maka kedua negara atau lebih akan mendapatkan keuntungan yang sama.

f. Adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi

Kemudahan informasi yang didapatkan membuat kehidupan sosial budaya pada warga

negara lain menjadi mudah diketahui. Jika sosial dan budaya dalam negeri sudah diketahui oleh negara lain maka bisa saja warga negara itu berwisata ke dalam negeri sehingga pariwisata dalam negeri akan memperoleh keuntungan.

g. Memperluas pasar

Dengan memperluas pasar maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Oleh karena itu, setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar.

Dengan memperhatikan faktor-faktor penggerak itu maka perdagangan internasional dapat mendorong sebuah negara untuk menghasilkan produk yang spesial atau diunggulkan. Bukan hanya itu, perdagangan internasional bisa memperluas pasar sehingga produk yang dihasilkan mudah terjual dan bisa mempelajari teknik produksi dari negara modern dari negara lain.

11. Faktor Penghambat Perdagangan Internasional

Meskipun perdagangan internasional sudah ada sejak lama, tetapi masih menghadapi berbagai

kendala. Pada umumnya ada banyak faktor yang menyebabkan perdagangan internasional mengalami hambatan, sebagai berikut:

a. Nilai tukar yang berbeda

Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat.

b. Kebijakan ekonomi internasional

Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor maka perdagangan internasional menjadi terhambat.

c. Terjadinya konflik pada suatu negara

Konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik pada suatu negara maka proses perdagangan internasional menjadi terganggu.

d. Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama

Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun, kegiatan tersebut harus melewati bea impor dan bea ekspor pada suatu negara sehingga kegiatan impor dan ekspor membutuhkan waktu yang lama.

e. Kualitas sumber daya manusia yang rendah

Kualitas sumber daya manusia yang rendah yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional.

f. Organisasi ekonomi regional pada suatu negara

Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang. Namun, perkembangan tersebut menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional karena hanya negara anggota dari organisasi tersebut yang diberi akses ketika melakukan perdagangan internasional.

12. Syarat Perdagangan

Cara melihat keuntungan perdagangan luar negeri terdistribusi secara adil kepada negara-negara yang terlibat adalah dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam syarat perdagangan.

Yang diartikan dengan syarat perdagangan adalah perbandingan di antara indeks harga-harga barang yang diekspor oleh sesuatu negara dengan indeks harga barang-barang yang diimpor itu. Secara formula ssebagai berikut:

$$\text{Syarat perdagangan} = \frac{P_x}{P_m} \times 100$$

Dimana P_x adalah indeks harga barang-barang yang diekspor dan P_m adalah indeks harga barang-barang yang impor sesuatu negara.

B. Kurs Valuta

1. Pengertian Kurs

Kurs salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal dengan sebutan nilai tukar (*exchanger rate*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kurs adalah nilai mata uang yang dimiliki sebuah negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat

diukur dengan mata uang luar negeri serta bias dibeli atau ditukar dengan mata uang lain.

2. Pengertian Valuta Asing

Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Valuta asing atau biasa disebut dengan valas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valas juga termasuk ke dalam salah satu bagian devisa. Valas dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional.

3. Kurs Valuta Asing

Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Juga dapat didefinisikan sebagai jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs valuta di antara dua negara kerap kali berbeda di antara satu masa dengan masa yang lainnya.

4. Mata Uang yang Aktif di Valuta Asing

Nilai mata uang asing akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, mata uang asing yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan di dalam forex. Apa itu forex? Forex merupakan akronim dari *foreign exchange* yang memiliki arti yaitu suatu transaksi pertukaran mata uang.

5. Fungsi Valuta Asing

Seiring perkembangan dunia, khususnya dalam bidang ekonomi membuat sector perdagangan ikut berkembang sehingga banyak negara yang melakukan perdagangan ikut berkembang sehingga banyak Negara yang melakukan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional dibutuhkan alat pertukaran mata uang dunia dan alat itu adalah valuta asing.

Valuta asing memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Alat tukar dan pembayaran internasional.

Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang. Dalam perdagangan internasional baik berupa barang atau jasa alat tukar menukar yang digunakan adalah valuta asing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa valuta asing berfungsi sebagai uang yang

digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional baik berupa barang atau jasa.

b. Alat pengendali kurs

Kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara akan terus berubah sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang negara lain dan alat itu adalah kurs valuta asing. Penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi atau mengendalikan nilai tukar matang uang menjadi lebih mudah.

c. Alat memperlancar perdagangan internasional.

Dalam perdagangan internasional membutuhkan kelancaran dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu yang banyak. Valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendala dengan mata uang yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin bertransaksi di perdagangan internasional memerlukan kurs valuta asing.

6. Jenis-jenis Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing merupakan pasar yang digunakan sebagai transaksi pertukaran mata uang. Bagi seseorang yang baru ingin masuk ke dalam transaksi pertukaran mata uang perlu mengetahui jenis-jenis pasar valuta. Dengan mengetahui jenis-jenis pasar valuta asing maka para pemula tidak salah langkah dalam bertransaksi pertukaran mata uang. Adapun jenis-jenis pasar valuta asing sebagai berikut:

a. Pasar *Spot*

Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan ketika sedang ingin berlibur ke luar negeri

b. Para *trader*

Pasar *trader* biasanya memainkan transaksi yang ada di pasar spot. Misalnya, ketika sudah memasuki libur masa sekolah maka permintaan Dolar Singapura akan bertambah karena banyak keluarga yang akan pergi ke Singapura.

c. Pasar *Forward*

Pasar *forward* adalah pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Biasanya, nilai kontrak pembelian mata uang di pasar ini bisa mencapai jutaan dolar AS.

Transaksi *forward* biasanya dilakukan oleh individu atau lembaga baik dari bank atau non bank yang sudah memiliki kontrak khusus pada suatu bank sehingga transaksi ini bisa dikatakan sebagai transaksi yang terjadi antar bank.

d. Pasar *Currency Futures*

Pasar *Currency Futures* adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak *Currency Futures*. Satu jenis kontrak *Currency Futures* bisa memastikan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang bisa ditukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan, pada dasarnya *Currency Futures* terdapat dua jenis objek transaksi, yaitu valuta asing (*financial futures market*) dan komoditas (*commodity futures market*). Adapun manfaat dari pasar ini yakni membatasi resiko (*hedging*) dan tujuan spektakuler.

e. Pasar *Currency Option*

Pasar *Currency Option* adalah pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak *Currency Option*. Kontrak *Currency Option* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *Currency Call* dan *Currency Option Put*

7. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

Jenis-jenis transaksi valuta asing terbagi menjadi empat jenis, sebagai berikut:

a. Transaksi spot

Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing (valas) atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu dua hari kerja

Ada beberapa cara yang digunakan ketika menyerahkan dana dalam transaksi spot, yaitu:

1) *Value today (Value tod atau Cash)*

Value today adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari dilakukannya suatu transaksi.

2) *Value tomorrow (value tom)*

Value tomorrow adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah pembuatan kontrak.

3) *Value spot*

Value spot adalah penyerahan dana yang dilakukan selama dua hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Biasanya cara seperti ini dilakukan pada transaksi internasional

b. Transaksi *forward*

Transaksi *forward* adalah transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi penyelesaiannya akan dilakukan dimasa depan (tanggal yang sudah disepakati). Karena hal itulah transaksi ini disebut juga dengan transaksi berjangka.

c. Transaksi *swap*

Transaksi *swap* adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga *spot* yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga *forward*. Dengan demikian, transaksi ini merupakan gabungan dari transaksi *spot* dengan transaksi *forward*.

d. Transaksi *option*

Transaksi *option* adalah suatu kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga, rentang waktu, dan tanggal akhir tertentu.

8. Sistem Kurs Valuta Asing

Valuta asing mempunyai beberapa sistem dalam penggunaannya. Adapun sistem-sistem tersebut dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

a. Sistem kurs tetap (*fixed exchanger rate*)

Sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral (pemerintah). Dalam sistem kurs ini, bank sentral atau pemerintah memiliki peran dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilai kurs tidak sesuai dengan standar atau aturan yang sudah ditetapkan.

b. Sistem kurs mengambang (*floating exchanger rate*)

Sistem kurs bebas atau mengambang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri.

c. Sistem kurs mengambang terkendali (*Controlled floating exchanger rate*)

Sistem kurs mengambang terkendali adalah suatu system nilai valuta asing yang dimana pemerintah

dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing.

9. Jenis-jenis Kurs Valuta Asing

Setelah mengetahui pengertian dan sistem kurs valuta asing, rasanya belum lengkap jika tidak membahas jenis-jenis kurs valuta asing. Kurs valuta asing terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kurs jual, kurs beli, kurs tengah. Berikut penjelasan ketiga jenis kurs tersebut.

a. Kurs jual

Kurs jual adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau *money changer* kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan Rupiah dengan valuta asing.

b. Kurs beli

Kurs beli adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau *money changer* kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menukarkan valuta asing dengan Rupiah

c. Kurs tengah

Kurs tengah adalah kurs yang diberikan bank atau *money changer* antara kurs jual dan kurs beli (kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian dibagi dua).

Pada dasarnya terdapat dua cara di dalam menentukan kurs valuta asing:

- a. Berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas.
- b. Ditentukan oleh pemerintah

10. Penentuan Kurs Dalam Pasar Bebas

a. Permintaan Mata Uang Asing

Permintaan penduduk Jepang ke atas mata uang dollar Amerika Serikat mempunyai ciri-ciri berikut:

- 1) Semakin tinggi harga dollar Amerika Serikat, semakin sedikit permintaan ke atas mata uang tersebut.
- 2) Semakin rendah harga dollar Amerika Serikat, semakin banyak permintaan ke atas mata uang tersebut.

b. Penawaran Harga Mata Uang Asing

- 1) Semakin tinggi harga dollar Amerika Serikat, semakin banyak penawaran mata ke uang tersebut.
- 2) Semakin rendah harga dollar Amerika Serikat, semakin sedikit penawaran mata uang tersebut.

11. Penentuan Kurs Pertukaran Oleh Pemerintah

- a. Permintaan mata uang asing
- b. Penawaran mata uang asing
- c. Penentuan harga mata uang asing

12. Contoh Perhitungan Kurs Valuta Asing

Suatu hari karyawan sedang diberikan pekerjaan ke luar negeri dan mendapatkan bayaan dari perjalanan itu sebesar Rp 45.000.00,00.

Pada saat melakukan pekerjaannya, nilai tukar yang berlaku sebagai berikut:

Kurs jual Rp 15.000,00 per US \$1

Kurs beli Rp 14.500,00 per US \$1

Berapa bayaran yang akan diperoleh karyawan dalam nilai Dolar Amerika Serikat?

Karyawan akan menukarkan mata uang Rupiah ke Dolar Amerika Serikat, sebagai berikut cara perhitungannya.

Rp. 45.000.000,00 : Rp. 15.000 = US \$3.000

Jadi uang yang dimiliki karyawan dalam bentuk Dolar Amerika sebesar US \$3.000

13. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs

- a. Perubahan dalam citarasa masyarakat
- b. Perubahan harga barang ekspor dan impor
- c. Kenaikan harga umum (inflasi)
- d. Perubahan suku bunga dan tingkat pengambilan investasi
- e. Pertumbuhan ekonomi

14. Kurs Pertukaran Dan Negara Pembayaran

Sistem penentuan valuta asing menimbulkan efek yang sangat berbeda ke atas neraca pembayaran. Sistem kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar berkecenderungan akan menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus dalam neraca pembayaran, sedangkan kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah berkecenderungan menimbulkan neraca pembayaran yang tidak stabil.

C. Lembaga Ekonomi Internasional

1. Defini Lembaga

Lembaga adalah organisasi yang tujuannya melakukan sebuah penyelidikan keilmuan ataupun melakukan suatu usaha. Dalam perekonomian, yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga yang melakukan suatu usaha perekonomian. Lembaga ekonomi berarti suatu organisasi yang melakukan kerjasama dalam hal perekonomian, mulai dari hal produksi, distribusi dan konsumsi.

Terbentuknya lembaga ekonomi internasional, tidak luput dari terbentuknya kerjasama internasional. Kerjasama adalah suatu hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak yang saling berhubungan satu sama lain. Kerjasama internasional sendiri berarti hubungan yang dijalin antara negara satu dengan negara yang lain yang menggunakan prinsip saling menguntungkan dan menganut keadilan antara pihak yang berhubungan.

2. Definisi Ekonomi Internasional

Ekonomi internasional adalah industri yang membahas, meneliti dan juga menganalisis transaksi serta berbagai konflik yang muncul di dalam ekonomi internasional itu sendiri dalam studinya. Salah satunya adalah kegiatan ekspor dan impor. Termasuk masalah komersial, keuangan dan mata uang serta

organisasi bisnis pemerintah/non-pemerintah yang menjaga hubungan interaksi antar negara termasuk dalam ekonomi internasional.

Definisi ekonomi internasional secara ilmiah dan praktis, dibedakan menjadi dua, yaitu;

- a. Dari segi ilmiah, adalah bagian dari cabang studi ekonomi yang diterapkan pada kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa
- b. Dari segi praktisnya, mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi antara negara, bangsa serta antar individu dari satu negara ke negara lain.

3. Bentuk-bentuk Kerjasama Internasional.

a. Kerjasama Bilateral

Lembaga ekonomi yang dijelaskan diatas adalah lembaga yang terbentuk karena kerjasama bilateral atau kerja sama dilakukan oleh dua negara yang berhubungan yang dibatas oleh wilayah atau kawasan tertentu.

b. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral atau kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara tanpa batasan wilayah dan kawasan tertentu, yaitu PBB. PBB adalah Perserikatan Bangsa Bangsa, tujuan utamanya untuk perdamaian dunia, menjamin hak

asasi dan yang paling penting adalah berusaha meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat di dunia.

Organisasi dibawah PBB meliputi:

- 1) IMF (Internasional Monetary Found) atau Dana Moneter Internasioanl adalah lembaga yang menciptakan stabilitas keuangan Internasional. Ketika berbicara mengenai keuangan maka IMF menjadi posisi nomor 1 lembaga keuangan yang dibahas. Segala bentuk aktivitas ataupun program yang berhubungan dengan keuangan mutlak menjadi tanggungjawab dan wewenang IMF. Masalah yang berhubungan dengan keuangan maka IMF menjadi lembaga yang mengurusinya.
- 2) IBRD (Internasional Bank for Reconstruction and Development) menjadi lembaga yang berusaha mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan. Hampir sama dengan koperasi, namun IBDR Dilakukan dalam hal pembangunan. Namun prinsip yang dianut berbeda dengan koperasi. IBDR sendiri adalah lembaga yang menggantikan GATT (General Agreement of Tarif and Trade), yang dahulu berfungsi untuk mengurangi hambatan perdagangan dengan

memperhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan.

- 3) IFC (International Finance Corporation), bertugas untuk memberikan bantuan modal kepada pengusaha swasta, namun keuntungannya dijamin oleh pemerintah, dan juga membantu menyalurkan investasi ke luar negeri terutama ke negara-negara yang sedang berkembang
- 4) ILO (International Labor Organisation), organisasi ini bertugas untuk membiayai program-program pembangunan, terutama program pembangunan pada negara yang sedang berkembang. Dengan adanya ILO ini banyak negara-negara yang terbantu dalam melaksanakan pembangunan. Dengan lancarnya proses pembangunan ini maka negara-negara yang melaksanakannya akan mengalami perkembangan yang signifikan
- 5) UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) adalah organisasi pembangunan PBB yang tujuannya untuk memajukan perkembangann industri terutama di negara-negara berkembang, dengan cara memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian dan juga penyediaan informasi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya UNIDO ini memberikan pengaruh penting dalam sistem

perhubungan di dunia terutama bagi negara-negara anggota.

Adapun bentuk-bentuk lembaga internasional di bidang ekonomi yang bekerja sama atas dasar karena memiliki kesamaan sumber daya dan saling membutuhkan, bukan hanya saling membutuhkan namun, semua negara pasti membutuhkan hal ini, yaitu:

- a. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak, kita mengetahui bahwa minyak merupakan hal yang sangat dibutuhkan di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tujuan dari OPEC adalah berusaha untuk menstabilkan harga minyak di pasar, karena minyak merupakan kebutuhan primer saat ini. Juga dapat sebagai kesinambungan antara negara-negara konsumen. Cara untuk menstabilkan harga minyak dunia adalah dengan memberikan ketentuan dimana melalui penentuan kuota (batas tertinggi produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara-negara). Apabila minyak tidak stabil maka akan terjadi kenaikan bahan baku, terjadinya kenaikan bahan baku mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu.

- b. OECD (Organisation for Economic Corporation and Development), merupakan organisasi yang bergerak pada bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Segala bentuk atau program pembangunan di negara anggota yang melakukannya. Dalam hal ini OECD berperan sebagai lembaga yang memberikan pengarahan serta bantuan dana maupun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan.

Manfaat dari adanya lembaga-lembaga ini sudah dijelaskan di awal yang mencakup meningkatnya keuangan, devisa negara, investasi, daya saing ekonomi, dan posisi perdagangan. Selain memiliki mafaat juga memiliki dampak negative yaitu, adanya ketergantungan antar negara karena adanya saling kerja sama ini maka antar negara akan menjadi saling ketergantungan, munculnya kehidupan konsumtif, dan yang terakhir adanya lembaga ini juga menarik tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja Indonesia tersingkir keberadaannya.

4. Alasan dilakukannya kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda, ada yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ada yang sedikit, ada

yang di negaranya ada sumber daya yang dibutuhkan, ada yang dinegaranya tidak ada. Sehingga negara yang satu dengan negara yang lain saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kebutuhan setiap negara akan terpenuhi

- b. Perbedaan iklim juga mempengaruhi, karena iklim setiap negara itu berbeda-beda sehingga bahan baku yang dibutuhkan tidak selalu ada di negaranya, sehingga butuh kerjasama dengan bahan baku yang dapat hidup di negara tertentu.
- c. Perbedaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Perkembangan negara berdasarkan IPTEK dibagi menjadi negara maju dan negara berkembang, dengan adanya perbedaan ini negara berkembang dapat bekerja sama dengan negara maju untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk menghadapi globalisasi dan perkembangan zaman yg semakin maju.

Dengan demikian, adanya saling ketergantungan satu sama lain, mengakibatkan banyaknya lembaga-lembaga ekonomi internasional yang terbentuk. Dari kerjasama inilah perekonomian negara akan semakin maju, dengan dibarengi oleh lembaga-lembaga yang mendukung kerjasama ini, sehingga menumbuhkan dampak positif yaitu lebih kepada meningkatkan:

a. Keuangan negara

Keuangan negara akan meningkat secara signifikan ketika suatu negara mampu bekerjasama dengan negara lain

b. Daya saing ekonomi

Ketika suatu negara mampu menjalin hubungan dan kerjasama dengan baik maka daya saing ekonomi yang mereka miliki pasti akan naik secara otomatis

c. Investasi

Dengan hubungan yang baik serta inovasi yang selalu dilakukan oleh suatu negara memungkinkan mereka untuk mengencarkan proyek investasinya baik dalam negeri maupun luar negeri,

d. Devisa Negara

Dengan adanya bantuan dari lembaga-lembaga internasional akan memberikan dampak baik pada suatu negara yang menjadi anggotanya. Karena ada lembaga ini akan membantu suatu negara dalam menyelesaikan masalahnya dan mempengaruhi idenya untuk memajukan perekonomian negara, otomatis akan terjadi peningkatan jumlah devisa negara.

e. Posisi perdagangan

Posisi perdagangan menjadi penting bagi setiap negara karena arus perdagangan akan semakin berkembang perekonomiannya.

Dari kerjasama inilah terbentuknya lembaga atau badan-badan kerjasama antar negara yang berbasis ekonomi berikut:

- AFTA (ASEAN Free Trade Area) bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan bebas ini antara lain meliputi penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang sesama negara ASEAN sehingga menurunkan biaya ekonomi
- APEC (Asia Pasific Economi Cooperation) kerjasama negara dikawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Sehingga dari kerjasama ini diharapkan negara-negara yang turut andil dalam organisasi ini dapat memaksimalkan tujuan yang diharapkan oleh APEC itu sendiri.
- EU (European Union) Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa, yang bekerja dalam bidang perdagangan, pajak, perindustrian, pertanian.

Selain memperluas dalam bidang ekonomi juga memperluas pasar bersama yang isinya untuk menghapus halangan terhadap mobilitas produk sesama negara Eropa.

5. Ruang Lingkup Ekonomi International.

Terdapat beberapa ruang lingkup dari Ekonomi International yang bisa dijadikan sebagai pembagian berdasarkan sifat-sifat tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori serta kebijaksanaan di dalam bidang perdagangan internasional
- b. Teori dan kebijaksanaan di dalam bidang keuangan serta moneter dunia Internasional
- c. Pembentukan organisasi dan unit Internasional untuk kerja sama ekonomi.
- d. Dibentuknya perusahaan - perusahaan Multinasional

Daftar Pustaka

Alexander Hendi, 2021, Smart Way Forex Trading, PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta.

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2011, Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta.

M.L Jhingan, 2016, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sadono Sukirno, 2004, Makroekonomi Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persadan, Jakarta

<https://drive.google.com/file/d/0B-0XMX7z-6byRnFwUG5wdEISMWc/view?resourcekey=0-fgcdUlmMgGzWwIVqtxP3oQ>

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/publik/lembaga-ekonomi-internasional>

<https://www.kosngosan.com/2016/11/download-modul-ebook-perdagangan-internasional-terbaru-gratis.html>

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/perdagangan-internasional/>

Tentang Penulis



Tambaten Yuliana Br Purba, lahir di Samura Kabupaten Karo Sumatera Utara pada tanggal 20 November 1956, anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Bapak Bena Purba (Almarhum) dan Ibu Layam Br Ginting. Menamatkan SD Negeri Kabanjahe Tahun 1969, SMP Negeri

Kabanjahe Tahun 1972, SMA Negeri Kabanjahe Tahun 1975. Melanjutkan ke Fakultas Arsitektur Lansekap Universitas Trisakti Jakarta dan lulus Tahun 1985, ke Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Jakarta dan lulus Tahun 2013. Meraih gelar Magister Sain dari Universitas Nusa Bangsa Bogor Tahun 2004 dan Magister Manajemen dari Universitas Terbuka Jakarta Tahun 2015. Mengikuti Program Pascasarjana (S3) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Program Studi Manajemen Lingkungan Tahun 2008.

Riwayat Pekerjaan: Tahun 1985-1993 sebagai Staf ahli Yayasan PKMK Nusantara Jakarta dan Tahun 1994 menjadi karyawan Universitas Nusa Bangsa (UNB) Bogor. Tahun 1995-2000 sebagai dosen merangkap Kepala TU Fakultas Pertanian UNB, Tahun 2001-2004 sebagai dosen merangkap Kepala TU Fakultas Kehutanan UNB, Tahun 2004-2005 sebagai dosen merangkap Kepala TU Fakultas Ekonomi UNB. Tahun 2005-2015 sebagai dosen merangkap Kepala BAAK UNB dan Tahun 2015-2018 sebagai dosen. Tahun

2018-2019 sebagai dosen merangkap Kepala LPPM UNB dan Tahun 2019- 2021 sebagai dosen merangkap Kepala BKK UNB. Januari tahun 2022 sampai sekarang sebagai dosen Pascasarjana UNB dengan jabatan akademik Lektor Kepala.

Organisasi Profesi: Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia (PTALI), sebagai Bendahara Umum periode 2022-2027.

BAB

12

TEORI KUANTITAS DAN SISTEM PERBANKAN

Arniati

A. Teori Kuantitas

Teori Kuantitas lebih menekankan pada peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang beredar dan (b) psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*ekspektations*). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- 1) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar baik dalam bentuk uang kartal atau uang giral. Tanpa ada kenaikan jumlah uang beredar, kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen. Hal ini hanya akan menyebabkan kenaikan harga-harga untuk sementara waktu
- 2) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan yang tepat dapat digambarkan dalam teori ini (Sanjaya et al (2019)).

Keadaan yang pertama, adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan –bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya. Ini berarti bahwa sebagian besar jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk membeli barang. Dengan demikian dampaknya terhadap kenaikan inflasi sangat kecil.

Keadaan kedua, adalah apabila kedua masyarakat mulai sadar bahwa ada inflasi. Masyarakat mulai mengharapkan kenaikan harga-harga. Penambahan jumlah uang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah kasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang. Bila masyarakat mengharapkan harga-harga barang naik di masa mendatang sebesar laju inflasi di bulan yang lalu, maka kenaikan jumlah uang beredar sepenuhnya akan diartikan menjadi kenaikan permintaan akan barang-barang.

Keadaan ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap *Hyperinflation*. Dalam keadaan ini masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang (*velocity of money*) yang mengalami kenaikan Natsir, M (2009).

Teori kuantitas uang digunakan oleh para ekonom untuk analisis ekonomi makro. Dalam ilmu ekonomi,

teori kuantitas uang menjadi cara untuk mengemukakan pandangan mengenai hubungan antara penawaran uang dan tingkat harga. Para ekonom membagi teori kuantitas uang ke dalam tiga pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa seluruh penawaran uang yang terdapat dalam perekonomian digunakan untuk transaksi. Tujuan dari transaksi adalah untuk membiayai pembelian barang dan jasa. Pandangan kedua adalah adanya jumlah uang beredar yang tetap. Pandangan ini didasarkan pada kegiatan belanja dan menerima uang bagi setiap orang relatif tetap. Pandangan ketiga merupakan asumsi bahwa tingkat kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian. Produksi nasional secara maksimal terjadi dalam perekonomian dan tidak dapat ditambah lagi Muchtolifah, (2000).

1. Teori Kuantitas Uang

Teori kuantitas uang merupakan teori dalam ekonomi yang menyatakan tentang hubungan antara peredaran uang dan tingkat inflasi. Irving Fisher menjadi pencetus teori ini. Teori kuantitas uang digunakan dalam proses pemindahan moneter jalur uang. Pandangan utamanya adalah adanya faktor penyebab inflasi yang mencakup sifat langsung dalam pemindahan moneter, jumlah uang beredar dan pertumbuhannya. Dalam ekonomi moneter, teori kuantitas uang menyatakan bahwa tingkat harga umum barang dan jasa bergantung langsung pada jumlah uang yang beredar, atau persediaan uang. Teori tersebut

ditantang oleh ekonomi Keynesia,^[3] namun diperbaharui dan dirombak oleh mahzab ekonomi moneteris. Meskipun para ekonom arus utama sepakat bahwa teori kuantitas memegang kebenaran dalam jangka panjang, masih ada ketidaksepakatan soal keabsahannya dalam jangka pendek Abdullah et al (2018).

Teori yang menjelaskan hubungan antara uang, harga, dan ekonomi; hubungan ini menjelaskan bagaimana tingkat inflasi yaitu dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar (quantify theory of money). Teori kuantitas uang adalah teori bahwa variasi harga berkaitan dengan variasi jumlah uang beredar. Versi yang paling umum, kadang-kadang disebut "teori neo-kuantitas" atau teori Nelayan, menunjukkan ada hubungan proporsional mekanis dan tetap antara perubahan dalam jumlah uang beredar dan tingkat harga umum. Perumusan teori kuantitas uang yang populer dan kontroversial ini didasarkan pada persamaan oleh ekonom Amerika Irving Fisher.

Persamaan Fisher dihitung sebagai :

$$M \times V = P \times T$$

Dimana:

M=money supply (jumlah uang beredar)

V=velocity of money (perputaran uang)

P=average price level (tingkat harga rata-rata)

T=volume of transactions in the economy (volume transaksi dalam perekonomian)

Secara umum, teori kuantitas uang mengasumsikan bahwa peningkatan jumlah uang cenderung menciptakan inflasi, dan sebaliknya. Misalnya, jika Federal Reserve atau Bank Sentral Eropa (ECB) menggandakan pasokan uang dalam perekonomian, harga jangka panjang dalam perekonomian akan cenderung meningkat secara dramatis. Teori Model Fisher memiliki banyak kekuatan, termasuk kesederhanaan dan penerapan ke model matematika. Namun, ia menggunakan beberapa asumsi palsu untuk menghasilkan kesederhanaannya, termasuk desakan pada peningkatan proporsional dalam jumlah uang beredar, independensi variabel dan penekanan pada stabilitas harga.

Teori kuantitas uang pertama kali dikembangkan oleh David Ricardo yang kemudian disempurnakan oleh Irving Fisher. Teori ini menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran uang. Berikut penjelasan mengenai masing-masing teori kuantitas uang dikembangkan oleh David Ricardo dan Irving Fisher.

a. Teori kuantitas uang menurut David Ricardo

Teori kuantitas uang menurut David Ricardo menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar.

Jika jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula dan juga sebaliknya.

Secara umum, teori ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$M = K \text{ atau } P = 1/K \times M$$

Berikut keterangannya.

M = jumlah uang

K = perbandingan tetap atau konstanta

P = tingkat harga

b. Teori Kuantitas Uang dari Irving Fisher

Teori ini merupakan penyempurnaan atas teori kuantitas uang David Ricardo. Teori kuantitas uang menurut Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang memengaruhi nilai uang. Teori kuantitas uang ini mengemukakan bahwa jumlah uang beredar berbanding lurus dengan perubahan harga. Daya beli masyarakat (permintaan uang) dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.

Irving Fisher menjadi pencetus teori kuantitas uang yang kemudian menjadi bagian dari teori permintaan uang. Dalam pandangan Fisher, keseimbangan keuangan selalu terjadi di dalam

masyarakat. Fisher menetapkan bahwa fungsi uang yang utama adalah sebagai alat tukar. Keseimbangan ini teramati dengan kesamaan jumlah uang yang diterima oleh penjual dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli. Nilai dari barang atau jasa yang dibeli sama dengan nilai barang atau jasa yang dijual pada suatu periode tertentu. Banyaknya kegiatan transaksi dikalikan dengan rerata harga barang merupakan nilai dari barang-barang yang dijual. Banyaknya uang sama dengan nilai dari barang yang ditransaksikan di dalam masyarakat dikalikan dengan beberapa kali rata-rata perputaran uang dalam periode yang sama. Teori kuantitas uang Fisher awalnya tidak ditujukan untuk teori moneter. Pengembangannya menjadi teori moneter didasarkan pada beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah uang selalu dimiliki oleh orang karena kegunaannya dalam proses transaksi. Lembaga sosial yang ada di masyarakat turut mempengaruhi kepemilikan uang. Dalam jangka pendek, jumlah uang dapat dianggap konstan dan tetap. Pengeluaran masyarakat atau pendapatan nasional menentukan jumlah transaksi dalam satu periode tertentu.

Irving Fisher mengajukan rumus yang lazim disebut *Fisher Equation* sebagai berikut.

$$MV = PT$$

Berikut keterangannya.

M = jumlah uang yang beredar

V = kecepatan peredarannya

P = tingkat harga

T = jumlah transaksi

Selain teori kuantitas uang, secara umum ada beberapa teori permintaan penawaran uang lainnya, yaitu:

2. Teori Uang Statis

Teori ini disebut statis karena tidak mempermasalahkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi.

3. Teori Keynes

Teori Keynes dikenal dengan teori preferensi likuiditas yang mengungkapkan bahwa penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh tiga motif, yakni motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi.

4. Teori Strukturalis

Teori strukturalis menyatakan bahwa inflasi, terutama di negara berkembang, lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian.

Menurut teori struktural, terdapat dua masalah struktural dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. Pertama, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Kedua, produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan produksi makanan juga tidak secepat pendapatan per kapita, sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal tersebut mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri, yang mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan menimbulkan inflasi.

B. Sistem Perbankan

1. Sistem Perbankan Dunia

a. Bank Dunia (BD)

Adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai "*specialized agency*". Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris.

Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya. Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968- 1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara- negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya Djumhana, Muhammad (2000).

b. *International Monetary Fund (IMF)*

Muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca *Great Depression* yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada tanggal 22 Juli 1944 –sebagai akibat dari *Great Depression*– 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II.

Negara- negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama *Great Depression*. Pertemuan ini melahirkan "*Bretton Woods Agreements*" yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, *The International Bank for Reconstruction and Development* (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank). Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF. Lembaga ini berawal ketika PBB mensponsori Konferensi Keuangan dan Moneter di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli 1944. Artikel tentang Perjanjian IMF berlaku mulai 27 Desember 1945, dan organisasi IMF terbentuk pada tanggal 27 September 1945, sebagai bagian dari rencana rekonstruksi pasca Perang Dunia II dan memulai operasi finansial pada 1 Maret 1947. Lembaga ini, bersama Bank untuk Penyelesaian Internasional dan Bank Dunia, sering pula disebut sebagai institusi Ruli Anancuhi. Ketiga institusi ini menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir semua negara-negara yang memiliki ekonomi pasar Askin, Zainal, (1997).

2. Sistem Perbankan Indonesia

a. Pengertian sistem perbankan di Indonesia

Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan pola bagai mana sebuah sektor perbankan (bank-bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. UU RI No.7 Tahun 1992, Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan kosep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia, pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam menjalankan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok Perbankan, disebutkan yang dimaksud dengan :

Bank : Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Lembaga Keuangan: Semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Jenis Lembaga Perbankan menurut fungsinya dibedakan kedalam :

- 1) Bank Sentral
- 2) Bank Umum
- 3) Bank Asing

b. Tugas dan Fungsi Bank

Pengaturan tata perbankan di Indonesia sesuai jiwa makna ketetapan MPRS Nomor MPRS/1966 pada dasarnya bertujuan untuk dapat memobilisasikan dan mengembangkan kekuatan ekonomi potensial yang dikerahkan bagi peningkatan kemakmuran rakyat.

Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem dan menjamin adanya kesatuan pimpinan di dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter Pemerintah di bidang perbankan. Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi.

Membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat. Hal tersebut dilaksanakan bank dengan mengingat bahwa perbankan di Indonesia

dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian Widjanarto (2003).

c. Hubungan Bank Dengan Perusahaan Sebagai Nasabahnya

Perusahaan pada masa sekarang dapat dikatakan sangat memerlukan jasa-jasa dari bank, baik itu berupa pengambilan pinjaman (kredit) maupun melalui transaksi jasa pengiriman uang, penyimpanan uang dalam bentuk rekening koran giro, inkaso, kliring dan sebagainya. Di lain pihak, bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan (kredit) dan jasa-jasa tersebut. Untuk itu bank memperoleh bunga, komisi atau provisi dari penjualan kredit dan pemberian jasa itu. Dengan demikian bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas pemberian kredit dan jasa-jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan sistem pemasaran yang terpadu.

d. Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk

berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

- 1) **Agent of trust** Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan.

- 2) **Agent of development** Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian.

3) **Agent of servies** Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan.

e. Menganalisa Sistem Perbankan di Indonesia

Sistem Informasi Manajemen - Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI) SIMSPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan dan pengaturan perbankan BI.

Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank;
- Menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank.
- Mengoptimalkan Pengawas dan Pemeriksa Bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan

pemeriksaan bank;

- Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan;
- Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi

Daftar Pustaka

- Natsir, M. (2009). Ekonomi Moneter: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris (PDF). Malang: Tunggal Mandiri. hlm. 10. ISBN 978-979-19760-6-0.*
- Minsky, Hyman P. John Maynard Keynes, McGraw-Hill. 2008. p.2.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya (2019). Ekonomika Uang: Based on Empirical Research (PDF). Bandung: CV. Sadari. hlm. 13. ISBN 978-623-7491-00-2.*
- Muchtolifah. Ekonomi Makro (PDF). Unesa Press. hlm. 55. ISBN 978-979-028-241-4.*
- Abdullah, T., dan Sintha Wahjusaputri (2018). Bank dan Lembaga Keuangan (PDF) (edisi ke-2). Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 70.*
- Askin, Zainal, 1997, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo
- Djumhana, Muhammad, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Adiyta Bakti.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok Perbankan
- UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
- Widjanarto, 2003, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Grafiti www.ibi.go.id

Tentang Penulis



Arniati, lahir di Bontobangun Bulukumba pada tanggal 07 Maret 1971 dari pasangan Puang Muddin dan Puang Hj. Cicang. Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 85 Bingkarongo lulus pada tahun 1985, kemudian SMP Negeri Palampang lulus pada tahun

1988, dan SMA Negeri Tanete lulus pada tahun 1991 di Kabupaten Bulukumba. Penulis kemudian melanjutkan studi jenjang S1 pada jurusan Manajemen STIE Bajiminasa Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1997. Selanjutnya penulis menamatkan S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Kekhususan Pendidikan Ekonomi) program pascasarjana UNM yang lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2012, penulis menempuh kembali Pendidikan lanjutan yaitu program S3 Program Pascasarjana UNM Program Studi Pendidikan Ekonomi dan menamatkannya pada tahun 2017.

Riwayat pekerjaan penulis dimulai dengan berprofesi sebagai Dosen Tetap Yayasan STISIPOL 17 Agustus 1945 Ujung Pandang mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 penulis merupakan dosen di STKIP Mega Rezky Makassar. Tahun 2017 sampai sekarang, penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain menjadi tenaga pengajar, penulis aktif meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.